



Gubernur Sumatera Barat



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2021



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Padang, 31 Maret 2022



INSPEKTUR,

ZAENUDIN, S.E, M.M

Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu.....	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Dasar hukum	3
1.4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja.....	29
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	30
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.....	33
3.4. Realisasi Anggaran.....	238
BAB IV PENUTUP	241
LAMPIRAN	
1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil'Alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban/akuntabilitas pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 berisikan informasi yang menggambarkan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja berdasarkan pencapaian 7 tujuan dan 18 sasaran yang diukur dengan 9 indikator tujuan dan 23 indikator sasaran. Evaluasi dan analisis untuk masing-masing indikator tersebut menjelaskan pencapaian indikator kinerja, hambatan/kendala yang dihadapi serta upaya yang telah untuk pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan di tahun 2021.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan hasil kerja keras dari semua pihak terkait termasuk dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta. Semua kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2021 akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik kedepannya.

Semoga LKjIP ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak yang ingin memperoleh gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKjIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, Maret 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tekhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 memberikan informasi kepada *stakeholders* terkait pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Kinerja ini didasarkan pada ketercapaian 9 indikator kinerja yang mengukur 7 tujuan dan 23 indikator kinerja yang mengukur 18 sasaran yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Kinerja tahun 2021 tercapai dengan rata-rata capaian indikator kinerja 18 sasaran sebesar 104,35% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*. Sasaran strategis dengan pencapaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya nilai ekspor dengan capaian sebesar 220,15%, dan sasaran strategis terendah adalah sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan capaian sebesar 78,11%. Jika dikelompokkan berdasarkan kategori keberhasilan, dari 18 sasaran tersebut, 9 sasaran (50%) mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, 7 sasaran (38,89%) mencapai keberhasilan dengan kategori *sangat baik*, 2 sasaran (11,11%) mencapai keberhasilan dengan kategori *baik*.

Pencapaian 7 tujuan dan 18 sasaran tersebut dimaksudkan untuk mencapai 5 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Berikut ini akan diuraikan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan Misi terkait;

Misi 1 Meningkatkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamais, Beradat dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Pencapaian Misi 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 2 tujuan yaitu "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama" dan "Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan". Masing-masing tujuan

tersebut memiliki 1 sasaran yang diukur dengan 2 indikator kinerja yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	73,4	67,87	92,47
1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1 Indeks Kerukunan	73,4	67,87	92,47
2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional	63	56	88,89
2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	2.1.1 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional	63	56	88,89
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 1					90,68

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja adalah 90,68%, termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Misi 2 Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pencapaian Misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu “Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi”. Tujuan tersebut memiliki 3 sasaran yang diukur dengan 5 indikator kinerja yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	67,5	66,87	99,07
1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (76,50)	BB (76,16)	99,56
1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	71	49,31	69,45
		1.2.2 Indeks e-Government	3,1	2,69	86,77
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.3.1 Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,00	88,33	105,15
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 2					94,35

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja adalah 94,35%, termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi.

Pencapaian Misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tujuan tersebut memiliki 2 sasaran yang diukur dengan 3 indikator kinerja yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,56	72,65	100,12
1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1.1.1 Harapan lama sekolah	14,04	14,09	100,36
		1.1.2 Rata-rata lama sekolah	9,09	9,07	99,78
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.2.1 Angka Harapan Hidup	69,62	69,59	99,96
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 3					100,01

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja adalah 100,01%, termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Misi 4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah.

Pencapaian Misi 4 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 1 tujuan yaitu “Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah”. Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran yang diukur dengan 5 indikator kinerja yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,44	3,29	95,64
		Indeks Gini	0,299	0,3	99,67
1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan perkapita (Rp.Juta)	46,09	45,29	98,26
1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	6	5,02	83,67
1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1393,13	3066,93	220,15
1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan	6,4	6,04	105,63
		1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,7	6,52	102,69
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 4					126,56

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja adalah 126,56%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Pencapaian Misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari pencapaian 2 tujuan yaitu “Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah” dan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”. Dua tujuan tersebut memiliki 7 sasaran yang diukur dengan 8 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	42	105,00
		Rasio Elektrifikasi	99,30	99,91	100,61
1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	42	105,00
1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1 Rasio Elektrifikasi	99,30	99,91	100,61
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	1.3.1 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur	61,94	64,93	104,82

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPAIAN KINERJA	
			pengelolaan Sumber Daya air			
1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54,68	55,37	101,26
2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,05	80,75	100,87
2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1	Indeks Kualitas Air	76,8	79	102,86
		2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90,39	90,22	99,81
2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	66,3	66,24	99,91
2.3	Menurunnya risiko bencana	2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	71,03	94,71
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 5						100,79

Rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja adalah 100,79%, termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Daftar Tabel

Tabel 1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	18
Tabel 2	Perubahan Perjanjian Kinerja.....	20
Tabel 3	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	30
Tabel 4	Capaian Indikator Sasaran 1.1.1	36
Tabel 5	Kategori Indeks Kerukunan.....	37
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1.....	41
Tabel 7	Capaian Indikator Sasaran 1.2.1	44
Tabel 8	Warisan Budaya Sumatera Barat yang Ditetapkan Secara Nasional sampai dengan Tahun 2021.....	44
Tabel 9	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.2.1.....	49
Tabel 10	Capaian Indikator Tujuan 2.1.....	52
Tabel 11	Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	52
Tabel 12	Rincian Hasil Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	53
Tabel 13	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1.....	58
Tabel 14	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung opini WTP	63
Tabel 15	Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2021	65
Tabel 16	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020.....	67
Tabel 17	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP.....	69
Tabel 18	Capaian indikator kinerja sasaran 2.1.2	70
Tabel 19	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Peningkatan IP ASN	77
Tabel 20	Rincian Penilaian Indeks SPBE	79
Tabel 21	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung peningkatan indeks <i>e-government</i>	83
Tabel 22	Predikat survei kepuasan Masyarakat	84
Tabel 23	Capaian Indikator Sasaran 2.1.3	85
Tabel 24	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah.....	85
Tabel 25	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.3.....	89
Tabel 26	Capaian Indikator Tujuan 3.1.....	91
Tabel 27	Capaian indikator kinerja sasaran 3.1.1	96
Tabel 28	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung sasaran 3.1.1 ..	104
Tabel 29	Capaian Indikator Sasaran 3.1.2	105
Tabel 30	Jumlah Kematian Ibu tahun 2017-2021 per Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	107
Tabel 31	Jumlah Kematian Neonatal tahun 2017-2021 per Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.....	108
Tabel 32	Jumlah Kematian Bayi tahun 2017-2021 per Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	109
Tabel 33	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2...	112
Tabel 34	Capaian indikator kinerja tujuan 4.1	115
Tabel 35	PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019 - 2021	116
Tabel 36	Pertumbuhan PDRB 2021 c-to-c tertinggi (%)	117

Tabel 37	Capaian Indikator Sasaran 4.1.1	126
Tabel 38	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung opini WTP	130
Tabel 39	Capaian Indikator Sasaran 4.1.2	132
Tabel 40	Realisasi PMA dan PMDN tahun 2021 berdasarkan sektor usaha	133
Tabel 41	Realisasi Investasi PMA berdasarkan Negara Tahun 2021.....	135
Tabel 42	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2...	141
Tabel 43	Capaian Indikator Sasaran 4.1.3	142
Tabel 44	Ekspor Non Migas Sumatera Barat Berdasarkan Beberapa Golongan Barang Tahun 2017-2021.....	143
Tabel 45	Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.....	144
Tabel 46	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3...	149
Tabel 47	Capaian indikator kinerja tujuan 4.1	150
Tabel 48	Tabel Garis Kemiskinan Tahun 2020-2021	153
Tabel 49	Tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2020-2021	159
Tabel 50	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	161
Tabel 51	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4...	164
Tabel 52	Capaian Indikator Sasaran 5.1.1	169
Tabel 53	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat per Ruas Tahun 2021	169
Tabel 54	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1...	174
Tabel 55	Capaian Indikator Sasaran 5.1.2	175
Tabel 56	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota tahun 2021	176
Tabel 57	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2...	180
Tabel 58	Capaian Indikator Sasaran 5.1.3	182
Tabel 59	Daerah Irigasi yang direhabilitasi Tahun 2021	187
Tabel 60	Pembangunan Perkuatan Tebing Tahun 2021	189
Tabel 61	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.3...	192
Tabel 62	Capaian Indikator Sasaran 5.1.4.	193
Tabel 63	Rincian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni per Kabupaten/Kota.....	199
Tabel 64	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.4...	202
Tabel 65	Skor dan Kriteria IKLH	205
Tabel 66	Capaian Indikator Tujuan 5.2.....	205
Tabel 67	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.1.....	210
Tabel 68	Kategori IKA.....	212
Tabel 69	Perkembangan IKA tahun 2016-2021 (skala 100 dan skala 70)	213
Tabel 70	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.2.1...	224
Tabel 71	Capaian Indikator Sasaran Strategis 5.2.2	226
Tabel 72	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.2.2...	231
Tabel 73	Capaian Indikator Sasaran Strategis 5.2.3	233
Tabel 74	Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2021	233
Tabel 75	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.2.3...	237
Tabel 76	Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 18 sasaran tahun 2021	239

Daftar Grafik

Grafik 1	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	7
Grafik 2	Kondisi ASN Provinsi Sumbar Tahun 2017-2021	12
Grafik 3	Komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2021	12
Grafik 4	Komposisi ASN berdasarkan Golongan per 31 Desember 2021.....	13
Grafik 5	Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	17
Grafik 6	Gambaran pencapaian indikator Kinerja Tahun 2021	32
Grafik 7	Indeks Kerukunan tahun 2018-2021 Provinsi Sumatera Barat	34
Grafik 8	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Kerukunan tahun 2020-2021	37
Grafik 9	Indeks Kerukunan tahun 2018-2021 Provinsi Sumatera Barat	38
Grafik 10	Indeks Kerukunan Provinsi di Indonesia Tahun 2021	38
Grafik 11	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional tahun 2018-2021	42
Grafik 12	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional tahun 2020-2021.....	46
Grafik 13	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional tahun 2018-2021	47
Grafik 14	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021	53
Grafik 15	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021	54
Grafik 16	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	55
Grafik 17	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020-2021	65
Grafik 18	Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2016-2021	66
Grafik 19	IP ASN Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kondisi 5 Januari 2022	73
Grafik 20	IP ASN Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021	74
Grafik 21	Perbandingan IP ASN Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Prov Kep. Riau	74
Grafik 22	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks SPBE Tahun 2020-2021	80
Grafik 23	Perkembangan dan Perbandingan Indeks eGovernment/SPBE.....	81
Grafik 24	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Rata-rata survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Tahun 2020-2021	86
Grafik 25	Perkembangan rata-rata SKM dan OPD yang melaksanakan survei tahun 2016-2021	87
Grafik 26	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator IPM tahun 2020-2021.....	92
Grafik 27	Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	93
Grafik 28	IPM Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021....	94
Grafik 29	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator HLS tahun 2020-2021	98
Grafik 30	Perkembangan HLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	98
Grafik 31	HLS Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021....	99
Grafik 32	Perkembangan RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	101
Grafik 33	RLS Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021.....	102
Grafik 34	Perkembangan AHH Provinsi Sumatera Barat	106
Grafik 35	AHH Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021.....	107
Grafik 36	Prevalensi <i>Stunting</i> 2017-2021.....	109
Grafik 37	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2021	118
Grafik 38	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	119
Grafik 39	Gambaran Indeks/Rasio Gini Sumatera Barat September 2018-2021.....	122

Grafik 40	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Gini Tahun 2020-2021	123
Grafik 41	Indeks gini Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2021	124
Grafik 42	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator PDRB perkapita Tahun 2020-2021	127
Grafik 43	Perkembangan PDRB perkapita tahun 2017-2021	127
Grafik 44	PDRB perkapita Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2020-2021.....	128
Grafik 45	Negara Penyumbang PMA terbesar Tahun 2021	135
Grafik 46	Kabupaten/Kota Penerima PMA terbesar Tahun 2021	135
Grafik 47	Kabupaten/Kota Penerima PMDN terbesar Tahun 2021	136
Grafik 48	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator persentase pertumbuhan investasi tahun 2020-2021.....	137
Grafik 49	Pertumbuhan investasi di Sumatera Barat tahun 2017-2021	138
Grafik 50	Struktur Nilai Ekspor asal Sumatera Barat menurut sektor Tahun 2021	144
Grafik 51	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Ekspor Tahun 2020-2021	145
Grafik 52	Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021	146
Grafik 53	Pertumbuhan Nilai Ekspor Provinsi di Pulau Sumatera dengan Nasional Tahun 2021.....	147
Grafik 54	Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut Daerah September 2020-September 2021.....	152
Grafik 55	Daftar Komoditi Makanan Yang Berkontribusi Terhadap Garis Kemiskinan.....	153
Grafik 56	Daftar Komoditi Non Makanan Yang Berkontribusi Terhadap Garis Kemiskinan.....	154
Grafik 57	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator tingkat kemiskinan tahun 2020-2021	154
Grafik 58	Tingkat Kemiskinan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021	155
Grafik 59	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2020-2021	160
Grafik 60	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Pengangguran tahun 2020-2021.....	161
Grafik 61	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat Tahun 2017-2021	162
Grafik 62	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Agustus 2021	163
Grafik 63	Perkembangan indikator Tujuan 5.1	167
Grafik 64	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2020-2021	171
Grafik 65	Perkembangan Ruas Jalan Kondisi Mantap $\geq 72\%$ tahun 2017-2021	172
Grafik 66	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Rasio Elektrifikasi Tahun 2020-2021	177
Grafik 67	Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	178
Grafik 68	Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021.....	178
Grafik 69	Luas Daerah Terdampak rehabilitasi Irigasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.....	183
Grafik 70	Perkembangan kapasitas tampungan sumber air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021.....	184
Grafik 71	Perkembangan luas kawasan yang teramankan dari daya rusak air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021	185
Grafik 72	Perbandingan realisasi dan capaian Indikator persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020-2021.....	186

Grafik 73	Perkembangan Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021	186
Grafik 74	Akses Sanitasi tahun 2017-2021.....	194
Grafik 75	Akses Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2021	195
Grafik 76	Cakupan Air Minum tahun 2017-2021	197
Grafik 77	Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota tahun 2021.....	197
Grafik 78	Rumah TLH yang ditangani dari tahun 2018-2021	199
Grafik 79	Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020-2021	201
Grafik 80	Cakupan infrastruktur masyarakat tahun 2018-2021.....	201
Grafik 81	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja IKLH tahun 2020-2021	206
Grafik 82	IKLH Sumatera Barat tahun 2016-2021	207
Grafik 83	IPA dan IKA sungai dan danau yang dipantau di tahun 2021.....	212
Grafik 84	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks kualitas air tahun 2020-2021	213
Grafik 85	Nilai IKA Kabupaten/Kota tahun 2021	214
Grafik 86	Perbandingan IKA Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2017-2021.....	214
Grafik 87	Indeks Kualitas Udara 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	220
Grafik 88	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2020-2021	220
Grafik 89	Perbandingan IKU Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	221
Grafik 90	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tutupan lahan tahun 2020-2021	227
Grafik 91	IKL tahun 2016-2021	228
Grafik 92	Perbandingan IKL Sumatera Barat dengan IKL Nasional Tahun 2016-2021 ...	228
Grafik 93	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2020-2021	234
Grafik 94	Kejadian bencana yang ditangani tahun 2016-2021	234
Grafik 95	Rincian Belanja Langsung Tahun 2021.....	238



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hal mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 komponen SAKIP yaitu komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja dan komponen reviu dan evaluasi. Sebagai bentuk pemenuhan komponen pelaporan kinerja, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja pemerintah daerah disusun dan disampaikan ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini menginformasikan kepada *stakeholder* pencapaian dari target kinerja yang telah diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu entitas akuntabilitas menyusun dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Laporan ini menginformasikan keberhasilan/kegagalan pencapaian 18 sasaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dimaksudkan untuk mendukung implementasi SAKIP secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* terkait pencapaian kinerja pemerintah provinsi Sumatera Barat disertai dengan evaluasi dan analisa upaya yang telah dilakukan, hambatan/kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja tersebut yang akan dijadikan dasar perbaikan di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang.
- b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat 2, Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.

4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
5. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota.
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

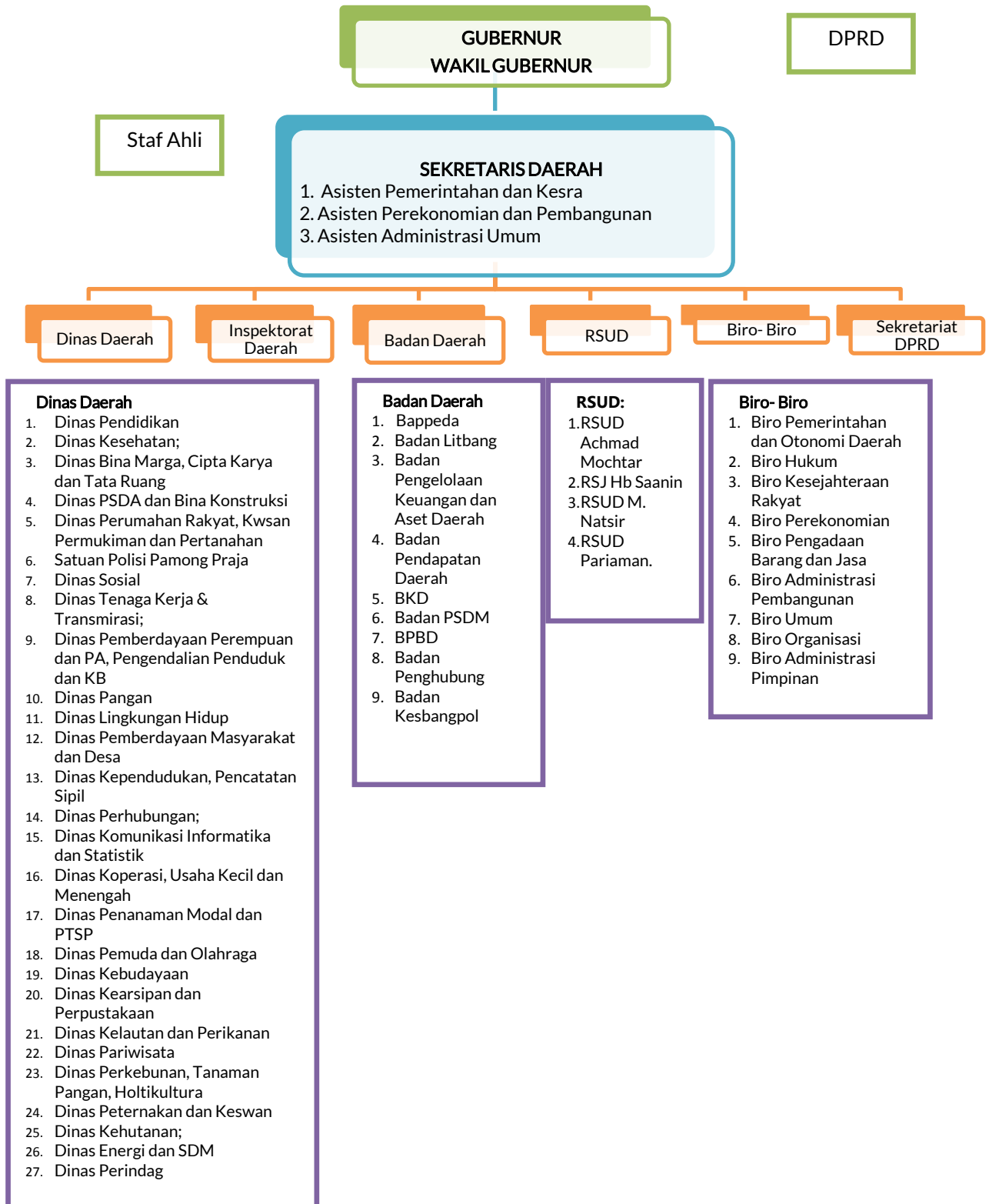
Sementara itu dalam pasal 91 ayat 3 diuraikan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membatalkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
4. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.4.3. Isu-isu Strategis

Berikut ini akan diuraikan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021:

1. *Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama*

Pembangunan mental dan penerapan nilai-nilai adat dan pengamalan ajaran agama penting bagi daerah untuk menangkis pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial dan masuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pembangunan bidang ini dilaksanakan untuk menyiapkan generasi muda Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, berdaya saing dan mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa.

2. *Penanganan Bencana Alam*

Letak geografis Sumatera Barat yang rawan terhadap berbagai bencana alam dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, pemerintah Sumatera Barat harus memberikan perhatian yang besar untuk mengurangi resiko, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang terkena bencana. Hal ini diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

3. *Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah*

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah masih merupakan isu penting bagi Sumatera Barat, meskipun sudah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah selama periode 2010-2015. Persoalan kemiskinan yang dihadapi saat ini sudah bergeser untuk menanggulangi tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kelompok masyarakat yang miskin. Untuk mengeluarkan atau membebaskan kelompok masyarakat dari kemiskinan diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika kelompok masyarakat miskin dapat di atasi, maka tujuan Sumatera Barat bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan.

Selanjutnya Sumatera Barat juga ingin mewujudkan keinginan untuk menjadi provinsi yang bebas dari daerah tertinggal. Saat ini masih terdapat satu daerah

tertinggal yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Daerah ini merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil. Untuk membebaskan daerah tertinggal ini, diperlukan dana yang besar dan usaha yang terintegrasi, fokus, terukur dan tepat sasaran.

4. *Penguatan Struktur Ekonomi Daerah*

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor-sektor produktivitas tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja. Oleh sebab itu, penguatan struktur ekonomi dijadikan isu strategis dalam rangka lebih menumbuhkembangkan industri pengolahan pertanian, industri kerajinan dan industri pariwisata untuk mendorong penguatan dan perubahan struktur ekonomi Sumatera Barat.

5. *Peningkatan Infrastruktur*

Sumatera Barat mempunyai daya saing daerah yang belum mencukupi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha. Salah satu faktor penghalang adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur; jalan, listrik, transportasi, (darat, laut, udara, kereta api), pantai, sungai, irigasi, perumahan/permukiman, bangunan gedung serta prasarana air minum sanitasi. Oleh sebab itu peningkatan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga menarik bagi investor untuk mengembangkan berbagai usaha di Sumatera Barat.

6. *Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk mendukung terlaksananya pemerintah yang baik dan bersih diperlukan peningkatan integritas dan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, memantapkan sistem manajemen kepegawaian, keterbukaan informasi kepada publik dan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

7. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia*

Kualitas sumberdaya manusia adalah faktor penentu kemajuan suatu negara dan daerah. Pentingnya isu peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah untuk

mengatasi ketimpangan kualitas sumberdaya manusia antar daerah di Sumatera Barat dan untuk menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di berbagai sektor.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat diperlukan pembenahan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan seperti peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

8. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) menjadi isu pembangunan daerah karena bahagian terbesar yang menggerakkan ekonomi Sumatera Barat adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Jika UMKMK tidak mengalami perkembangan, maka perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesempatan kerja akan terjadi di Sumatera Barat.

9. Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu penting bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan, Sumatera Barat perlu berupaya untuk menjadi provinsi penghasil pangan nasional untuk mendukung kedaulatan pangan.

10. Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman

Upaya pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan potensi kelautan dan kemaritiman secara optimal dengan peningkatan sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana seperti penyediaan armada dan alat tangkap di bidang perikanan serta sarana prasarana untuk pariwisata bahari dan sarana transportasi untuk pembangunan kemaritiman.

11. Pengurangan Pengangguran

Pengurangan pengangguran menjadi isu pembangunan daerah karena pengangguran menjadi hambatan dalam pembangunan dan menambah beban tanggungan yang berat bagi rumah tangga dan daerah serta berkaitan dengan kemiskinan. Untuk penanganan pengangguran di Sumatera Barat diperlukan pembenahan pada sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi penawaran adalah peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga

cocok dengan permintaan di pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, pembenahan balai latihan yang dapat menghasilkan dan mengembangkan wirausaha baru untuk sektor UMKMK dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi permintaan tenaga kerja adalah meningkatkan dan membuka lapangan kerja baru dan alternatif bagi pekerja yang masuk kategori setengah pengangguran. Membuka lapangan kerja tentu memerlukan pengembangan berbagai sektor yang dapat diunggulkan Sumatera Barat seperti sektor pariwisata, kelautan dan kemaritiman dan konstruksi bangunan.

12. Peningkatan Daya Saing Daerah

Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti *Asean Economic Community* (AEC) dan *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk Sumatera Barat terbuka cukup besar terutama ke negara Asean dan China. Untuk itu, upaya pemanfaatan pasar global tersebut guna percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat perlu diiringi dengan peningkatan daya saing daerah yang ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang berkualitas serta tingkat keamanan yang tinggi. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

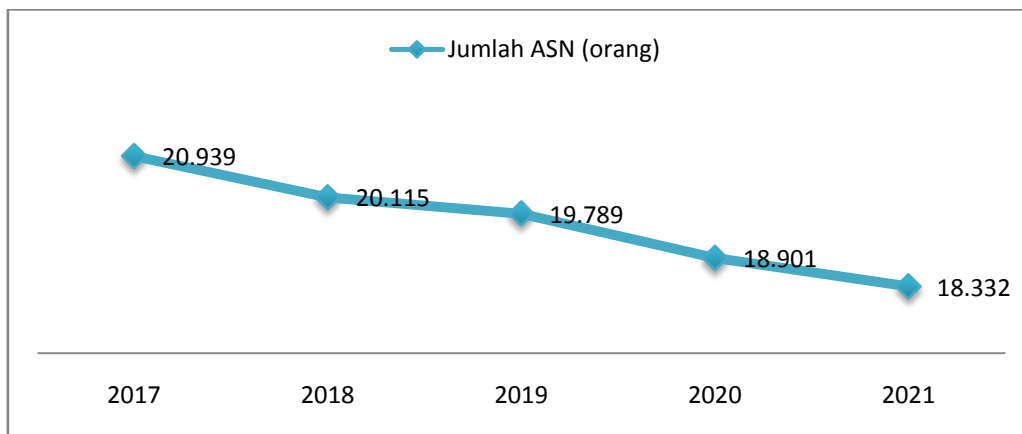
13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dijadikan isu pembangunan agar pembangunan yang akan dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung. Pembangunan dan pengembangan berbagai sektor yang akan dilaksanakan di masa mendatang harus dipastikan tidak merusak dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*) perencanaan tata ruang perlu menjadi acuan semua pihak-pihak yang berkepentingan.

1.4.4. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 18.332 orang. Jumlah ini menurun sebanyak 569 orang dari kondisi per 5 Januari 2021. Kondisi ASN Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir juga terus mengalami penurunan sebagaimana digambarkan pada grafik 2.

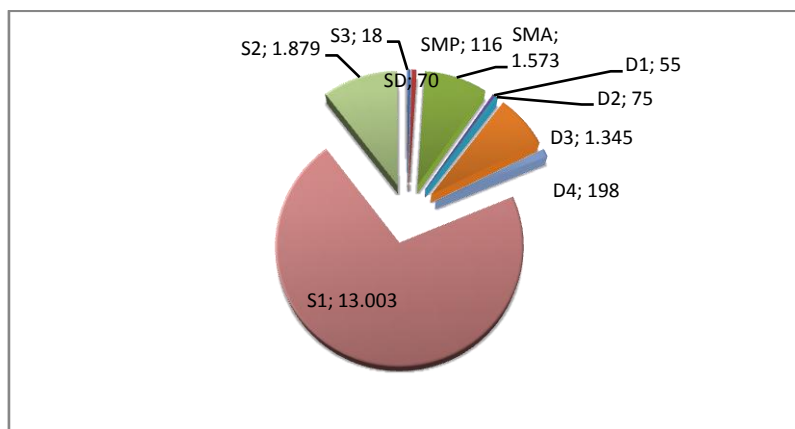
Grafik 2 Kondisi ASN Provinsi Sumbar Tahun 2017-2021



Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah

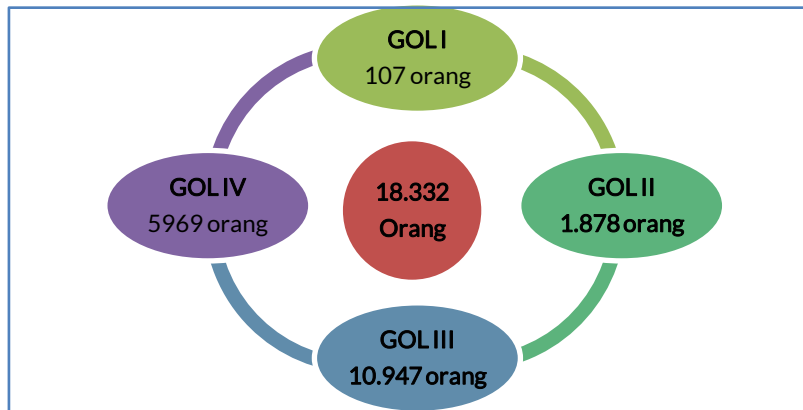
Jika dikelompokkan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Golongan, komposisi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat digambarkan pada grafik 3 dan 4.

Grafik 3 Komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2021



Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah

Grafik 4 Komposisi ASN berdasarkan Golongan per 31 Desember 2021



Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah

Memenuhi arahan Presiden, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang melakukan peralihan 414 orang pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan pada tanggal 31 Desember 2021.

1.5. *Sistematika Penulisan*

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan:

- a. Metodologi Pengukuran Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud.

- d. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV: Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sesuai dengan visi gubernur dan wakil Gubernur, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Madani

Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Sejahtera

Sumatera Barat *Sejahtera* merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menetapkan 5 Misi sebagaimana tergambar pada grafik 5.

Grafik 5 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Sumber data: RPJMD Prov Sumbar 2016-2021

Berdasarkan visi dan misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD tahun 2016-2021 disempurnakan berdasarkan kerangka berpikir logis (*Cascading Kinerja*) yang ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang penetapan hasil rekomendasi tim penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: “TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.	1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
		1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya
				1.2.2	Meningkatnya implementasi Adat Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.	2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
				2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien
				2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
				3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
				4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi
				4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor
				4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
				5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan

MISI		TUJUAN		SASARAN	
				5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air
				5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat
		5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
				5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
				5.3.1	Menurunnya risiko bencana

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen RPJMD tahun 2021-2026 dengan visi dan misi mengacu pada visi dan misi gubernur terpilih. Dalam RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai 7 (tujuh) Misi, 7 (tujuh) Tujuan dengan 27 (dua puluh tujuh) sasaran. Penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah dilakukan melalui proses membangun pohon kinerja terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada bulan Maret 2021. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyusun dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Beberapa Indikator Kinerja Utama tahun 2016-2021 juga ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun hal-hal yang dirubah meliputi:

- a. Perubahan target pada beberapa indikator tahun 2021. Indikator yang diubah targetnya adalah indikator yang juga ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagai Indikator Kinerja Utama.

Sehingga target indikator tersebut mengacu pada target kondisi awal RPJMD tahun 2021-2026.

- b. Perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah *refocusing* dan anggaran perubahan.

Perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Perubahan Perjanjian Kinerja

PROVINSI : SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".			
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	73,4	Satpol PP, B. Kesbangpol
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1 Indeks Kerukunan	73,4	Satpol PP, B. Kesbangpol
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional	63	Dinas Kebudayaan
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional	63	D. Kebudayaan
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL			
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	67,5	OPD terkait 8 Area Perubahan
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2.1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (76,50)	Biro Organisasi,
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	71	B. Kepegawaian Daerah
		2.1.2.2 Indeks e-Government	3,1	D. Kominfo dan Statistik

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1 Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,00	Biro Organisasi
MISI 3 MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI				
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,56	Lintas PD
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1 Harapan lama sekolah	14,04	D. Pendidikan
		3.1.1.2 Rata-rata lama sekolah	9,09	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1 Angka Harapan Hidup	69,62	D. Kesehatan dan RSUD
MISI 4 MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH				
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,44	Lintas PD
		Indeks Gini	0,299	Lintas PD
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1 Jumlah Pendapatan perkapita (Rp.Juta)	46,09	Lintas PD
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	6	D. Penanaman Modal dan PTSP
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1 Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1393,13	D. Perindag
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1 Tingkat Kemiskinan	6,4	Lintas PD
		4.1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,7	Lintas PD
MISI 5 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN				
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rasio Elektrifikasi	99,30	D. ESDM
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi	5.1.2.1 Rasio Elektrifikasi	99,30	D. ESDM

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
5.1.3	Ketenagalistrikan Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	61,94	D. PSDA dan Bina Konstruksi
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54,68	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,05	D. Lingkungan Hidup	
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	76,8	D. Lingkungan Hidup
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90,39	
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	66,3	D. Kehutanan
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	BPBD

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	9.459.981.252	
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.628.321.139	Satpol PP
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.050.120.050	B. Kesbangpol
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.456.773.497	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	78.780.000	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	851.689.200	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	394.297.366	
B	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	13.124.505.442	
1	Program Pengembangan Kebudayaan	8.041.420.393	D. Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.344.630.125	
3	Program Pembinaan Sejarah	610.154.903	
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	353.674.216	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
5	Program Pengelolaan Permuseuman	1.774.625.805	
C	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel	1.149.363.788.719	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.121.259.796.917	B. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.714.291.827	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	552.567.759	Setda
4	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.388.170.068	
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.549.446.189	Bappeda
6	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.917.313.693	
7	Program Penataan Organisasi	2.281.074.550	Setda
8	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.690.714.721	
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.189.151.260	Inspektorat Daerah
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	821.261.735	
D	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	41.365.440.492	
1	Program Kepegawaian Daerah	5.716.219.719	BKD
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.809.791.510	B. PSDM
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11.242.744.534	D. Kominfotik
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17.371.533.607	
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	515.329.460	
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	709.821.662	
E	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	63.770.724.612	
1	Program Pendaftaran Penduduk	863.067.319	D. Kependudukan dan Capil
2	Program Pencatatan Sipil	458.507.100	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	674.865.521	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	237.333.000	
5	Program Pelayanan Penghubung	2.568.755.425	B. Penghubung
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.037.991.217	B. Litbang
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	54.930.205.030	Sek. DPRD
F	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	715.027.381.777	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	710.988.586.175	D. Pendidikan
2	Program Pengembangan Kurikulum	367.224.900	
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.598.849.800	
4	Program Pembinaan Perpustakaan	953.629.202	D. Kearsipan dan Perpustakaan
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	119.091.700	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
G	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	271.598.665.978	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	204.060.976.007	D. Kesehatan, 4 RSUD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	536.431.700	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	91.636.871	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.882.635.384	
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	13.192.096.400	D. Pangan
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.937.985.793	
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	3.279.354.600	
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.426.631.800	D. Pemuda dan Olahraga
9	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	37.598.221.675	
10	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000	
11	Program Pengendalian Penduduk	72.664.500	D. Kependudukan dan Capil
12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	60.225.000	
13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	97.325.000	
14	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.903.583.200	D. PPPA Pengendalian Penduduk dan KB
15	Program Perlindungan Perempuan	784.742.398	
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	177.620.450	
17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	43.253.550	
18	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	194.037.400	
19	Program Perlindungan Khusus Anak	759.244.250	
H	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	236.736.880.047	
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	212.603.477	D. Koperasi UKM
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	499.435.400	
3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	1.029.819.300	
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	6.354.969.005	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3.794.733.450	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	797.285.150	
7	Program Pengembangan UMKM	2.105.997.850	
8	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	4.815.131.757	D. Kelautan dan Perikanan
9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	25.390.359.182	
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.703.750.620	
11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.055.181.325	
12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.381.459.311	
13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.951.763.702	D. Pariwisata
14	Program Pemasaran Pariwisata	11.212.656.427	
15	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	857.692.575	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
16	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.996.628.785	
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	60.844.829.310	D. Perkebunan, TPH
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.270.273.483	
19	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	677.866.994	
20	Program Perizinan Usaha Pertanian	61.085.715	
21	Program Penyuluhan Pertanian	4.325.292.438	
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	60.510.367.226	D. Peternakan dan Keswan
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.118.682.207	
24	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.050.661.490	
25	Program Penyuluhan Pertanian	605.046.510	
26	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	112.377.800	D. Perindustrian dan Perdagangan
27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.145.057.515	
28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	673.163.000	
29	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	3.046.189.426	
30	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	527.054.178	
31	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.411.213.139	
32	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	121.763.850	
33	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	76.488.450	
I	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	4.988.666.986	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	581.772.675	D. PMPTSP
2	Program Promosi Penanaman Modal	632.068.000	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.874.240.186	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	821.100.375	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	79.485.750	
J	Meningkatnya Nilai Ekspor	18.055.800	
1	Program Pengembangan Ekspor	18.055.800	D. Perindag
K	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	62.657.512.063	
1	Program Pemberdayaan Sosial	6.979.202.515	D. Sosial
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.691.100	
3	Program Rehabilitasi Sosial	25.373.065.696	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	774.248.510	
5	Program Penanganan Bencana	321.894.400	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	44.159.000	
7	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.173.343.050	D. Pemberdayaan
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.448.435.315	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	7.622.420.034	Masyarakat Desa
10	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	22.282.000	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	218.048.875	
12	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	146.782.000	
13	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.136.692.168	
14	Program Penempatan Tenaga Kerja	680.456.100	
15	Program Hubungan Industrial	569.813.300	
16	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1.143.978.000	
L	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	396.073.381.384	
1	Program Penataan Bangunan Gedung	129.761.912.734	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.502.225.452	
3	Program Penyelenggaraan Jalan	258.384.680.911	
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.843.425.513	
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.564.285.380	D. Perhubungan
6	Program Pengelolaan Pelayaran	759.981.394	
7	Program Pengelolaan Perkeretaapian	256.870.000	
M	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur EKTL	7.534.424.829	
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.534.424.829	D.ESDM
N	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	152.458.517.921	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	150.835.084.319	D.PSDA
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.623.433.602	
O	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	62.875.814.831	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	510.019.900	D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.925.682.850	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	378.526.200	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.567.194.030	
5	Program Pengembangan Perumahan	516.928.116	D. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Program Kawasan Permukiman	259.072.600	
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	52.218.810.433	
8	Program Pengelolaan Izin Lokasi	32.220.625	
9	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	173.924.936	
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	68.846.974	
11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	73.260.723	
12	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	46.767.100	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
13	Program Penetapan Tanah Ulayat	20.093.544	
14	Program Pengelolaan Tanah Kosong	53.747.000	
15	Program Penatagunaan Tanah	30.719.800	
P	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	9.941.841.740	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	158.882.610	D. Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.449.609.180	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	72.288.500	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	89.194.500	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	867.710.750	
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	192.469.850	
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	110.095.600	
8	Program Pengelolaan Persampahan	5.001.590.750	
Q	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	30.207.707.274	
1	Program Pengelolaan Hutan	20.747.380.387	D. Kehutanan
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	439.274.500	
3	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	8.540.553.387	
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	480.499.000	
R	Menurunnya Risiko Bencana	17.924.124.097	
1	Program Penanggulangan Bencana	17.869.908.368	BPBD
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.215.729	Satpol PP
TOTAL ANGGARAN		3.245.127.415.244	

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja



Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

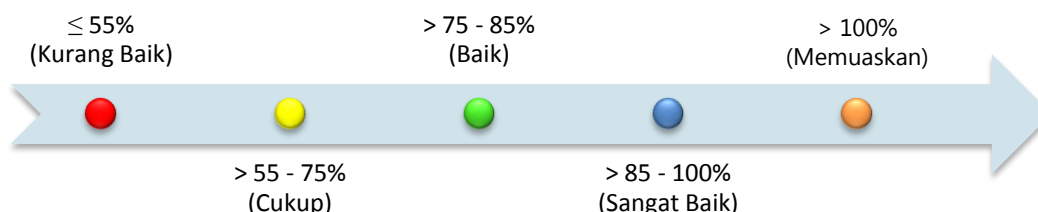
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menganalisis penyebab

keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:



3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 tergambar dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan tersebut selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat. Pencapaian 7 tujuan dan 18 sasaran dilihat dari capaian 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran diuraikan pada tabel 3.

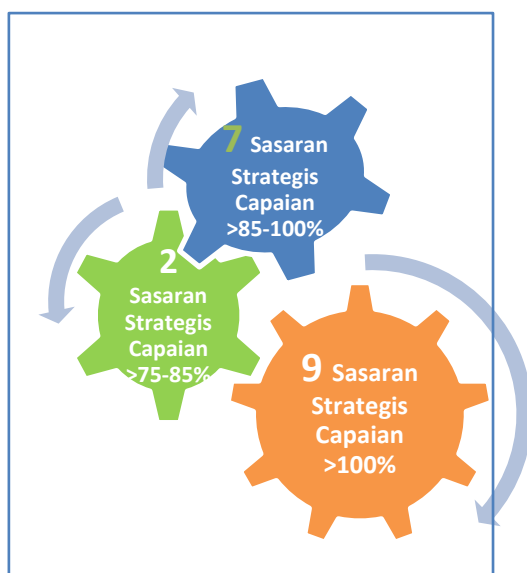
Tabel 3 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALI SASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".					
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan		73,4	67,87	92,47
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	73,4	67,87	92,47
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional		63	56	88,89
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional	63	56	88,89
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL					
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		67,5	66,87	99,07
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALI SASI	% CAPAIAN KINERJA
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (76,50)	BB (76,16)	99,56
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	71	49,31	69,45
		2.1.2.2	Indeks e-Government	3,1	2,69	86,77
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,00	88,33	105,15
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI					
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia		72,56	72,65	100,12
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,04	14,09	100,36
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	9,09	9,07	99,78
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,62	69,59	99,96
MISI 4	MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH					
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		3,44	3,29	95,64
		Indeks Gini		0,299	0,3	99,67
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan perkapita (Rp.Juta)	46,09	45,29	98,26
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	6	5,02	83,67
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1393,13	3066,93	220,15
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan	6,4	6,04	105,63
		4.1.4.2	Tingkat Pengangguran	6,7	6,52	102,69
MISI 5	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN					
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap		40	42	105,00
		Rasio Elektrifikasi		99,30	99,91	100,61
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	42	105,00
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	99,91	100,61

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALI SASI	% CAPAIAN KINERJA
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	61,94	64,93	104,82
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54,68	55,37	101,26
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		80,05	80,75	100,87
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	76,8	79	102,86
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90,39	90,22	99,81
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	66,3	66,24	99,91
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	71,03	94,71
RATA-RATA CAPAIAN						104,35

Grafik 6 Gambaran pencapaian indikator Kinerja Tahun 2021



Sumber data: Data diolah

Rata-rata capaian indikator kinerja 18 sasaran tahun 2021 adalah sebesar 104,35% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*. Pencapaian sasaran tersebut diukur dari pencapaian 23 indikator kinerja. Sasaran dengan pencapaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya nilai ekspor dengan capaian sebesar 220,15%, dan sasaran dengan capaian terendah adalah sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan capaian sebesar 78,11%. Gambaran pencapaian 18 sasaran tersebut disajikan pada grafik 6.

3.3. *Capaian Kinerja Tahun 2021*

Berikut ini akan diuraikan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021:

MISI 1

MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH "ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".

Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

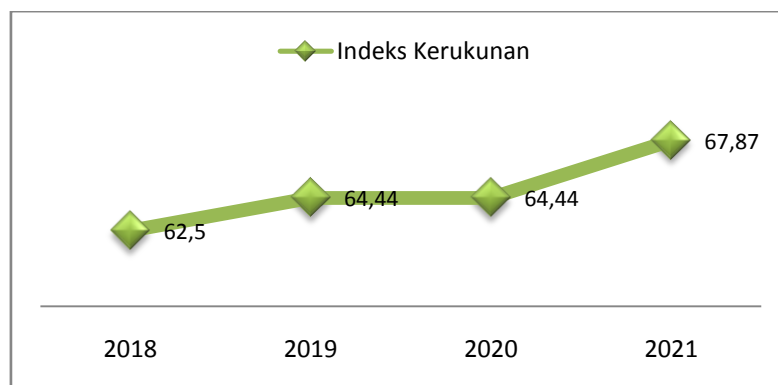
Tujuan pertama Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama**. Kehidupan beragama yang berkualitas dapat menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan damai. Kondisi tersebut dapat tercapai jika masyarakat hidup berdampingan dan saling bertoleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau memiliki komitmen beragama yang sangat tinggi dan relevan dengan Prioritas 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Kehidupan Masyarakat dan sangat menghargai perbedaan dan keragaman, sebagaimana adagium, "lamak di awak, katuju dek urang".

Budaya Minang mengandung nilai antara lain kebersamaan, persatuan, gotong royong, sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan, adanya kearifan lokal Kerapatan Adat Nagari (KAN), adanya pembauran seni dan budaya dengan masyarakat pendatang, serta peran proaktif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan, merupakan potensi bagi terciptanya kerukunan umat beragama.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama sebagai tujuan pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan Misi 1. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan indikator kinerja indeks kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Indeks kerukunan meliputi nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Perkembangan Indeks Kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021 digambarkan pada grafik 7.

Grafik 7 Indeks Kerukunan tahun 2018-2021 Provinsi Sumatera Barat



Sumber data: Kementerian Agama Tahun 2018-2021

Grafik di atas memberikan informasi sebagai berikut:

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 67,87. Skor nilai Indeks Kerukunan tahun 2021 ini lebih baik dari skor nilai Indeks Kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan 2019. Jika

dibandingkan dengan skor nilai di regional Sumatera yang meliputi 10 (sepuluh) Provinsi, skor nilai Indeks Kerukunan Provinsi Sumatera Barat di posisi ranking 8 (delapan) lebih baik dari Provinsi Riau (66,67) dan Provinsi Aceh (57,51).

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 67,87, masih berada di bawah rata-rata skor nilai Indeks Kerukunan Nasional dengan skor nilai 72,39.
3. Indeks Kerukunan di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun masih di bawah angka rata-rata nasional indeks kerukunan tahun 2021. Skor Indeks Kerukunan sebesar 67,87 masih tergolong tinggi karena berada di atas angka 60 yang termasuk kategori tinggi.

Untuk menyikapi nilai Indeks Kerukunan Provinsi Sumatera Barat agar meningkat setiap tahunnya, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya lebih meningkatkan koordinasi dan fasilitasnya agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Sumatera Barat yang lebih sesuai dengan karakter dan nilai ABS-SBK masyarakat di Sumatera Barat.

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama**, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran **Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama**. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:



Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Toleransi merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai, tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kerukunan antar umat beragama sebagai sasaran yang harus dicapai untuk menciptakan kehidupan beragama berkualitas yang diukur menggunakan indikator indeks kerukunan. Penetapan indeks kerukunan diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama dengan menggunakan indikator nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama.

Nilai indeks kerukunan tertinggi adalah 100 dengan kategori sangat rukun. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan target indeks kerukunan selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan mempertimbangkan nilai indeks kerukunan tahun 2017 sebesar 67, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan indeks kerukunan tercapai 73,4 (kategori rukun) di tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021. Penetapan target ini berdasarkan pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan juga mempertimbangkan indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 (64,44) sebelum dan setelah COVID-19. Pencapaian sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama tergambar pada tabel 4.

Tabel 4 Capaian Indikator Sasaran 1.1.1



Indeks kerukunan ditargetkan 73,4, realisasi 67,87 dengan tingkat capaian sebesar 92,47% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

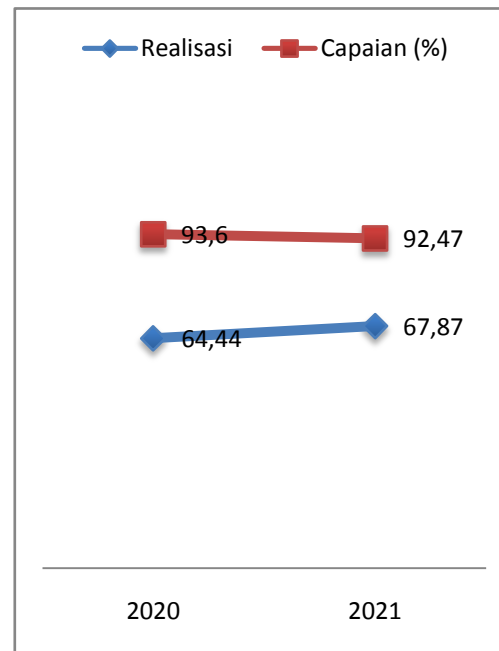
Realisasi indeks kerukunan tahun 2021 diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama. Indeks kerukunan sebesar 67,87 ini menunjukkan masyarakat Sumatera Barat berada pada **kategori hidup rukun** sebagaimana disajikan pada tabel kategori berikut ini:

Tabel 5 Kategori Indeks Kerukunan

No	Range Indeks	Level/Kategori
1	0 - 20	Sangat Tidak Rukun
2	21 - 40	Tidak Rukun
3	41 - 60	Rukun Tingkat Sedang
4	61 - 80	Rukun
5	81 - 100	Sangat Rukun

Perhitungan capaian indikator indeks kerukunan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator indeks kerukunan tahun 2021 yang tercapai 92,47% menunjukkan realisasi indeks kerukunan tahun 2021 ini masih di bawah target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian di tahun 2021 ini 1,13% lebih rendah. Sementara itu, indeks kerukunan tahun 2021 mengalami peningkatan 3,43% dari indeks kerukunan tahun 2020. Perbandingan realisasi dan capaian indeks kerukunan tahun 2020-2021 dapat dilihat pada grafik 8.

Grafik 8 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Kerukunan tahun 2020-2021



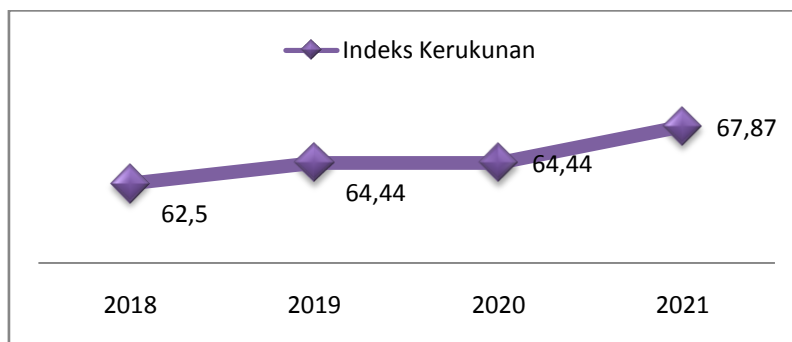
Sumber data: Data diolah

Indeks Kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2021 (3,43). Indeks kerukunan tahun 2020 sama dengan 2019 dikarenakan tidak adanya survei untuk mengetahui indeks kerukunan tahun 2020, sehingga yang dipakai adalah indeks kerukunan 2019. Walaupun indeks kerukunan dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan, tetapi indeks kerukunan tahun 2021 belum tercapai sesuai target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021.

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 menargetkan indeks kerukunan tercapai 73,4. Dengan Indeks kerukunan di tahun 2021 yang

tercapai 67,87, Pemerintah Sumatera Barat baru mencapai 92,47% target indeks kerukunan tersebut. Tidak tercapainya target tahun 2021 disebabkan beberapa indikator dari Indeks Kerukunan Umat Beragama masih membutuhkan penyesuaian dengan karakter serta nilai agama dan budaya Minangkabau. Perkembangan indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021 digambarkan pada grafik 9.

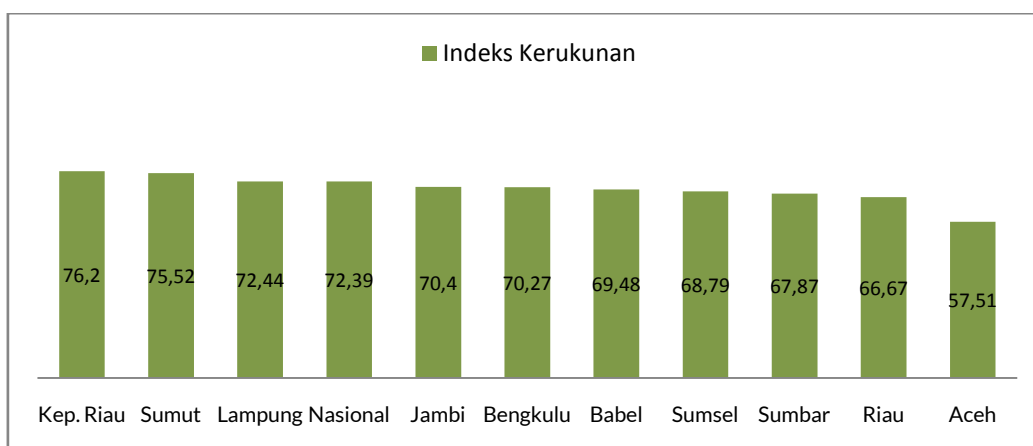
Grafik 9 Indeks Kerukunan tahun 2018-2021 Provinsi Sumatera Barat



Sumber data: Kementerian Agama Tahun 2018-2021

Untuk perbandingan dengan Nasional dan provinsi lain di Indonesia, nilai indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 berada pada posisi nomor 8 (delapan) untuk Regional Sumatera serta posisi nomor 29 (dua puluh sembilan) dari 34 provinsi di Indonesia, serta di bawah rata-rata nasional sebesar 72,39. Indeks Kerukunan Nasional dan 10 provinsi di Regional Sumatera tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 10.

Grafik 10 Indeks Kerukunan Provinsi di Indonesia Tahun 2021



Sumber data: Balitbang Kemenag Tahun 2021

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 untuk meningkatkan kerukunan umat beragama antara lain:

- a. Memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dari 19 (sembilan belas) kabupaten kota se Sumatera Barat, 2 (dua) kabupaten lagi yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar sedang dalam proses melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) pada tahun 2021 ini.
- b. Mendorong peran FKUB kabupaten-kota agar lebih aktif mensosialisasikan tentang kerukunan umat beragama.
- c. Pertemuan antar umat beragama secara berkala 4 kali selama satu tahun.
- d. Monitoring dan Rapat antar Umat Beragama dengan Kemenag kabupaten-kota, termasuk dengan FORKOMPINDA.
- e. Meningkatkan kesamaan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Perihal yang menjadi penghambat tingkat kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

- a. Masih adanya perbedaan pemahaman dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur-unsur terkait lainnya di daerah dalam memandang perlunya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga sulit untuk membentuk FKUB di dua kabupaten (Pesisir Selatan dan Tanah Datar);
- b. Masih rendahnya tingkat toleransi yang dibarengi dengan sikap saling menghargai, sikap yang pro kerukunan dalam sebagian masyarakat, karena tingkat fanatisme masyarakat Sumatera Barat masih tinggi terhadap agama yang dianutnya (contoh: masih banyak aliran-aliran yang berbeda-beda).
- c. Munculnya sikap fanatisme yang berlebihan di kalangan masyarakat disebabkan karena adanya kemajemukan sosial dalam masyarakat sehingga mereka senantiasa menganggap bahwa agama atau keyakinan yang mereka anut saja yang benar.

- d. Adanya peraturan yang berlaku di Sumatera Barat terkait Perda Syariah.
- e. Seiring tidak dilibatkannya kearifan lokal dalam kriteria penilaian suatu daerah sebagai cara menetapkan indeks kerukunan suatu daerah.
- f. Sumatera Barat dengan kearifan lokalnya berlandaskan Adat basandi syara', syara'basandi kitabullah yang memang kuat dengan syariah Islamnya, sehingga banyak tidak sesuai dengan variabel penilai indeks kerukunan.

Untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya pencegahan konflik bernuansa SARA di masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran dari tim dan forum-forum strategis dalam menangani permasalahan atau gangguan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan bentrokan dan kekerasan.
- c. Meningkatkan peran dari tokoh-tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan yang lainnya serta tokoh masyarakat setempat dalam mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 8 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **9.459.981.252,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1.1.1. dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.1.1

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	8	9.459.981.252	9.397.439.071
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	3.628.321.139	3.615.499.628
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	1.050.120.050	1.035.943.900
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	3.456.773.497	3.444.283.584
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	78.780.000	72.135.400
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1	851.689.200	836.630.176
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	394.297.366	392.946.383

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **9.459.981.252,-** terealisasi sebesar Rp. **9.397.439.071,-** atau 99,34%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 62.542.181 (0,66%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama (92,47%) lebih rendah 6,87% dari realisasi anggaran (99,34%).

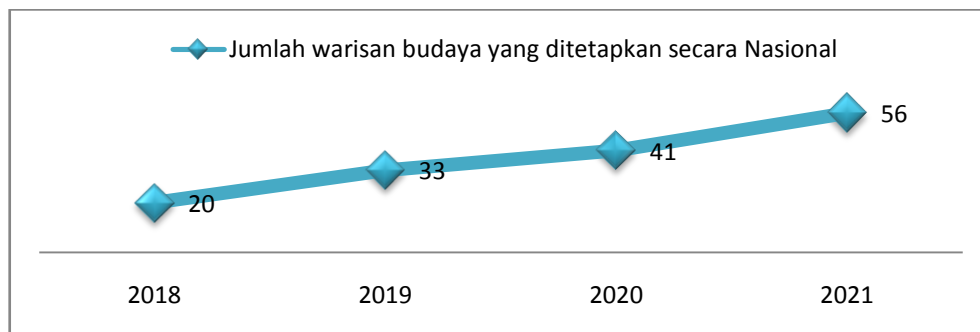
Tujuan 1.2

Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan menjadi keharusan untuk dilestarikan. Kekayaan budaya yang ada seperti bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya. Pelestarian budaya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk Pembangunan kebudayaan. Selain upaya pelestarian, pelaksanaan gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat juga harus dilakukan untuk pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Tujuan kedua Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 **Terpelihara dan Berkembangnya kebudayaan**, yang diukur dengan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional. Perkembangan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional dari tahun 2018-2021 digambarkan pada grafik 11.

Grafik 11 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional tahun 2018-2021



Sumber data: Dinas Kebudayaan

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa:

1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional sampai dengan tahun 2021 berjumlah 56 karya budaya, yang merupakan nilai capaian kumulatif sampai dengan tahun 2021 (jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional sampai dengan 2020 sebanyak 41 karya budaya dan bertambah 15

karya budaya tahun 2021 yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI).

2. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan (merekomendasikan) sebanyak 17 karya budaya untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak benda Indonesia (WBTBI) dan dari 17 karya budaya tersebut, hanya 15 karya budaya yang ditetapkan secara Nasional.

Untuk mencapai tujuan **Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan** telah ditetapkan 1 sasaran yaitu meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:



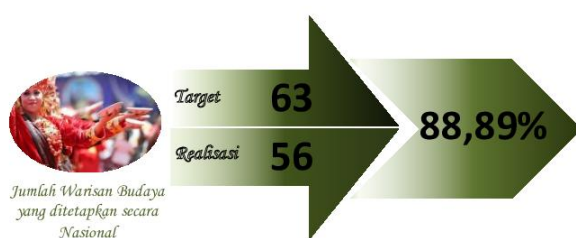
Sasaran 1.2.1 Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Kekayaan Budaya Sumatera Barat yang meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya perlu dilestarikan. Pelestarian kebudayaan merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam hal pembangunan kebudayaan. Dengan beranekaragamnya kebudayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan **meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya** sebagai sasaran yang harus diwujudkan untuk mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan. Ketercapaian sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional.

Warisan budaya terbagi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda (cagar budaya) terdiri dari warisan budaya bergerak, tidak bergerak dan bawah laut. Warisan budaya tak benda adalah berupa nilai-nilai (abstrak). Sebelum warisan budaya benda diusulkan untuk menjadi peringkat nasional maka terlebih dahulu harus dijadikan warisan budaya benda peringkat provinsi. Sedangkan warisan budaya tak benda cukup dalam bentuk rekomendasi saja.

Untuk tahun 2021, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan 63 warisan budaya. Target ini merupakan target akumulasi yang ditetapkan mengacu pada target tahun terakhir dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, target tahun 2021 ditetapkan bertambah sebanyak 22 warisan budaya. Pencapaian sasaran meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya diuraikan pada tabel 7.

Tabel 7 Capaian Indikator Sasaran 1.2.1



Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan 63, realisasi 56 dengan tingkat capaian sebesar 88,89% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah karya budaya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi jumlah warisan budaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 372/M/2021 tentang Penetapan Warisan Budaya Tak benda Indonesia tahun 2021. Selama tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 17 karya budaya yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Nasional, dan yang ditetapkan sebanyak 15 karya budaya (88,24%). Adapun warisan budaya Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2021 diuraikan pada tabel 8.

Tabel 8 Warisan Budaya Sumatera Barat yang Ditetapkan Secara Nasional sampai dengan Tahun 2021

No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
1	Randang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
2	Sistem Matrilineal	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
3	Tabuik	2013	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
4	Rumah Gadang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
5	Indang Piaman	2014	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
6	Kaba Cindua Mato	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera

No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
7	Ronggeng Pasaman	2014	Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai Kab. Pasaman dan Kab Pasaman Barat
8	Silek Minang	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
9	Songket Pandai Sikek	2014	Kab. Tanah Datar
10	Tari Toga	2014	Siguntur, Kab Dharmasraya
11	Tato Mentawai	2014	Kab Kepulauan Mentawai
12	Ulu Ambek	2015	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman
13	Rabab	2015	Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pariaman,
14	Selawat Dulang	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
15	Pasambahan	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
16	Batombe	2015	Kab. Solok Selatan
17	Tari Tandauk	2016	Lubuak Tarok Kab Sijunjung
18	Tari Piriang	2016	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
19	Randai	2017	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
20	Bahasa Tansi	2018	Kota Sawahlunto
21	Babiola	2019	Kab. Pesisir Selatan
22	Tari Benten	2019	Kab. Pesisir Selatan
23	Sikambang Manih	2019	Kab. Pesisir Selatan
24	Tari Kain	2019	Kab. Pesisir Selatan
25	Anak Balam	2019	Kab. Pesisir Selatan
26	Patang Balimau	2019	Kab. Pesisir Selatan
27	Badampiang	2019	Kab. Pesisir Selatan
28	Batatah	2019	Kab. Pasaman
29	Diki Pano	2019	Kab. Pasaman
30	Talempong Unggan	2019	Kab. Sijunjung
31	Sikerei	2019	Kab. Kepulauan Mentawai
32	Arak Bako	2019	Kota Solok
33	Songket Silungkang	2019	Kota Sawahlunto
34	Basafa	2020	Kota Pariaman
35	Marosok	2020	Sumatera Barat
36	Uma Silaoinan	2020	Kab. Kepulauan Mentawai
37	Tari Balanse Madam	2020	Kota Padang
38	Tradisi Mato, Sistem Bagi Hasil Rumah Makan Minang	2020	Sumatera Barat
39	Baju Kurung Basiba	2020	Sumatera Barat
40	Pacu Jawi	2020	Kab. Tanah Datar
41	Pacu Itiak	2020	Kota Payakumbuh
42	Khatam Qur'an Agam	2021	Kabupaten Agam
43	Tenun Kubang	2021	Kabupaten Limapuluh Kota
44	Gamad	2021	Kota Padang
45	Randang Paku Dharmasraya	2021	Kabupaten Dharmasraya
46	Talempong Pacik	2021	Kabupaten Tanah Datar/Sumatera Barat secara umum
47	Bansi	2021	Sumatera Barat secara umum
48	Gandang Tasa	2021	Kabupaten Padang Pariaman
49	Pupuik Sarunai	2021	Sumatera Barat secara umum
50	Saluang	2021	Kota Bukittinggi/ Sumatera Barat secara umum
51	Dadiah Nagari Aia Dingin	2021	Kabupaten Solok

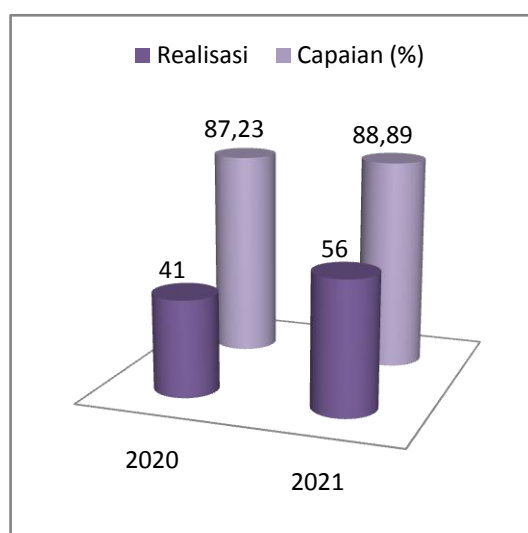
No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
52	Makan Bajamba Nagari Jawi-jawi	2021	Kabupaten Solok
53	Batik Tanah Liek Dharmasraya	2021	Kabupaten Dharmasraya
54	Malamang Padang Pariaman	2021	Kabupaten Padang Pariaman
55	Teh Talua Sumatera Barat	2021	Sumatera Barat secara umum
56	Kawa Daun Pariangan	2021	Kabupaten Tanah Datar

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Capaian indikator kinerja Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional sebesar 88,89% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian 88,99% menunjukkan realisasi tahun 2021 belum mencapai target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian tahun 2021 lebih tinggi 1,76%. Begitupun dengan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2021 (15 warisan budaya) juga lebih tinggi dari yang ditetapkan tahun 2020 (8 warisan budaya). Perbandingan realisasi dan capaian jumlah warisan

budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2020-2021 tergambar pada grafik 12.

Grafik 12 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional tahun 2020-2021

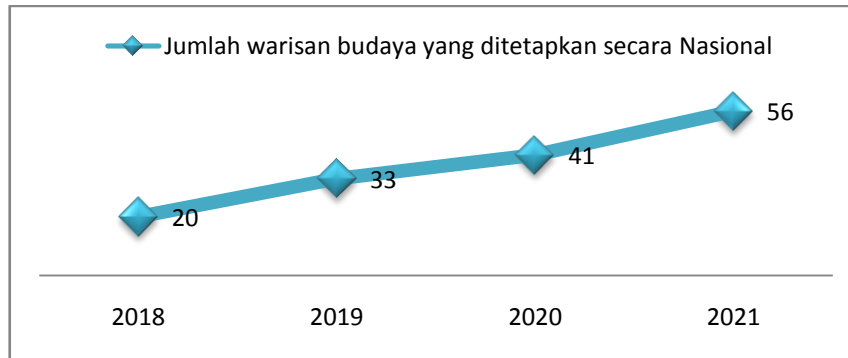


Sumber data: Data diolah

Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan dengan peningkatan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, telah terjadi penambahan 36 warisan budaya Sumatera Barat yang ditetapkan secara nasional di tahun 2021 ini. Walaupun terjadi peningkatan, dengan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional sampai tahun 2021 tercapai 56 warisan budaya, menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih belum bisa mencapai target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 (63 warisan budaya).

Perkembangan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2018-2021 (secara akumulatif) digambarkan pada grafik 13.

Grafik 13 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional tahun 2018-2021



Sumber data: Dinas Kebudayaan

Secara Nasional untuk tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Surat Keputusan Nomor 372/M/2021 Tentang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2021 menetapkan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) karya budaya tak benda yang direkomendasikan Tim Ahli Warisan Budaya Tak benda Indonesia tahun 2021 menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2021. Dari 289 karya budaya Warisan Budaya Tak Benda sebesar 5,19% berasal dari karya budaya tak benda Provinsi Sumatera Barat. Karya budaya tak benda yang di usulkan ke tingkat nasional sebanyak 17 karya budaya, dan yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda tahun 2021 sebanyak 15 karya budaya. Ada 2 yang ditangguhkan penetapannya, namun harus diusulkan kembali.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya antara lain:

- a. Monitoring dan evaluasi warisan budaya pada Kabupaten/Kota sekaligus meningkatkan koordinasi untuk mendorong Kabupaten/Kota untuk mengusulkan warisan budayanya untuk ditetapkan.
- b. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda dan tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
- c. Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum.

- d. Adanya supervisi oleh Tim Ahli yang berasal dari Akademisi.
- e. Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.
- f. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.

Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Sumatera Barat masih menemui hambatan, antara lain:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia Pamong Budaya.
- b. Belum jelas/detailnya aturan terkait pelestarian kebudayaan.
- c. Masih belum memadainya inventarisasi data kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Pola pembangunan kebudayaan yang lebih mendahulukan pariwisata tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya daerahnya.
- e. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.
- f. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.
- g. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya.

Upaya pelestarian nilai-nilai budaya di masa yang akan datang antara lain:

- a. Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia.
- b. Memberikan edukasi terhadap pentingnya nilai-nilai budaya dan filosofi nilai-nilai budaya dalam bentuk Bimtek, rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait kebudayaan.
- c. Internalisasi nilai-nilai Budaya dalam Kurikulum Pendidikan.
- d. Menggunakan atribut/warisan budaya Sumatera Barat pada event-event nasional dan lokal.
- e. Mengoptimalkan inventarisir aset-aset budaya.
- f. Menyusun Road Map Pemajuan Kebudayaan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 8 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp.13.124.505.442,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1.2.1. dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.2.1

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	8	13.124.505.442	12.459.330.114
1	Program Pengembangan Kebudayaan	3	8.041.420.393	7.515.346.029
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	2.344.630.125	2.255.517.868
3	Program Pembinaan Sejarah	1	610.154.903	602.588.182
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2	353.674.216	316.779.151
5	Program Pengelolaan Permuseuman	1	1.774.625.805	1.769.098.884

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **13.124.505.442,-** terealisasi sebesar Rp. **12.459.330.114,-** atau 94,93%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 665.175.328 (5,07%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya (88,89%) lebih rendah 6,04% dari realisasi anggaran (94,93%).

MISI 2 MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL

Tujuan 2.1 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah tindakan untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas, profesionalisme dalam birokrasi sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang diikuti dengan perbaikan akuntabilitas kinerja. Birokrasi diharapkan memiliki pola pikir dan budaya kerja yang produktif, efisien dan efektif. Untuk mencapai harapan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, dengan visi Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”, telah menjadikan **Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional** sebagai salah satu misi dengan tujuan *meningkatkan penerapan reformasi birokrasi* yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

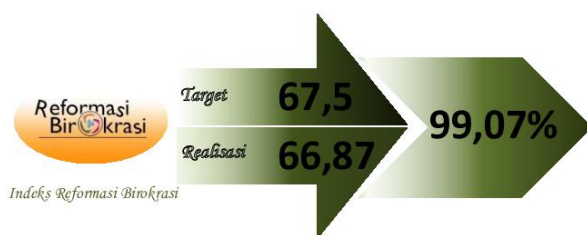
Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan dorongan adanya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Memenuhi amanat peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada tahun 2011 dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015, dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 065 Tahun 2016, yang direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 065 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021.

Penilaian reformasi birokrasi dilakukan 2 tahap yaitu:

1. **Tahap Pertama**, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), adalah Model Penilaian Mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah sendiri beserta unit kerja di dalamnya. Penilaian PMPRB meliputi penilaian pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, meliputi delapan area perubahan. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit, meliputi tiga hal yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta pelayanan publik.
2. **Tahap Kedua** adalah proses verifikasi PMPRB juga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Untuk tahun 2021 Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan tercapai 67,5 dengan predikat B. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya, target tahun 2021 ditetapkan meningkat sebesar 0,63. Pencapaian tujuan meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi tergambar pada tabel 10.

Tabel 10 Capaian Indikator Tujuan 2.1



Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 67,5, realisasi 66,87% dengan tingkat capaian sebesar 99,07% termasuk kategori *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 diukur berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/121/M.RB.06/2021 tentang hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 (n-1). Indeks Reformasi Birokrasi 66,87 termasuk kategori B (Cukup Baik). Penilaian indek reformasi birokrasi mulai tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 11.

Tabel 11 Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021
A	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	12,76
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,64
3	Reform	30,00	19,23
Total Komponen Pengungkit		60,00	38,63
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,31
2	Kualitas Layanan Publik	10,00	7,78
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,18
4	Kinerja Organisasi	10,00	3,97
Total Komponen Hasil		40,00	28,24
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	66,87

Sumber data: KemenPAN dan RB

Komponen pengungkit dilihat dari unsur pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform. Pemenuhan yang dinilai adalah pemenuhan dari 8 area perubahan (manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik). Hasil antara merupakan penilaian dari kementerian dan lembaga lainnya yang mempengaruhi reformasi birokrasi. Rincian hasil antara disajikan pada tabel 12.

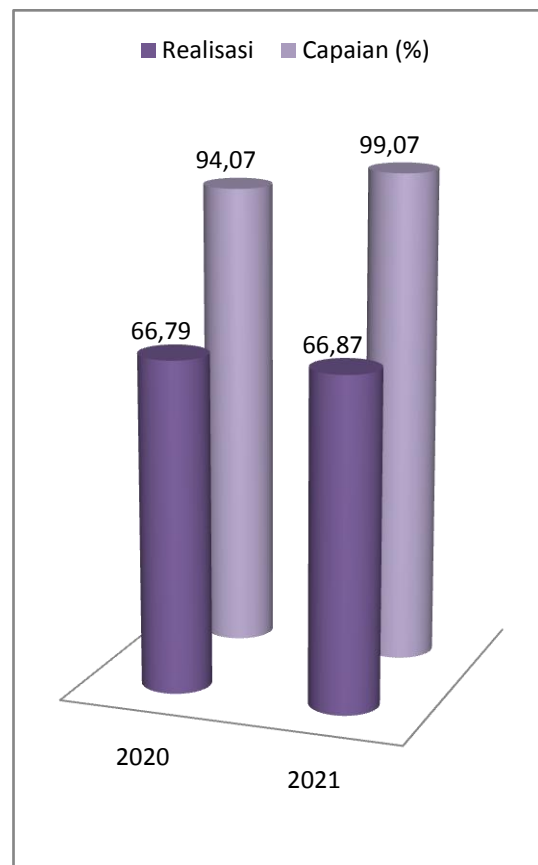
Tabel 12 Rincian Hasil Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Merit System	0-400	270 (Baik)	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Profesionalitas ASN	0-100	76 (Sedang)	Badan Kepegawaian Negara
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	60 (Cukup)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	75,11 (Sangat Baik)	Arsip Nasional Republik Indonesia
5.	Maturitas SPIP	0-5	3 (terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Kapasitas APIP	0-5	3 (terintegrasi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Sumber data: KemenPAN dan RB

Perhitungan capaian indikator indeks reformasi birokrasi menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2021 belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini ditunjukkan dari capaian indeks reformasi birokrasi <100%. Indeks reformasi birokrasi tahun 2021 mengalami peningkatan 0,08 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2020. Peningkatan 0,08 tersebut berasal dari peningkatan nilai pada komponen pengungkit yang terdiri dari unsur pemenuhan, hasil antara dan reform. Perbandingan realisasi dan capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2021 tergambar pada grafik 14.

Grafik 14 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021

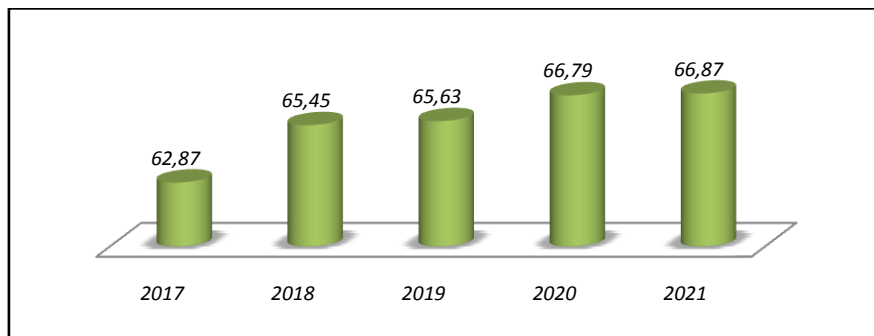


Sumber data: Data diolah

Penerapan Reformasi Birokrasi selama kurang lebih dua periode belum memberi hasil yang optimal, meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

dan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021) implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori Cukup Baik (B), yang secara absolut terjadi peningkatan sebesar 4 poin dari tahun 2017 ke tahun 2021. Gambaran perkembangan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 digambarkan pada grafik 15.

Grafik 15 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021



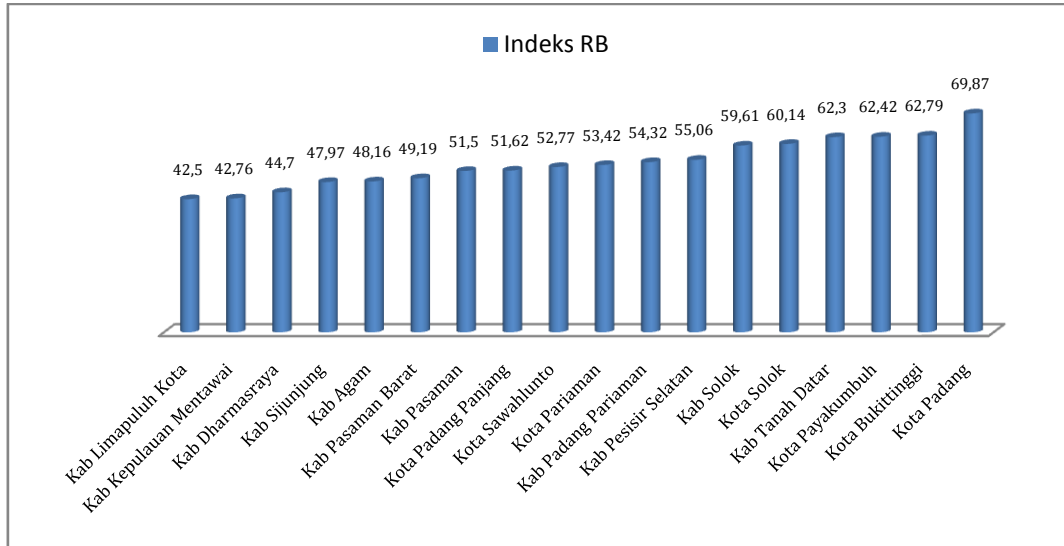
Sumber data: Kementerian PAN dan RB (2017-2021)

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 menargetkan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 67,5. Walaupun terus mengalami peningkatan, realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2021 yang tercapai 66,87 menunjukkan target tahun terakhir RPJMD ini belum sesuai dengan yang direncanakan atau baru tercapai 99,07%.

Implementasi reformasi birokrasi pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat juga dilihat dari Indeks reformasi birokrasi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021, masih ada 1 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan penilaian mandiri terhadap PMPRB yaitu Kabupaten Solok Selatan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dimana ada 6 kabupaten (Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung) yang belum melaksanakan PMPRB. Dari 18 Kabupaten/Kota yang dinilai implementasi reformasi birokrasinya baru 5 Kabupaten/Kota yang berpredikat “Cukup Baik”, 7 berpredikat “Cukup” dan 6 berpredikat “Buruk”. Hasil Evaluasi Reformasi

Birokrasi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2021 (berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020) disajikan pada grafik 16.

Grafik 16 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: Data dari Kabupaten/Kota

Perbandingan indeks reformasi birokrasi dengan provinsi lain jika dilihat dari hasil evaluasi tahun 2020, satu Provinsi memperoleh predikat A (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), 4 Provinsi yang memperoleh predikat BB (Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur). Selebihnya memperoleh predikat B dan CC, termasuk Provinsi Sumatera Barat memperoleh predikat B dengan nilai 66,87.

Penerapan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh upaya berikut ini:

- a. Mereviu Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam merumuskan kerangka kerja Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026.
- b. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi periode ketiga tahun 2021-2026 yang lebih implementatif dibandingkan dengan road map periode sebelumnya.
- c. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Untuk tahun pertama penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan sebagian jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.

- d. Menyusun Peta Proses Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-421-2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Membangun aplikasi untuk tambahan penghasilan pegawai yang akan terintegrasi dengan aplikasi kinerja dan absensi *online* (sudah dapat diimplementasikan tahun 2021).
- f. Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sudah disusun tetapi akan ada perbaikan seiring dengan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
- g. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 sudah dirumuskan dengan menggunakan kerangka berfikir logis (*logical framework*). Tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah sudah diukur dengan indikator SMART.
- h. Seluruh Perangkat Daerah telah membuat rencana strategis 2021-2026 dengan mempedomani RPJMD 2021-2026, yang diawali dengan membangun kinerja yang selaras antara OPD dengan RPJMD.
- i. Aplikasi e-SAKIP dibangun kembali sudah dapat digunakan, dan diimplementasikan sebagai alat pengawasan internal perangkat daerah.
- j. Melakukan pembinaan, monev, evaluasi dan penilaian Unit Kerja yang ditetapkan sebagai *pilot project* ZI WBK/WBBM dan mengusulkan ke TPN Kemenpan RB.
- k. Mengoptimalkan penerapan SPIP.
- l. Komitmen pemerintah Sumatera Barat agar ASN bekerja sesuai dengan kode etik kerja sesuai dengan Pergub Nomor 22 tahun 2019.

- m. Setiap ASN sudah memiliki perencanaan kerja individu yang jelas, dengan membuat perjanjian kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja individu, rencana aksi dan indikator kinerja individu.

Kelemahan/kendala yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

- a. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya melaksanakan reformasi birokrasi.
- b. Kesulitan merubah *mindset* aparatur yang masih ingin dilayani bukannya ingin melayani.
- c. Belum maksimalnya penerapan manajemen kinerja
- d. Masih rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran.

Untuk peningkatan implementasi reformasi birokrasi di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk peningkatan kualitas birokrasi. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara sebagai SDM pemerintah.

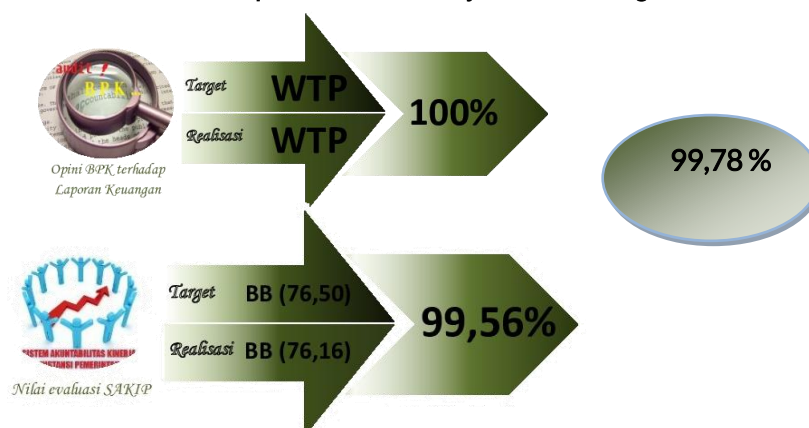
Untuk mencapai tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi telah ditetapkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 2.1.1 Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam bekerja dan dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju *good governance*. Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dengan sebaik-baiknya. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) dan inilah titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi. Untuk melihat apakah birokrasi yang bersih dan akuntabel sudah diterapkan di Provinsi Sumatera Barat, digunakan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan Nilai evaluasi SAKIP untuk mengetahui penerapan akuntabilitas kinerja di daerah. Pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel disajikan pada tabel 13.

Tabel 13 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1



Berdasarkan 2 indikator tersebut, sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel tercapai dengan sangat baik dengan rata-rata capaian 99,78%. Berikut diuraikan penjelasan masing-masing indikator:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini terhadap laporan keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Unsur yang menjadi penilaian BPK terhadap Opini Laporan keuangan adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan terdiri dari Opini Tidak Wajar (TW), Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Capaian opini WTP bagi Pemerintah Daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola keuangan yang baik. Capaian opini WTP merupakan salah satu kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan daerah dalam menerima dana insentif daerah.

Opini BPK terhadap laporan keuangan ditargetkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi opini BPK terhadap Laporan Keuangan didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor LHP BPK Nomor: 40.C/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh Opini WTP dari tahun 2013. Sementara itu, dari 19 Kabupaten/Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) terhadap LKPD 2020. Perolehan opini Kabupaten/Kota tahun 2020 ini mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan untuk LKPD 2019, semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Capaian indikator opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 tercapai 100% yang artinya realisasi tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Sementara itu realisasi tahun 2020-2021 menunjukkan perolehan yang sama yaitu opini WTP. Realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan di tahun 2021 yang tercapai WTP menunjukkan bahwa target indikator kinerja ini di tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Perolehan Opini WTP tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah dan semua OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap LKPD tahun 2020. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja, kas daerah, pembiayaan dan dana perimbangan antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bendahara Umum Daerah, Bank Nagari dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi angka aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Secara konsisten melaksanakan asistensi dan fasilitasi kepada semua OPD terkait penyusunan Laporan Keuangan
4. Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5. Update aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD).
6. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian masalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8. Melaksanakan pendampingan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan pemenuhan data pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik.
9. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun sebelumnya.

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
- b. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Upaya untuk mempertahankan Opini BPK di masa yang akan datang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan melalui Bimtek dan Sosialisasi.

- c. Memperkuat dukungan aplikasi yang terintegrasi dari penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.
- e. Mengevaluasi hasil rekomendasi BPK dan Audit Internal untuk memperbaiki kelemahan pengelolaan Keuangan Daerah kedepannya.
- f. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada SKPD terkait masalah-masalah yang ditemui dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, mengingat aplikasi keuangan daerah yang dicetus oleh pemerintah Pusat ini belum sepenuhnya optimal untuk dilaksanakan, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa tetap menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait hal ini demi menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Barat.
- g. Mengintegrasikan data yang ada pada SIRUP, SIPD, dan Simbangda.

Untuk mempertahankan opini WTP terhadap pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 Program. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **1.129.914.826.571,-**. Pelaksanaan 4 program tersebut sudah sesuai dan efektif mempertahankan opini WTP terhadap pengelolaan keuangan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung opini WTP terhadap pengelolaan keuangan dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung opini WTP

NO	INDIKATOR/ PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	11	1.129.914.826.571	1.087.979.491.108
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6	1.121.259.796.917	1.080.320.627.235
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	5.714.291.827	4.856.429.966
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	552.567.759	550.055.872
4	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	2.388.170.068	2.252.378.035

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **1.129.914.826.571,-** terealisasi sebesar Rp. **1.087.979.491.108,-** atau **96,29%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 41.935.335.463 (3,71%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,29%) dengan tingkat efisiensi 3,71%.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dapat diwujudkan jika Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan dengan benar. SAKIP juga merupakan pintu masuk untuk menuju birokrasi yang efektif dan efisien, karena hasil akhir dari penerapan SAKIP adalah efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akuntabilitas.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas

keuangan. Sistem Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat menargetkan Nilai Evaluasi SAKIP tercapai 76,50 (BB). Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator Nilai Evaluasi SAKIP masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating*(perhitungan kembali).

Nilai evaluasi SAKIP ditargetkan BB (76,50), terealisasi BB (76,16) dengan tingkat capaian 99,56% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*. Dikarenakan nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB sampai laporan ini dibuat maka realisasi nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 memakai realisasi tahun sebelumnya. Nilai evaluasi SAKIP 76,16 merupakan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/125/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021. Rincian nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 adalah sebagai berikut:

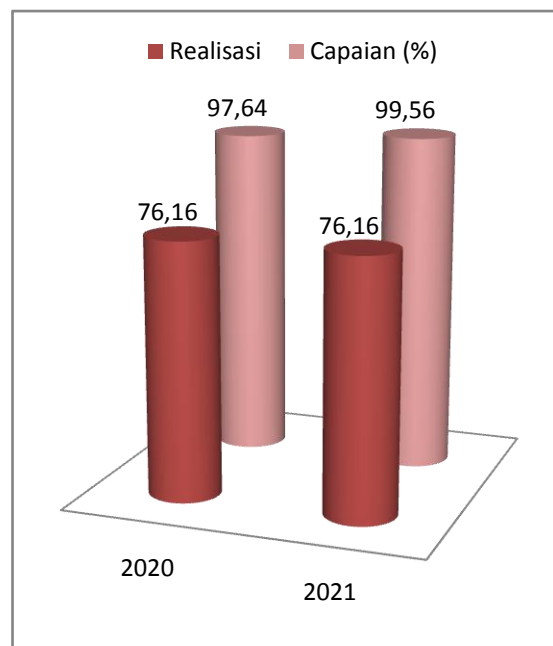
Tabel 15 Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	25	17,76
3	Pelaporan Kinerja	15	11,79
4	Evaluasi Internal	10	7,50
5	Capaian Kinerja	20	13,91
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,16
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Nilai Evaluasi SAKIP pemerintah daerah didukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2021, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor: 06/Insp-LHE/III-2021, tanggal 30 Maret 2021, dari 50 OPD yang di evaluasi tahun 2021 ada 6 OPD yang memperoleh nilai SAKIP A (12%), 25 OPD bernilai SAKIP BB (50%), 18 OPD bernilai SAKIP B (36%) dan 1 OPD bernilai CC (2%).

Capaian indikator nilai evaluasi SAKIP diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian sebesar 99,56% menunjukkan realisasi indikator ini tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, yang juga tercapai di bawah target, capaian indikator ini di tahun 2021 lebih tinggi 1,92%. Untuk realisasi tidak mengalami peningkatan karena yang digunakan dalam laporan ini masih nilai evaluasi SAKIP tahun 2020. Perbandingan realisasi dan capaian indikator nilai evaluasi SAKIP tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 17.

Grafik 17 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020-2021

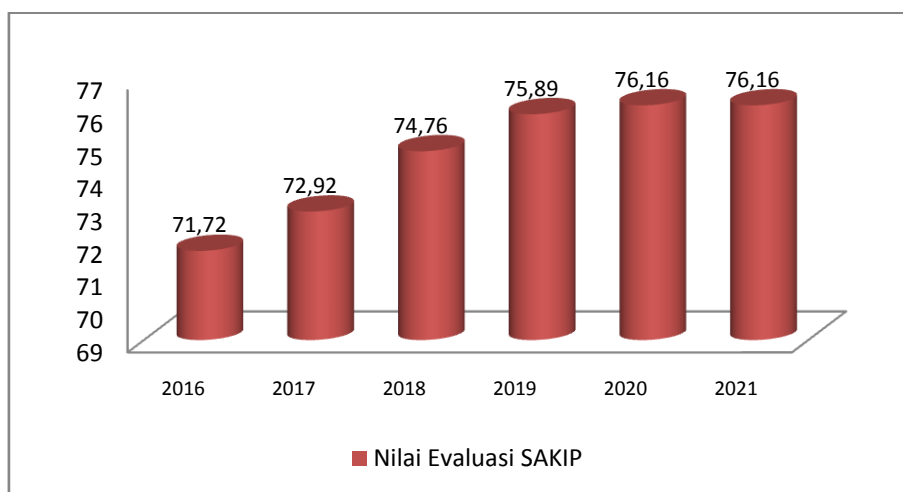


Sumber data: Data diolah

Sejak tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh nilai hasil SAKIP kategori sangat baik (BB). Sampai tahun 2020, nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bertahan pada kategori BB dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan nilai evaluasi SAKIP 2016 (71,72), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil meningkatkan nilai sebanyak 4,44 poin selama 5 tahun terakhir.

Walaupun terus mengalami peningkatan, target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 belum tercapai sesuai harapan. Hal ini dikarenakan, tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 menargetkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa mencapai 76,50. Sementara itu, realisasi nilai evaluasi SAKIP di tahun 2021 tercapai 76,16 atau baru mencapai 99,56% dari yang ditargetkan (76,50). Perkembangan nilai SAKIP dari tahun 2016 -2021 dapat dilihat pada grafik 18.

Grafik 18 Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2016-2021



Sumber data: Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB 2016-2021

Untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebanyak 3 Kabupaten/Kota memperoleh nilai BB (15,79%), 14 Kabupaten/Kota memperoleh nilai B dan 2 Kabupaten/Kota masih bernilai CC. Gambaran nilai evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat diuraikan pada tabel 16.

Tabel 16 Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Predikat Nilai
1	Kota Payakumbuh	BB
2	Kota Padang	BB
3	Kota Bukittinggi	BB
4	Kota Padang Panjang	B
5	Kota Sawahlunto	B
6	Kabupaten Kepulauan Mentawai	B
7	Kabupaten Dharmasraya	B
8	Kabupaten Solok	B
9	Kabupaten Pesisir Selatan	B
10	Kabupaten Tanah Datar	B
11	Kabupaten Agam	B
12	Kota Solok	B
13	Kabupaten Padang Pariaman	B
14	Kabupaten Pasaman	B
15	Kabupaten Sijunjung	B
16	Kabupaten Pasaman Barat	B
17	Kabupaten Solok Selatan	CC
18	Kabupaten Limapuluh Kota	B
19	Kota Pariaman	CC

Sumber data: Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 9 Provinsi yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja predikat BB. Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya Provinsi yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja AA, 3 Pemerintah Provinsi memperoleh predikat A (Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) dan 9 Provinsi termasuk Provinsi Sumatera Barat memperoleh predikat BB (Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan).

Dalam acara sosialisasi percepatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat pada bulan November 2021, dengan narasumber Bapak Ronald Andrea Annas menuntut seluruh perangkat daerah agar dapat mewujudkan kenaikan nilai SAKIP Pemerintah Daerah tahun 2023 menjadi A. Tuntutan ini diikuti dengan Rapat pembentukan TIM SAKIP tingkat Pemerintah Daerah yang beranggotakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Biro organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika yang dipimpin oleh Asisten Administrasi

Umum. Bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menggunakan kerangka berfikir logis (*logical framework*) yang tergambar dalam diagram pohon kinerja agar tujuan, sasaran serta indikator kinerja berkualitas dan tepat. Pohon Kinerja tersebut dikembangkan sampai kondisi program/sub kegiatan.
- b. Membangun keselarasan kinerja perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD dimana tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kepala OPD juga sudah dirumuskan mengacu pada pohon kinerja Pemerintah Daerah
- c. Pembinaan SAKIP perangkat daerah melalui Bimtek dan sosialisasi
- d. Secara konsisten melaksanakan asistensi dan verifikasi terhadap seluruh dokumen SAKIP perangkat daerah dan melakukan monitoring perkembangan kinerja perangkat daerah secara kontiniu.
- e. Pengembangan aplikasi *e-sakip* sesuai dengan kebutuhan akuntabilitas kinerja

Hambatan yang masih dihadapi untuk meningkatkan implementasi SAKIP di tahun 2021 adalah:

- a. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.
- b. Penerapan SAKIP ke level individu masih belum optimal.
- c. Keterbatasan sumber daya membuat gebrakan perubahan menuju SAKIP lebih baik
- d. Perubahan kebijakan yang cepat membuat kinerja menjadi lamban, contoh penerapan manajemen kinerja yang melibatkan lebih dari satu kementerian dan lembaga .
- e. Benturan kebijakan yang berdampak pada kurang optimalnya penerapan SAKIP.

Untuk peningkatan akuntabilitas kinerja kedepannya akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan komitmen pimpinan dalam penerapan SAKIP.
2. Membangun kolaborasi kinerja antar perangkat daerah untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.
3. Menerapkan manajemen kinerja individu berdasarkan kinerja organisasi.
4. Penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan pohon kinerja yang telah dirumuskan.

Untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program dengan 15 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp.19.448.962.148,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai peningkatan nilai evaluasi SAKIP. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP

NO	INDIKATOR/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Nilai Evaluasi SAKIP		15	19.448.962.148	18.689.918.118
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3	2.549.446.189	2.533.415.648
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	6.917.313.693	6.517.840.470
3	Program Penataan Organisasi	2	2.281.074.550	2.261.906.700
4	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	2.690.714.721	2.603.726.344
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2	4.189.151.260	3.985.376.391
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2	821.261.735	787.652.565

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 19.448.962.148,- terealisasi sebesar Rp. 18.689.918.118,- atau **96,10%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 759.044.030 (3,9%). Jika

membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP (99,56%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,10%) dengan tingkat efisiensi 3,46%.

Sasaran 2.1.2 Meningkatkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Birokrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam hal melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan agenda pemerintahan. Birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan kondisi dimana birokrasi (pemerintahan) yang mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan birokrasi efektif dan efisien perlu kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan cepat tanggap, ASN yang profesional yang didukung oleh sistem dan proses bisnis yang tepat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan **Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien** sebagai salah satu sasaran yang harus diwujudkan untuk mencapai tujuan Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien digunakan 2 indikator yaitu indikator indeks profesionalitas ASN dan Indeks *e-government*. Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel 18.

Tabel 18 Capaian indikator kinerja sasaran 2.1.2



Berdasarkan capaian 2 indikator tersebut, sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien tercapai dengan kategori keberhasilan Baik dengan rata-rata capaian 78,11%. Berikut diuraikan penjelasan masing-masing indikator:

1. Indeks Profesionalitas ASN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar Aparatur Sipil Negara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Profesional dapat didefinisikan sebagai kualitas, sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki suatu profesi untuk dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Tingkat Profesionalitas ASN dapat diukur melalui Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dilakukan dengan mempedomani Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan indikator kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 ditargetkan 71. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator Indeks Profesionalitas ASN masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai Indeks Profesionalitas ASN yang lebih tinggi 17,25 dari Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 di tahun 2021.

IP ASN target 71, terealisasi 49,31 dengan tingkat capaian 69,45% termasuk kategori keberhasilan Cukup.

Realisasi IP ASN diukur berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara per 5 Januari 2022 (kondisi pegawai yang dinilai 17.459 orang) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

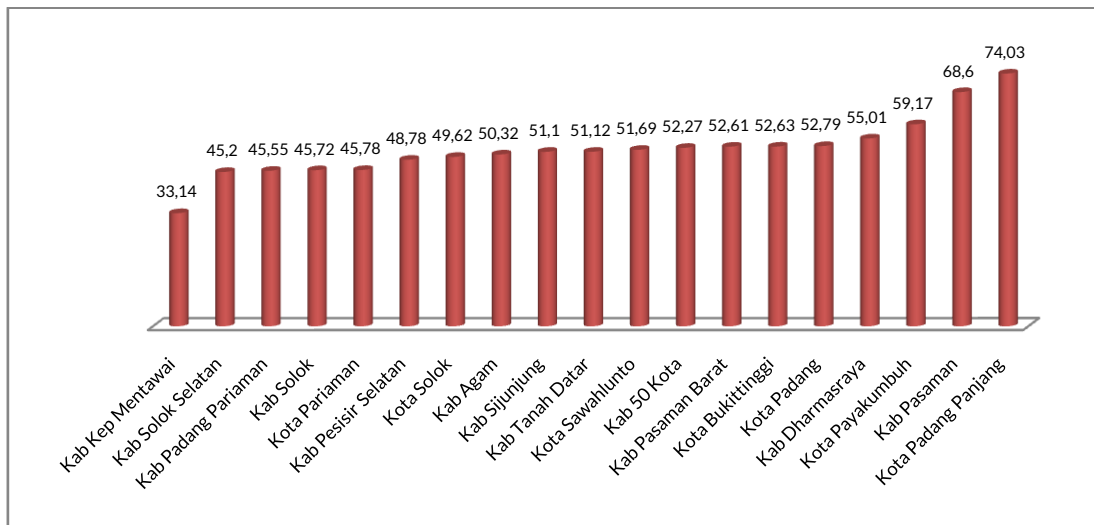
No	Indikator Pengukuran	Data yang digunakan	Bobot (%)	Nilai
1	Kualifikasi	Data pendidikan formal terakhir	25	14,18
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi	40	11,25
3	Kinerja	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30	18,89
4	Kedisiplinan	Data/informasi hukuman disiplin	5	5
TOTAL			100	49,31

Berdasarkan kategori nilai, IP ASN Provinsi Sumatera Barat sebesar 49,31 berada pada kategori sangat rendah (<60). Indeks Profesionalitas ASN 49,31 menunjukkan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori tidak profesional.

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
≤60	Sangat Rendah

IP ASN pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada umumnya berada pada kategori Sangat Rendah. Hanya 1 Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang Panjang yang berkategori Sedang dan 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman yang berkategori Rendah, sisanya sebanyak 17 Kabupaten/Kota berkategori Sangat Rendah. IP ASN masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 19.

Grafik 19 IP ASN Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kondisi 5 Januari 2022



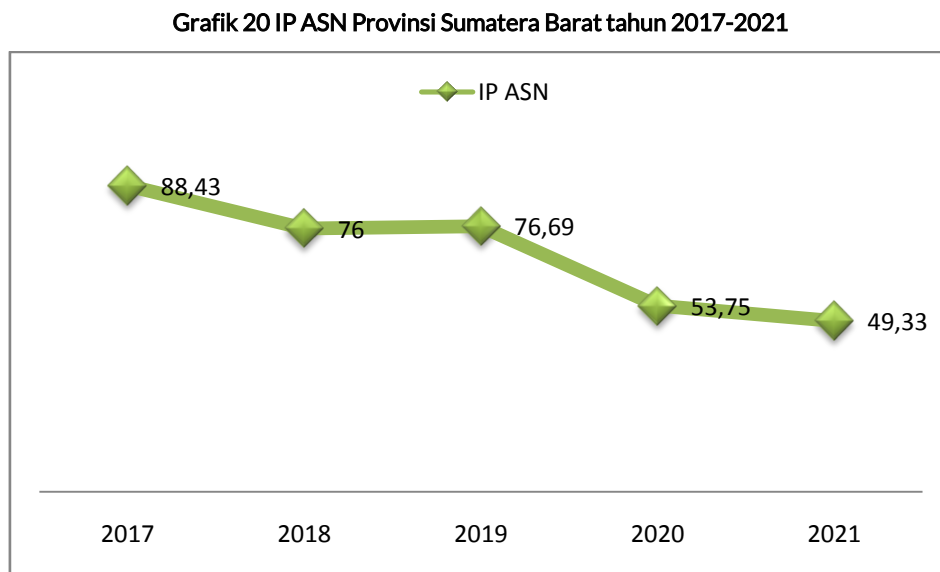
Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Capaian indikator kinerja IP ASN sebesar 69,45% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*. Dengan capaian sebesar 69,45% berarti realisasi IP ASN tahun 2021 masih jauh di bawah target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian indikator ini di tahun 2020, capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 30,07%. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi tahun 2021 yang juga menunjukkan penurunan sebanyak 4,42 poin dibandingkan dengan IP ASN tahun sebelumnya. Pengukuran IP ASN tahun 2021 dilakukan pada 17.459 ASN. Hal ini lebih rendah dibandingkan pengukuran IP ASN Tahun 2020 dengan peserta 18.374 ASN.

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 menargetkan IP ASN dapat mencapai angka 71. Akan tetapi, realisasi IP ASN tahun 2021 yang tercapai 49,31 berarti target tahun terakhir RPJMD 2016-2021 belum tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.

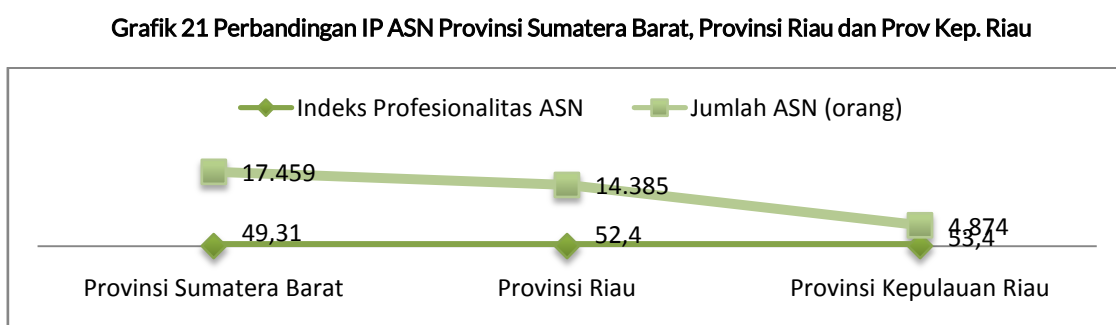
IP ASN Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Secara teknis, hal ini disebabkan antara lain oleh adanya perubahan metode penilaian untuk mengukur IP ASN dan jumlah ASN yang dijadikan sampel penilaian IP ASN tersebut. Sejak tahun 2020, penilaian IP ASN sudah dilakukan untuk semua ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya IP ASN ini menjadi tanda bahwa pengelolaan ASN selama ini masih banyak

kekurangan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Perkembangan IP ASN Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 disajikan pada grafik 20.



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN 2017-2021

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain yang menjadi wilayah kerja kantor Regional XII BKN Pekanbaru yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, IP ASN Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan dengan 2 Provinsi tersebut. Akan tetapi dilihat jumlah PNS yang menjadi sampel penilaian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terbanyak. Perbandingan IP ASN dan Jumlah ASN yang dinilai antara Provinsi Sumatera Barat dengan 2 provinsi lain digambarkan pada grafik 21.



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Indeks Profesional ASN tidak ditentukan oleh banyaknya ASN yang berpartisipasi dalam pengukuran, tetapi ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin individu ASN itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan ASN yang profesional,

dan mampu meningkatkan indeks ASN maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Dalam merencanakan kebutuhan pegawai, pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah memiliki memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis jabatan.
2. Melakukan inventarisasi data kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN untuk melakukan pengukuran profesionalitas ASN.
3. Penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui *website bkd.sumbar.prov.go.id*.
4. Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar kompetensi jabatan eselon 2 dan sudah dikembangkan ke jabatan lainnya pada tahun 2021.
5. Dalam Promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara terbuka.
6. Penggunaan absensi online pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan terus dikembangkan menu dan fiturnya sesuai kebutuhan.
7. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penambahan kegiatan sosialisasi/workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian yang diharapkan dapat menekan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bermasalah dengan disiplin.
8. Meningkatkan koordinasi terkait percepatan *updating* data SAPK ke BKN.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain:

1. Masih rendahnya ASN yang mengikuti Diklat Berbasis peningkatan kompetensi baik Diklat PIM untuk pegawai dengan jabatan struktural maupun Diklat Teknis Fungsional untuk pegawai dengan jabatan fungsional tertentu.
2. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara data pegawai yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara berasal dari Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kendalanya, terjadi ketidaksesuaian data Pegawai Negeri antara SAPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketidaksesuaian data dikarenakan belum terhubungnya aplikasi SAPK dengan SIMPEG sehingga data pegawai yang berubah harus diupload ulang, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan updating data ke SAPK cukup lama.

3. Keterbatasan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan yang direncanakan tidak jadi dilaksanakan yang mana jumlah pelatihan/bimtek merupakan salah satu indikator penghitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
4. Rendahnya kesadaran ASN meng*update* data kompetensi kepegawaian yang diikutinya yang berdampak belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti bimtek/pelatihan.
5. Kurangnya minat ASN mengikuti beberapa jenis diklat teknis dan manajerial dikarenakan pola karier ASN yang belum jelas.
6. Kurangnya informasi terkait pengembangan kompetensi aparatur.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Mengusulkan penyempurnaan instrumen pengukuran IP ASN dengan BKN
2. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
4. Menyusun jenis-jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan OPD dan sesuai dokumen Analisis Jabatan yang disusun.
5. Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan baru dan pelaksanaan pelatihan secara *e-learning* sebagai inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

6. Mengoptimalkan penggunaan absensi online dan perhitungan kinerja ASN menggunakan aplikasi e-kinerja.
7. Mendorong seluruh OPD agar merencanakan dan menganggarkan kebutuhan diklat dan mewajibkan masing-masing ASN mengikuti Diklat/Bimtek minimal 20 JPL per tahun.

Untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 6 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **11.526.011.229,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif meningkatkan indeks profesionalitas ASN. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Peningkatan IP ASN

NO	INDIKATOR/ PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Indeks Profesionalitas ASN	6	11.526.011.229	10.398.850.792
1	Program Kepegawaian Daerah	4	5.716.219.719	5.391.910.893
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	5.809.791.510	5.006.939.899

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **11.526.011.229,-** terealisasi sebesar Rp. **10.398.850.792,-** atau **90,22%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.127.160.437 (9,78%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN (69,45%) lebih rendah 20,77% dari realisasi anggaran (90,22%) .

2. Indeks E-Government

Untuk mendukung birokrasi yang efektif dan efisien juga diperlukan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini dapat terwujud dengan menerapkan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang

memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE.

Untuk tahun 2021, Indeks *e-government*/SPBE ditargetkan 3,1 (skala indeks 0-5) dengan predikat baik (2,6-<3,5). Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator Indeks *e-government* masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, target tahun 2021 ditetapkan sama dengan realisasi 2020 atau tetap bertahan pada angka indeks 3,1 dikarenakan pada tahun 2021 sesuai Peraturan MenPAN RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat penambahan domain dan indikator baru yang diukur atau dievaluasi sebanyak 1 domain baru dari yang semula 3 domain bertambah menjadi 4 domain serta 12 indikator baru yang semula hanya 35 indikator bertambah menjadi 47 indikator. Penambahan jumlah domain dan indikator baru di atas berpotensi terjadinya stagnasi (tetap atau bertahan) pada indeks SPBE

yang sudah dicapai pada tahun 2020 yaitu 3,1 atau bahkan terdepresiasi (berkurang dari capaian sebelumnya).

Indeks *e-government*/SPBE tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,1, terealisasi **2,69** terdepresiasi (berkurang) dari realisasi indeks tahun sebelumnya sebesar 0,41 karena faktor penambahan domain dan indikator baru yang dievaluasi, namun masih dalam rentang predikat baik (2,6-<3,5) dengan tingkat capaian 86,77% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE tahun 2021 diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks SPBE 2,69 termasuk dalam predikat SPBE “Baik” dengan rincian penilaian disajikan pada tabel 20.

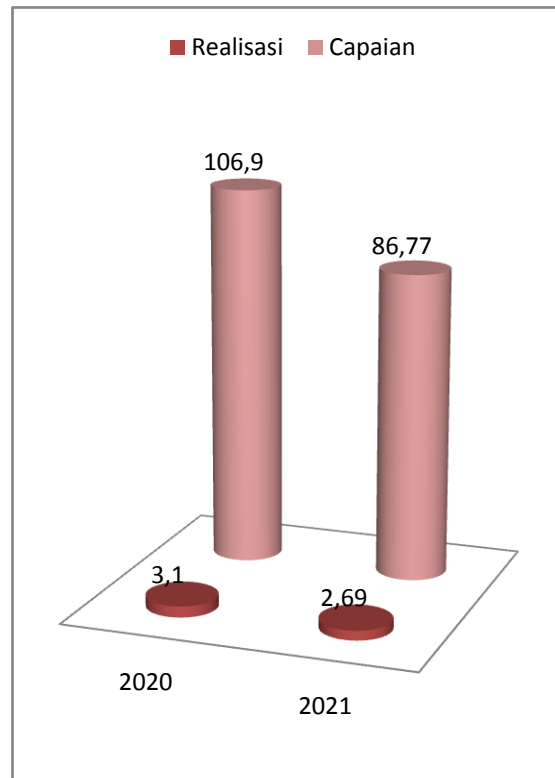
Tabel 20 Rincian Penilaian Indeks SPBE

No	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	2,69
1	Domain Kebijakan SPBE	2,80
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,71
2	Domain Tata Kelola SPBE	2,20
	Perencanaan Strategis SPBE	2,25
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
3	Penyelenggara SPBE	2,00
	Domain Manajemen SPBE	1,00
	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
	Audit TIK	1,00
4	Domain Layanan SPBE	3,55
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80
	Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	3,17

Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2021.

Capaian indikator indeks SPBE diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Dengan capaian sebesar 86,77% menunjukkan realisasi indikator ini tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian indikator ini di tahun 2021 lebih rendah 20,13%. Begitupun dengan realisasi yang mengalami penurunan 0,41 di tahun 2021 yang salah satunya disebabkan oleh penambahan domain dan indikator baru yang dievaluasi. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks SPBE tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 22.

Grafik 22 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks SPBE Tahun 2020-2021

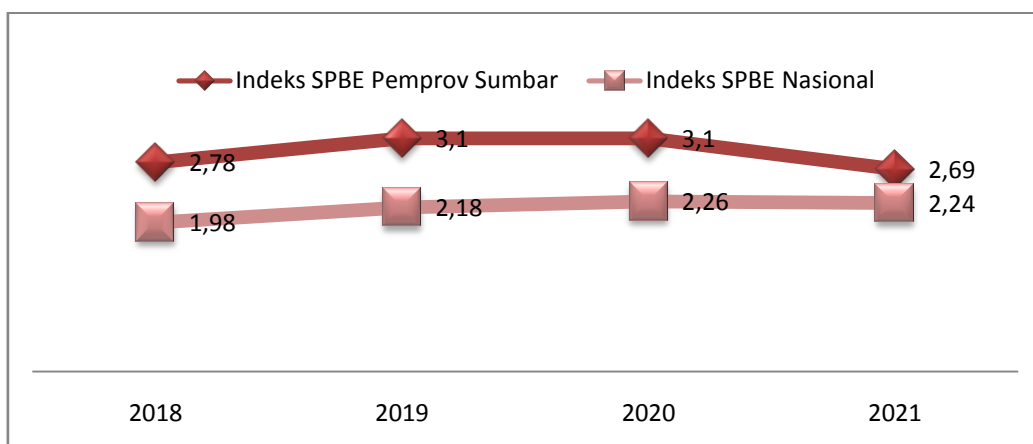


Sumber data: Data diolah

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 menargetkan indeks SPBE dapat tercapai pada angka 3,1. Akan tetapi, dengan realisasi indikator indeks SPBE di tahun 2021 ini yang tercapai 2,69 berarti dapat diketahui target tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 belum dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Meski terdepresiasi di tahun 2021, Indeks *e-government/SPBE* Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 2,69 lebih tinggi dibandingkan dengan indeks *e-government/SPBE* Nasional sebesar 2,24 yang juga terdepresiasi. Perkembangan Indeks *e Government/SPBE* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan perbandingannya dengan Indeks *e Government/SPBE* Nasional dari tahun 2018-2021 digambarkan pada grafik 23.

Grafik 23 Perkembangan dan Perbandingan Indeks eGovernment/SPBE



Sumber data: Kementerian PAN dan RB, 2018-2021

Dalam meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

1. Melakukan perbaikan pada aspek domain manajemen SPBE yang masih memiliki nilai kurang.
2. Melakukan optimalisasi pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dengan membangun Portal Satu Data Sumatera Barat, menerbitkan Pergub Satu Data Sumbar, dan membangun Sistem Informasi untuk Manajemen Aset TIK.
3. Membuat sistem penghubung layanan instansi pemerintahan.
4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dalam rangka meningkatkan nilai indeks SPBE dari aspek Audit TIK.
5. Koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait dengan kebijakan layanan SPBE.
6. Pembentukan tim koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat dan penguatan lembaga teknis penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pelaksanaan kegiatan dan penerapan atau implementasinya.
7. Implementasi Rencana Induk (*Master Plan*) SPBE yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta revisi perubahannya.

Hambatan dalam menerapkan SPBE antara lain:

1. Belum adanya sistem penghubung layanan instansi pemerintah.
2. Kurang dan belum samanya pemahaman pengelola tentang domain manajemen SPBE (domain baru).
3. Kurangnya pemahaman OPD tentang Domain dan Indikator pada evaluasi SPBE, sehingga kesulitan dalam mengumpulkan bukti dukung untuk evaluasi.
4. Kurangnya SDM yang bersertifikasi dalam pengelolaan SPBE seperti untuk audit TIK.
5. Masih ada regulasi yang belum disusun untuk pengelolaan SPBE.
6. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Beberapa aplikasi belum terintegrasi.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerapan SPBE di masa yang akan datang:

1. Memaksimalkan aspek Audit TIK.
2. Melakukan ISO 27001 untuk menghasilkan Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada ruang server dan perangkat infrastruktur lainnya.
3. Membuat regulasi untuk pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi SPBE Daerah bersama Tim Koordinasi SPBE yang sudah dibentuk.
5. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas *bandwidth*.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM tenaga ahli IT/pengelola/ penyelenggara *e-government* termasuk dalam hal sertifikasi Audit TIK.
8. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Untuk meningkatkan Indeks *e-government*, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 Program dengan 6 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp.29.839.429.263,. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai peningkatan nilai indeks *e-government*. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung peningkatan indeks *e-government* dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung peningkatan indeks *e-government*

NO	INDIKATOR/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Indeks e-government/SPBE	6	29.839.429.263	28.496.556.893
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	11.242.744.534	10.369.508.605
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2	17.371.533.607	16.983.523.221
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	515.329.460	505.718.292
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2	709.821.662	637.806.775

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 29.839.429.263,- terealisasi sebesar Rp. 28.496.556.893,- atau 95,50%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.342.872.370 (4,50%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja indeks *e-government* (86,77%) lebih rendah 8,73% dari realisasi anggaran (95,50%).



Sasaran 2.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada

masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan terbaik dan berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, **meningkatnya kualitas pelayanan publik** ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik langsung, disebut Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah unit Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat ada 25 unit. Predikat survei kepuasan masyarakat tersebut diklasifikasikan sesuai tabel 22.

Tabel 22 Predikat survei kepuasan Masyarakat

Nilai	Nilai Internal Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber Permenpan No 14/2017

Untuk tahun 2021, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditargetkan dapat tercapai 84 termasuk dalam kategori mutu pelayanan publik baik (B). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 25 unit penyelenggaraan pelayanan publik yang akan selalu mengupayakan agar dapat memberikan pelayanan minimal Baik kepada semua *stakeholders*. Indeks pelayanan kategori Baik ini berada pada interval 76,61-88,30. Penetapan target

tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik (indeks persepsi kualitas pelayanan) masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, target tahun 2021 ini ditetapkan lebih rendah 6,14 poin dikarenakan kondisi unit pelayanan publik yang melaksanakan survei itu berbeda-beda. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik digambarkan pada tabel 23.

Tabel 23 Capaian Indikator Sasaran 2.1.3



Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditargetkan 84, realisasi 88,33% dengan tingkat capaian sebesar 105,15% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik diukur berdasarkan data survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Unit pelayanan publik yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selama tahun 2021 ada 8 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana diuraikan pada tabel 24.

Tabel 24 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR	PREDIKAT
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,02	Baik
2	Badan Kepegawaian Daerah	90,14	Sangat baik
3	Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	95,07	Sangat baik
4	RSUD. Dr. Mohammad Natsir Solok	90,38	Sangat baik
5	RSUD Pariaman	88,34	Sangat baik

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR	PREDIKAT
6	Rsud Achmad Muchtar Bukittinggi	90,45	Sangat baik
7	RSJ. Prof.Dr. HB. Sa'anin Padang	90,18	Sangat baik
8	18 UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi se-Provinsi Sumatera Barat	79,06	Baik
Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		88,33	BAIK

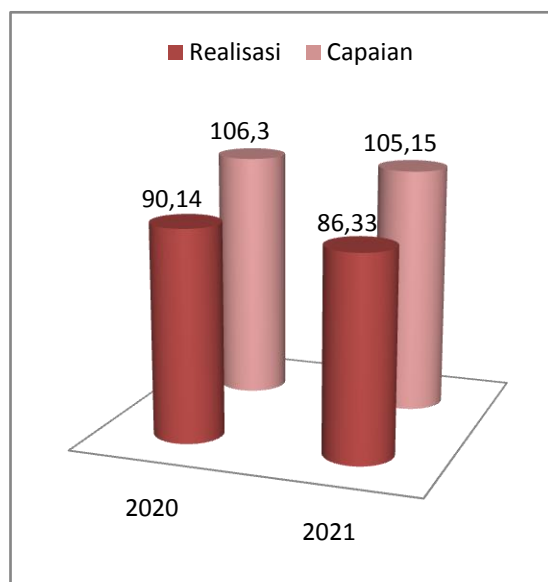
Sumber data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Berdasarkan rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat tersebut, predikat pelayanan publik tergolong “Baik”. Akan tetapi, nilai tersebut belum bisa mewakili bagaimana pelayanan publik pada 25 Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal ini dikarenakan baru 8 Penyelenggara Pelayanan Publik yang melaksanakan survei (32%). Sedikitnya UPPP yang melaksanakan survei dikarenakan:

- Adanya keterbatasan anggaran sementara survei selama ini dilakukan oleh pihak ketiga dan tentunya memerlukan biaya.
- Masih kurangnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan survei mandiri.

Capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat tahun 2021 diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Capaian 105,15%, menunjukkan realisasi tahun 2021 tercapai di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, yang juga tercapai di atas target, capaian indikator ini di tahun 2021 menurun 1,15%. Pencapaian target rata-rata di atas 100%, belum mencerminkan kualitas pelayanan pada 25 Penyelenggara Pelayanan Publik

Grafik 24 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Rata-rata survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Tahun 2020-2021



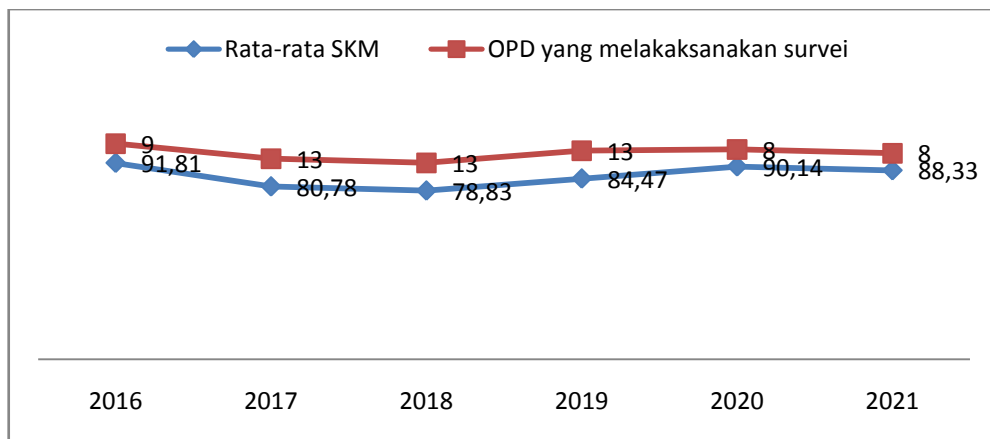
Sumber data: data diolah

karena hanya 8 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau kurang dari 50% yang melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Untuk

realisasi tahun 2021, lebih rendah 3,81 dari realisasi tahun 2020. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2020-2021 tergambar pada grafik 24.

Dari tahun 2016-2021, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Akan tetapi, dalam kurun waktu 6 tahun tersebut rata-rata SKM berada pada interval Baik dan Sangat Baik. Sementara itu, jumlah OPD yang melaksanakan survei semakin lama semakin sedikit. Dengan rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tercapai 88,33 berarti target tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 tercapai dengan baik. Perkembangan rata-rata survei dan UKPP yang melaksanakan survei dari tahun 2016-2021 disajikan pada grafik 25.

Grafik 25 Perkembangan rata-rata SKM dan OPD yang melaksanakan survei tahun 2016-2021



Sumber data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut ini:

1. Meningkatkan kualitas SDM Penyelenggaraan pelayanan Publik
2. Meningkatkan evaluasi kepada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik untuk mengetahui hambatan/kendala dalam memberikan pelayanan.
3. Meningkatkan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan publik, atau melakukan reviu ulang terhadap standar prosedur pelayanan yang dibuat.

4. Mendorong agar unit penyelenggara pelayanan publik, melaksanakan inovasi Pelayanan Publik (baik inovasi baru ataupun replika).
5. Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui lapor sp4n (kanal 1708).

Faktor penghambat sulitnya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah:

1. Keterbatasan sumber daya baik sumber keuangan, aparatur, sarana prasarana dan lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh internal penyelenggara pelayanan publik.
2. Rendahnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik dalam memahami dan mengaplikasikan regulasi pelayanan publik.
3. Belum terbangunnya kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik, sehingga pelayanan publik satu pintu belum dapat diwujudkan.

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui perangkat daerah yang menjadi *leading* sektor akan terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal “Baik” dengan cara:

1. Memaksimalkan penyelesaian pengaduan yang masuk ke aplikasi SP4N LAPOR.
2. Memaksimalkan koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja pelayanan publik.
3. Memperkuat peran Dinas komunikasi Informasi dan teknologi dalam membangun Inovasi pelayanan berbasis informasi dan teknologi.
4. Meningkatkan dan mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Nomor 70 dan 62 tahun 2016.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 7 Program dengan 23 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD

Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **63.770.724.612,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.1.3

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	63.770.724.612	55.375.506.104
1	Program Pendaftaran Penduduk	3	863.067.319	837.615.936
2	Program Pencatatan Sipil	3	458.507.100	448.229.506
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	674.865.521	653.931.426
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	237.333.000	233.014.323
5	Program Pelayanan Penghubung	1	2.568.755.425	2.529.827.854
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4.037.991.217	3.895.966.114
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8	54.930.205.030	46.776.920.945

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **63.770.724.612,-** terealisasi sebesar Rp. **55.375.506.104,-** atau **86,84%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.395.218.508 (13,16%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik (105,15%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (86,84%) dengan tingkat efisiensi sebesar 18,31%.



MISI 3
MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT,
BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI

Tujuan 3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang ada dalam diri manusia yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan. SDM juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem yang membentuk suatu organisasi. Dalam mendukung pembangunan suatu daerah, SDM menjadi sumber daya yang terpenting dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Suatu daerah akan maju dan berkembang jika kualitas SDMnya baik, yang akan berimplikasi pada pengembangan daerah tersebut. Akan tetapi, pertumbuhan SDM yang cepat belum diiringi dengan peningkatan kualitasnya sehingga SDM tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan kualitas SDM harus menjadi perhatian dan prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Pengembangan kualitas SDM menjadi salah satu yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu **“meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi dengan tujuan “meningkatkan kualitas sumber daya manusia”**. Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Kualitas SDM diukur dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*),

Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi (IPM ≥ 80), tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$) dan rendah (IPM < 60). Penetapan indikator indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n. Pada tahun 2021, ada 2 data IPM yang dikeluarkan oleh BPS yaitu IPM tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan hal tersebut, yang disajikan dalam laporan ini adalah data IPM tahun 2021.

Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan dapat mencapai 72,56. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator IPM masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan IPM tahun 2020 (72,38), target tahun 2021 meningkat 0,18. Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia tergambar pada tabel 26.

Tabel 26 Capaian Indikator Tujuan 3.1



Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 72,56, realisasi 72,65 dengan tingkat capaian sebesar 100,12% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 ini diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 65/12/13/Th. XXIV tanggal 1 Desember 2021. Nilai IPM sebesar 72,65 berarti

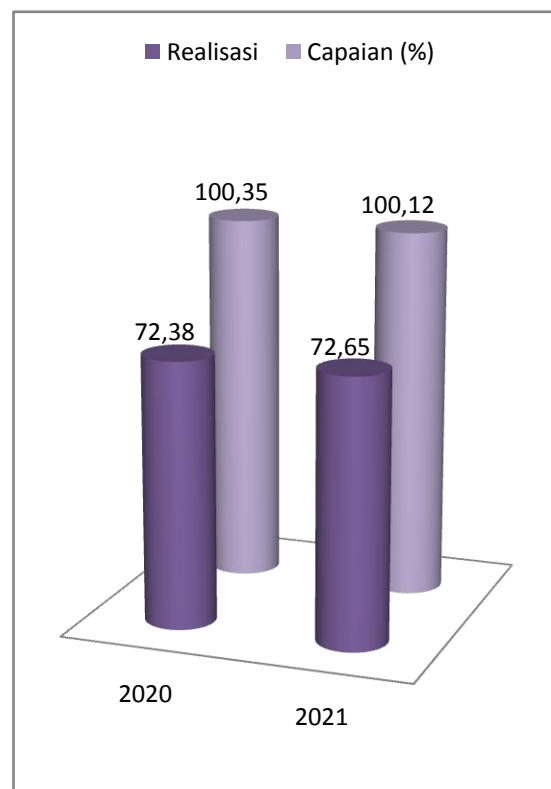
Umur Harapan Hidup	69,59
Harapan Lama Sekolah	14,09
Rata-rata Lama Sekolah	9,07
Pengeluaran Perkapita	10.790
IPM	72,65

status pembangunan manusia Sumatera Barat termasuk pada kategori tinggi.

IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,65 berasal dari rata-rata IPM 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk tahun 2021, tidak ada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang pembangunan manusianya berstatus Rendah (IPM < 60). Dari 19 Kabupaten/Kota, status IPM “sangat tinggi” berada di Kota Padang dan Kota Bukittinggi, 10 Kabupaten/Kota dengan “status tinggi” dan 7 Kabupaten/Kota berstatus “sedang”.

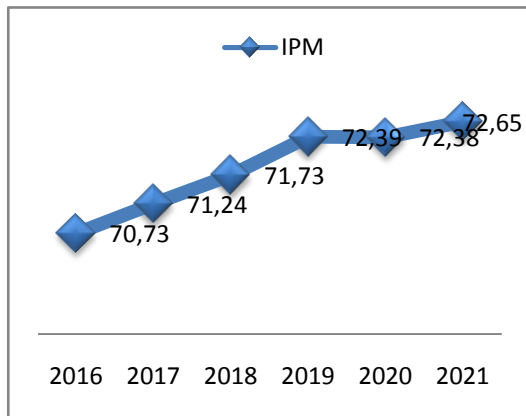
Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia yang tercapai sebesar 100,12% menunjukkan realisasi IPM tahun 2021 tercapai di atas target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian indikator IPM mengalami penurunan 0,23% di tahun 2021. Sementara itu, untuk nilai IPM tahun 2021, tercapai 0,27 lebih tinggi dibandingkan IPM tahun 2020 (72,38). Perbandingan realisasi dan capaian indikator IPM tahun 2020-2021 dapat dilihat pada grafik 26.

Grafik 26 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator IPM tahun 2020-2021



Sumber data: data diolah

Grafik 27 Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



Sumber data: BRS 65/12/13/Th. XXIV tanggal 1 Desember 2021.

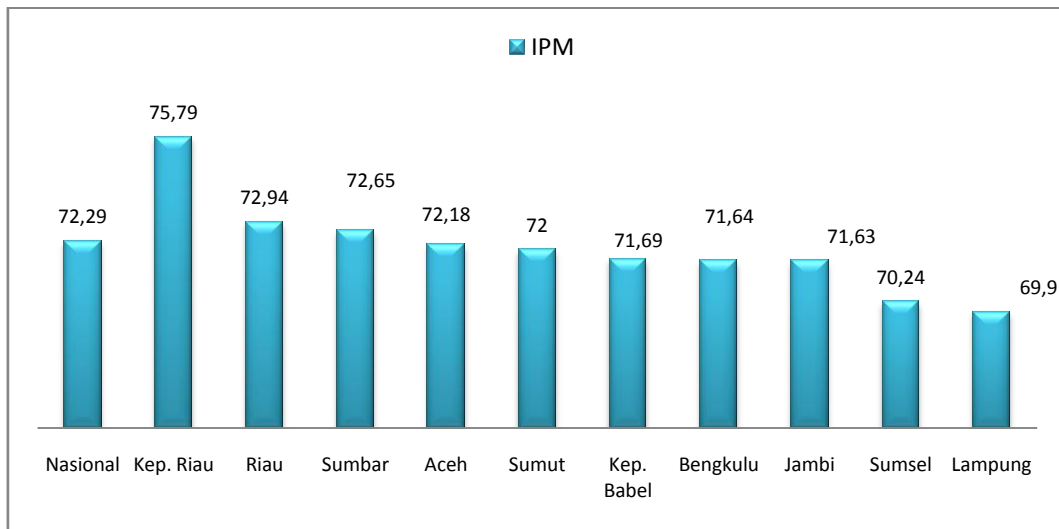
Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebagaimana tergambar pada grafik 27 menunjukkan tren yang berfluktuatif. Tren positif dari tahun 2016-2019, tren negatif terjadi pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021. Rata-rata peningkatan selama 6 tahun adalah sebesar 0,384.

Dengan rentang nilai IPM 70,73 – 72,65, status pembangunan manusia Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tergolong tinggi. Hal ini tentunya juga tergambar dari pencapaian IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang berada di status sedang – sangat tinggi untuk tahun 2021.

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menargetkan IPM 72,56. Nilai IPM di tahun 2021 sebesar 72,65 tercapai melebihi target. Hal ini menunjukkan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia sudah tercapai dengan baik.

IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 tercatat 0,39 poin di atas angka IPM Nasional. Secara nasional Sumatera Barat termasuk dalam 21 Provinsi di Indonesia yang status capaian pembangunan manusia dengan status “tinggi”. Sementara itu, dari 10 (sepuluh) Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan tertinggi ketiga setelah Provinsi Kepulauan Riau (75,79) dan Provinsi Riau (72,94). Perbandingan IPM Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 28.

Grafik 28 IPM Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik

Pencapaian IPM Sumatera Barat 72,65 didukung oleh upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas sekolah menengah, meningkatkan kualitas peserta didik melalui pemberian beasiswa Rajawali, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi, peningkatan status gizi, pelayanan imunisasi dasar kepada anak balita, melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan Menggiatkan program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) secara berkelanjutan.

Walaupun tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menemukan kendala/hambatan dalam meningkatkan IPM, hambatan tersebut antara lain:

- a. Masih adanya SDM tenaga Pendidik dan tenaga kesehatan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar.
- b. Masih kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan.

- c. Kualitas sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
- d. Distribusi tenaga pendidik, kependidikan dan tenaga kesehatan yang belum merata.
- e. Pandemi covid yang telah berjalan selama 2 tahun mempengaruhi kualitas belajar siswa dan memunculkan ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan.

Upaya di masa yang akan datang untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Pembangunan manusia antara lain:

- a. Secara konsisten berupaya meningkatkan tingkat pendidikan dengan melakukan pemetaan guru, tenaga kependidikan guna pemerataan pendistribusian ketersediaan jumlah dan kualifikasi di sekolah, pemberian bantuan pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- b. Secara konsisten dan berkelanjutan berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, pendistribusian tenaga kesehatan secara merata, dan memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat serta pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 sasaran yaitu meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

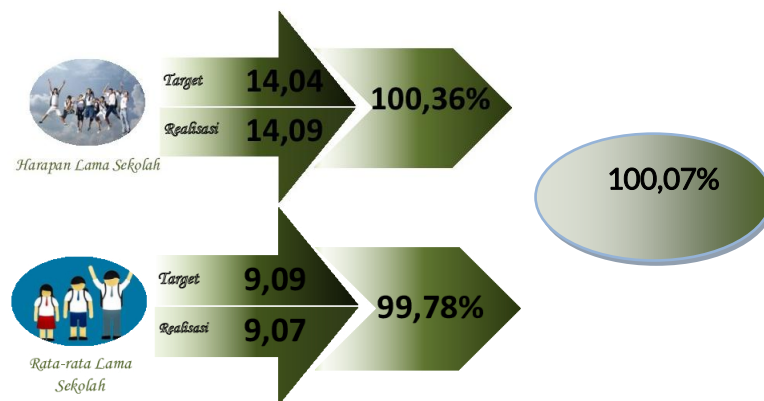


SASARAN 3.1.1 MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi kualitas SDM. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dapat mengatur kehidupannya secara wajar. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran **meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat** sebagai sasaran yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat disajikan pada tabel 27.

Tabel 27 Capaian indikator kinerja sasaran 3.1.1



Berdasarkan capaian 2 indikator tersebut, sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat tercapai dengan sangat baik dengan rata-rata capaian 100,07%. Berikut diuraikan penjelasan masing-masing indikator:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n. Pada tahun 2021, ada 2 data harapan lama sekolah yang dikeluarkan oleh BPS yaitu harapan lama sekolah tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan hal tersebut, yang disajikan dalam laporan ini adalah harapan lama sekolah tahun 2021.

Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah (HLS) ditargetkan dapat mencapai 14,04. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator HLS masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika melihat HLS tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 14,02, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat optimis meningkatkan target tahun 2021 sebesar 0,2 poin menjadi 14,04.

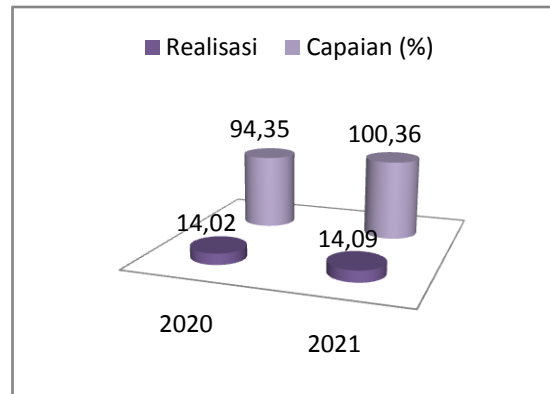
HLS tahun 2021 ditargetkan 14,04 terealisasi 14,09 dengan tingkat capaian 100,36% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi HLS tahun 2021 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 65/12/13/Th. XXIV tanggal 1 Desember 2021. Angka HLS Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 14,09 menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2021 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai D II.

Capaian indikator HLS tercapai sebesar 100,36% menunjukkan realisasi HLS tahun 2021 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (94,35%), terjadi peningkatan sebesar 6,01% di tahun 2021. Sementara itu, realisasi HLS tahun 2021 tercapai 14,09 meningkat 0,07 dari HLS tahun 2020.

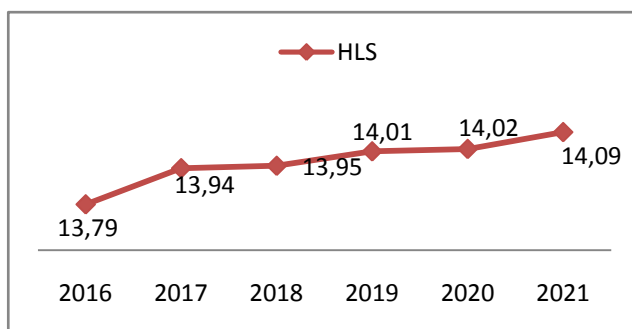
Perbandingan realisasi dan capaian indikator HLS tahun 2020-2021 dapat dilihat pada grafik 29.

Grafik 29 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator HLS tahun 2020-2021



Sumber data: data diolah

Grafik 30 Perkembangan HLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



Sumber data: BRS 65/12/13/Th. XXIV tanggal 1 Desember 2021.

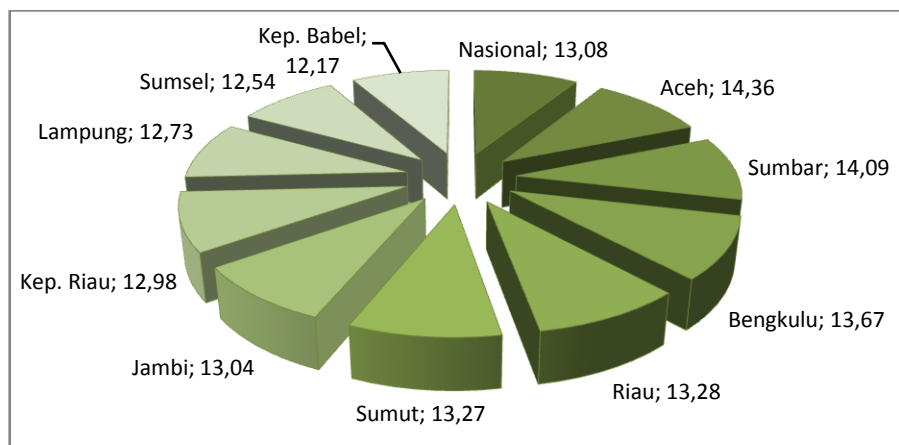
HLS Sumatera Barat dari tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan. Rata-rata peningkatan selama 6 tahun terakhir hanya 0,06 poin. Peningkatan tertinggi HLS terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu 0,15 poin.

Untuk tahun 2021 ini, Pemerintah Sumatera Barat hanya mampu meningkatkan HLS sebanyak 0,07 menjadi 14,09. Dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun terakhir dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, dengan nilai HLS 14,09 (100,36%) berarti target HLS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun terakhir RPJMD periode ini (14,04) sudah tercapai melebihi target yang direncanakan.

HLS Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi 1,01 atau 1 tingkat dibandingkan dengan HLS Nasional. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang ada di Pulau

Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 2 setelah Provinsi Aceh dengan perbedaan sebesar 0,27 lebih rendah. Sementara itu, jika dilihat dari HLS Provinsi Kep.Bangka Belitung sebagai Provinsi yang memperoleh nilai HLS terendah di Pulau Sumatera, HLS Sumatera Barat lebih tinggi 2 tingkat. Gambaran HLS Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 31.

Grafik 31 HLS Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka rata-rata Lama Sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. RLS diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n. Pada tahun 2021, ada 2 data RLS yang dikeluarkan oleh BPS yaitu RLS tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan hal tersebut, yang disajikan dalam laporan ini adalah RLS tahun 2021.

Pada tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditargetkan dapat mencapai 8,92. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026,

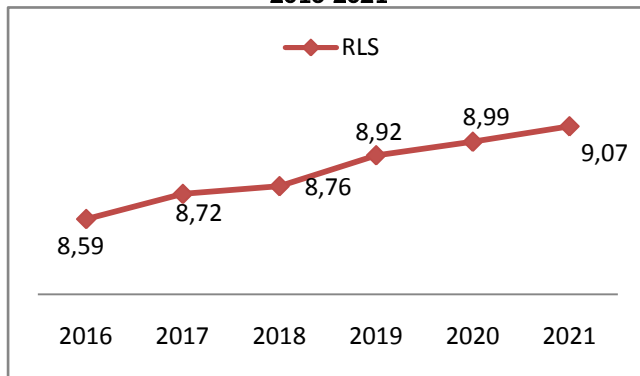
meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator RLS masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Melihat RLS tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 8,99, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan RLS tahun 2021 ini 9,09 atau lebih tinggi 0,1 dari RLS tahun 2020.

RLS tahun 2021 ditargetkan 9,09 terealisasi 9,07 dengan tingkat capaian 99,78% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Sama halnya dengan HLS, realisasi RLS tahun 2021 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 65/12/13/Th. XXIV tanggal 1 Desember 2021. Angka RLS Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 9,07 menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,07 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III).

Capaian indikator RLS tercapai sebesar 99,78% (< 100%), menunjukkan realisasi RLS belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Jika dibandingkan dengan capaian indikator ini di tahun 2020 (101,58%), terlihat adanya penurunan di tahun 2021 sebesar 1,8%. Walaupun demikian, dari segi realisasi RLS tahun 2021 tercapai lebih tinggi dibandingkan RLS tahun 2020, dengan selisih sebesar 0,08.

Grafik 32 Perkembangan RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



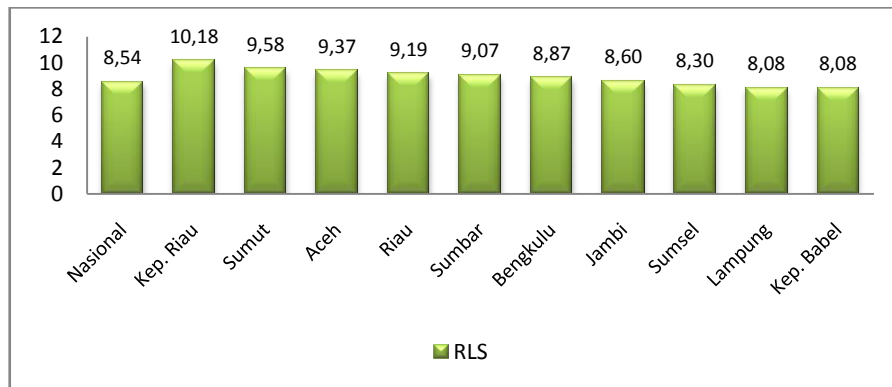
Sumber data: BRS 65/12/13/Th. XXIV tanggal 1 Desember 2021.

RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan dengan peningkatan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan selama kurun waktu 6 tahun terakhir mencapai 0,096 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 0,16.

Sementara itu, di tahun 2021, RLS Provinsi Sumatera Barat berhasil ditingkatkan sebanyak 0,08 dari tahun sebelumnya (8,99). Meskipun nilai RLS terus meningkat, tetapi target 2021 (9,09) yang merupakan target terakhir RPJMD periode 2016-2021 belum tercapai sesuai yang diharapkan. Realisasi RLS sebesar 9,07 atau 99,78%. menunjukkan RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 telah tercapai dengan sangat baik. Perkembangan RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 tergambar pada grafik 32.

RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 9,07 lebih tinggi 0,53 dari nilai RLS secara Nasional. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera, RLS Sumatera Barat menempati urutan ke 5 setelah Provinsi Kep. Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh dan Provinsi Riau. Perbandingan RLS Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 33.

Grafik 33 RLS Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik

Selama tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melaksanakan upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Upaya tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan mutu dan daya saing sekolah menengah melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas sekolah menengah. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan:
 - penambahan Ruang Kelas Baru pada 16 SMA dan 12 SMK,
 - pemeliharaan Ruang Kelas pada 13 SMA
 - penambahan sarana pembelajaran
- b. Meningkatkan kualitas peserta didik melalui pemberian beasiswa Rajawali kepada 1772 siswa SMA, SMK, SLB, dan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
- c. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan mengadakan pelatihan peningkatan penguasaan teknologi informasi, dan keikutsertaan dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di daerah masing-masing.

Walaupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara konsisten berupaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, akan tetapi upaya tersebut masih menemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

- a. Masih adanya SDM tenaga Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar.
- b. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
- c. Masih adanya kondisi di masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah yang rendah, perhatian orang tua yang kurang
- d. Pandemi covid yang telah berjalan selama 2 tahun menjadi penghambat kemajuan pendidikan dimana Proses Tatap Muka (PTM) di sekolah dibatasi sehingga mempengaruhi kualitas belajar siswa.
- e. Masih kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan.

Untuk kedepannya, agar tingkat pendidikan masyarakat meningkat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pemetaan guru dan tenaga kependidikan guna pemerataan pendistribusian ketersediaan jumlah dan kualifikasi di sekolah serta melengkapi dan memenuhi sarana dan prasarana yang kurang di sekolah.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 10 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp.715.027.381.777,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung pencapaian sasaran 3.1.1 dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung sasaran 3.1.1.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	10	715.027.381.777	603.922.308.055
1	Program Pengelolaan Pendidikan	3	710.988.586.175	600.340.789.520
2	Program Pengembangan Kurikulum	1	367.224.900	356.863.147
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	2.598.849.800	2.269.941.600
4	Program Pembinaan Perpustakaan	2	953.629.202	866.251.448
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	3	119.091.700	88.462.340

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **715.027.381.777,-** terealisasi sebesar Rp. **603.922.308.055,-** atau **84,46%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 111.105.073.722 (15,54%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat (100,07%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (84,46%) dengan tingkat efisiensi sebesar 15,61%.

SASARAN 3.1.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Faktor kesehatan sama pentingnya dengan faktor pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM suatu daerah. Faktor kesehatan ini mempunyai dampak jangka panjang terhadap perkembangan SDM. Oleh karena itu, peningkatan mutu kesehatan masyarakat menjadi salah satu syarat penting dalam rangka menyongsong masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.

Sama halnya dengan pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen juga untuk **meningkatkan derajat kesehatan masyarakat** Sumatera Barat. Tolok ukur/indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup tahun n diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n. Pada tahun 2021, ada 2

data Angka harapan hidup yang dikeluarkan oleh BPS yaitu Angka harapan hidup tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan hal tersebut, yang disajikan dalam laporan ini adalah data Angka harapan hidup tahun 2021.

Pada tahun 2021, Angka harapan hidup (AHH) ditargetkan dapat mencapai 69,62. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator AHH masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan AHH tahun 2020 (69,47), target tahun 2021 meningkat 0,15. Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 29.

Tabel 29 Capaian Indikator Sasaran 3.1.2



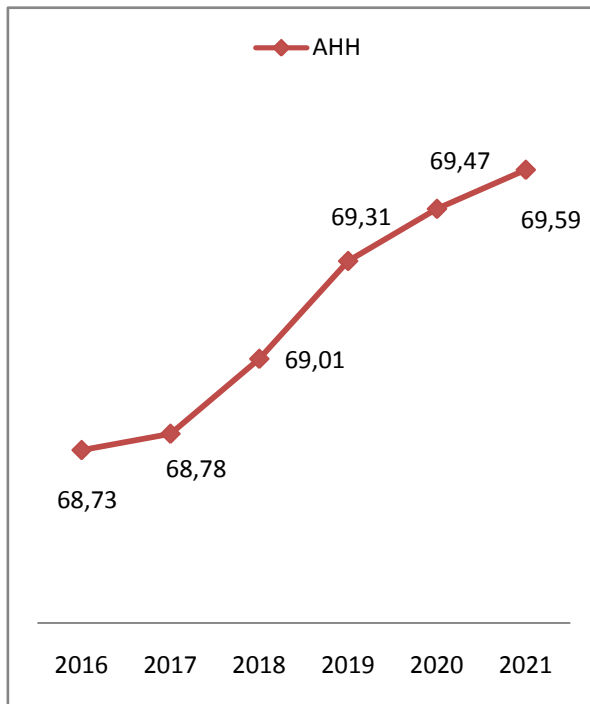
Angka harapan hidup ditargetkan 69,62, realisasi 69,59 dengan tingkat capaian sebesar 99,96% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi AHH tahun 2021 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 65/12/13/Th. XXIV tanggal 1 Desember 2021. AHH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 69,59 menunjukkan bahwa bayi yang lahir di tahun 2021 memiliki peluang untuk hidup hingga usia 69,59 tahun.

Capaian indikator AHH tercapai sebesar 99,96% menunjukkan realisasi AHH tahun 2021 belum mencapai target yang direncanakan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Jika dibandingkan dengan capaian AHH tahun sebelumnya (100,13%), capaian AHH

tahun 2021 lebih rendah 0,17%. Sedangkan untuk realisasi tahun 2021 meningkat 0,12 dari AHH tahun 2020.

Grafik 34 Perkembangan AHH Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



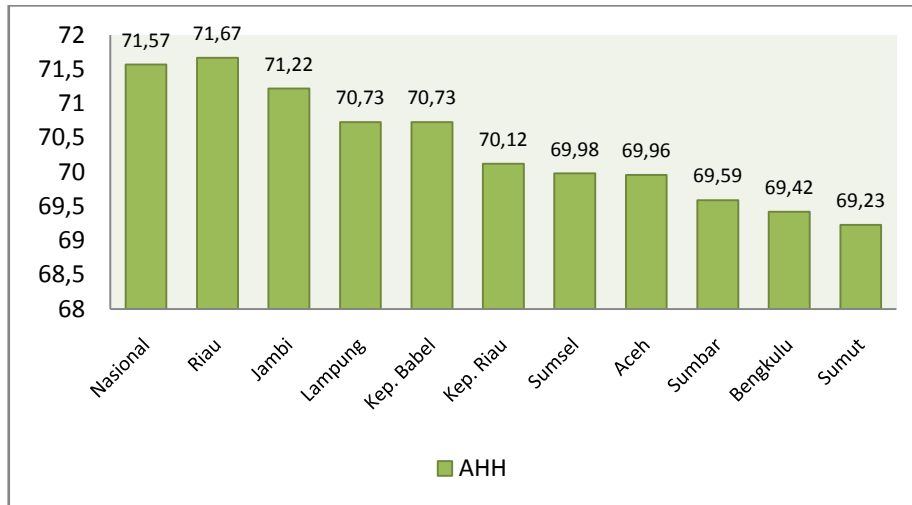
Sumber data: BRS 65/12/13/Th. XXIV tanggal 1 Desember 2021.

AHH Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan dengan peningkatan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan selama kurun waktu 6 tahun terakhir mencapai 0,172 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 0,3. Sementara itu, di tahun 2021, AHH Provinsi Sumatera Barat berhasil ditingkatkan sebanyak 0,12 dari tahun sebelumnya (69,47).

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat menargetkan AHH tercapai 69,62. Sementara itu, realisasi AHH di tahun 2021 ini baru tercapai 69,59 atau 99,96%. Walaupun belum sesuai target, AHH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 telah tercapai dengan sangat baik.

AHH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 lebih rendah 1,98 dari nilai AHH secara Nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, hanya 1 Provinsi yang AHHnya lebih tinggi dari AHH secara Nasional yaitu Provinsi Riau. Sementara 9 Provinsi lainnya termasuk Provinsi Sumatera Barat mencapai AHH di bawah AHH Nasional. Jika diurutkan, Sumatera Barat menempati urutan ke 8 dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Perbandingan AHH Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 35.

Grafik 35 AHH Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik

Pencapaian AHH dipengaruhi juga oleh beberapa indikator berikut ini:

1. Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kasus kematian seorang wanita yang diakibatkan oleh proses kehamilan, persalinan, nifas tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau insidental. Pengukuran angka kematian ibu dilakukan melalui survei oleh Balitbangkes atau Badan Pusat Statistik. Oleh karena dalam penentuan angka kematian ibu tidak ada survei setiap tahunnya maka gambaran kematian ibu didapatkan dalam jumlah absolut berdasarkan laporan rutin dari Kabupaten/Kota. Jumlah kematian ibu tahun 2017 – 2021 berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 30.

Tabel 30 Jumlah Kematian Ibu tahun 2017-2021 per Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepulauan Mentawai	6	5	3	6	3
2	Pesisir Selatan	8	12	8	9	14
3	Solok	4	10	14	12	10
4	Sijunjung	6	5	6	7	5
5	Tanah Datar	6	11	5	6	15
6	Padang Pariaman	1	2	6	3	11
7	Agam	10	12	3	9	18
8	Lima Puluh Kota	8	2	11	6	10
9	Pasaman	9	7	10	4	12
10	Solok Selatan	3	8	4	6	9
11	Dharmasraya	8	4	6	3	14
12	Pasaman Barat	20	13	8	18	31
13	Padang	16	17	16	21	30

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
14	Kota Solok	0	0	1	1	3
15	Sawalunto	0	0	3	2	1
16	Padang Panjang	3	0	0	4	3
17	Bukittinggi	2	1	2	6	2
18	Payakumbuh	3	1	2	2	0
19	Pariaman	1	0	4	0	5
Sumatera Barat		114	110	112	125	196

Sumber Data: Dinas Kesehatan

2. Jumlah Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 28 hari kehidupannya. Jumlah kematian neonatal tahun 2017 – 2021 per Kabupaten/Kota berdasarkan laporan rutin dari Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 31.

Tabel 31 Jumlah Kematian Neonatal tahun 2017-2021 per Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepulauan Mentawai	2	3	18	25	28
2	Pesisir Selatan	44	82	72	48	38
3	Solok	60	43	41	50	51
4	Sijunjung	39	30	33	32	30
5	Tanah Datar	32	35	39	37	58
6	Padang Pariaman	15	15	24	17	22
7	Agam	46	49	48	52	61
8	Lima Puluh Kota	28	42	37	40	28
9	Pasaman	39	26	20	30	49
10	Solok Selatan	18	9	7	10	11
11	Dharmasraya	35	41	36	30	31
12	Pasaman Barat	59	66	84	70	83
13	Padang	52	70	79	64	75
14	Kota Solok	8	5	4	6	10
15	Sawalunto	11	9	11	11	7
16	Padang Panjang	10	8	5	3	10
17	Bukittinggi	4	2	3	5	12
18	Payakumbuh	12	12	7	19	5
19	Pariaman	9	23	21	6	122
Sumatera Barat		545	570	589	555	727

Sumber Data: Dinas Kesehatan

3. Jumlah Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 11 bulan hari kehidupannya. Jumlah absolut kematian bayi berdasarkan laporan rutin dari Kabupaten/Kota tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32 Jumlah Kematian Bayi tahun 2017-2021 per Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

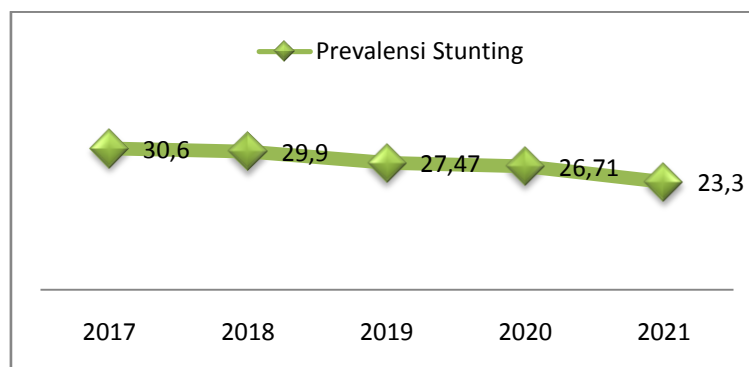
No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepulauan Mentawai	34	6	39	29	36
2	Pesisir Selatan	54	94	78	58	58
3	Solok	83	63	60	26	64
4	Sijunjung	80	70	58	47	49
5	Tanah Datar	39	37	48	54	68
6	Padang Pariaman	27	18	30	20	28
7	Agam	64	70	75	64	91
8	Lima Puluh Kota	48	61	60	46	50
9	Pasaman	51	36	31	33	56
10	Solok Selatan	22	14	10	23	13
11	Dharmasraya	44	58	52	37	41
12	Pasaman Barat	78	74	94	82	95
13	Padang	89	91	106	72	96
14	Kota Solok	10	8	7	6	17
15	Sawalunto	14	15	14	17	13
16	Padang Panjang	12	13	7	4	11
17	Bukittinggi	5	2	10	4	12
18	Payakumbuh	13	16	9	14	10
19	Pariaman	13	25	17	0	147
Sumatera Barat		780	771	805	775	955

Sumber Data: Dinas Kesehatan

4. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Secara umum, masalah gizi di Sumatera Barat telah mengalami perbaikan yang ditandai dengan menurunnya prevalensi *stunting* dari tahun ke tahun. Gambaran prevalensi *stunting* dari tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 36 Prevalensi *Stunting* 2017-2021



Sumber data: Dinas Kesehatan

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi.

Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan adalah Puskesmas dan Rumah Sakit. Pada tahun 2021, 279 Puskesmas sudah terakreditasi (100% dari jumlah Puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Barat). Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8 puskesmas yg terakreditasi dibandingkan dengan kondisi 2020 (271 puskesmas). Untuk rumah sakit yang terakreditasi di tahun 2021 adalah 6 rumah sakit.

2. Pelayanan kesehatan di masa pandemi tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana di atur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru.
3. Menurunkan angka *prevalensi stunting* melalui program peningkatan status gizi dengan pemberian makanan tambahan pada Ibu Hamil dan balita kurus (pada anak usia di bawah dua tahun).
4. Penetapan 9 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai lokus *stunting* Prioritas Nasional pada tahun 2021 yang melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten. Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang.
5. Pelayanan imunisasi dasar rutin kepada anak balita di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Meningkatkan jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Tahun 2021, sebanyak 82,32% masyarakat Sumatera Barat telah memiliki jaminan kesehatan. Angka ini meningkat 0,37% dari kondisi tahun 2020 (81,95%).
7. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui Diklat, Workshop, dan supervisi fasilitatif.
8. Menggiatkan program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai kelompok-kelompok masyarakat dan media.

Selain upaya yang telah dilakukan, peningkatan derajat kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menemukan hambatan/kendala sebagai berikut:

- a. Jumlah, kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal dan distribusi tenaga kesehatan yang belum optimal sesuai kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat.
- c. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat.
- d. Pandemi covid 19 berdampak pada ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, dan mempengaruhi pelaksanaan Imunisasi dasar.

Untuk kedepannya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Mempertahankan pengalokasian anggaran 10% untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan.
3. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
4. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Untuk mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 19 Program dengan 40 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **271.598.665.978,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3.1.2 dapat dilihat pada tabel 33.

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.2

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	40	271.598.665.978	232.003.400.452
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3	204.060.976.007	168.097.155.224
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	536.431.700	413.747.067
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1	91.636.871	40.916.750
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	1.882.635.384	1.792.983.467
5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	13.192.096.400	12.879.162.458
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	1.937.985.793	1.602.691.488
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	3.279.354.600	3.108.755.289
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2	3.426.631.800	3.254.709.900
9	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4	37.598.221.675	35.421.209.695
10	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1	1.500.000.000	1.500.000.000
11	Program Pengendalian Penduduk	1	72.664.500	69.691.700
12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2	60.225.000	59.635.000
13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2	97.325.000	95.877.250
14	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3	1.903.583.200	1.901.738.356
15	Program Perlindungan Perempuan	3	784.742.398	682.036.894
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	177.620.450	177.620.450
17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	43.253.550	43.173.550
18	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2	194.037.400	187.869.400
19	Program Perlindungan Khusus Anak	3	759.244.250	674.426.514

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **271.598.665.978,-** terealisasi sebesar Rp. **232.003.400.452,-** atau **85,42%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 39.595.265.526 (14,58%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (99,96%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (85,42%) dengan tingkat efisiensi sebesar 14,24%.

MISI 4

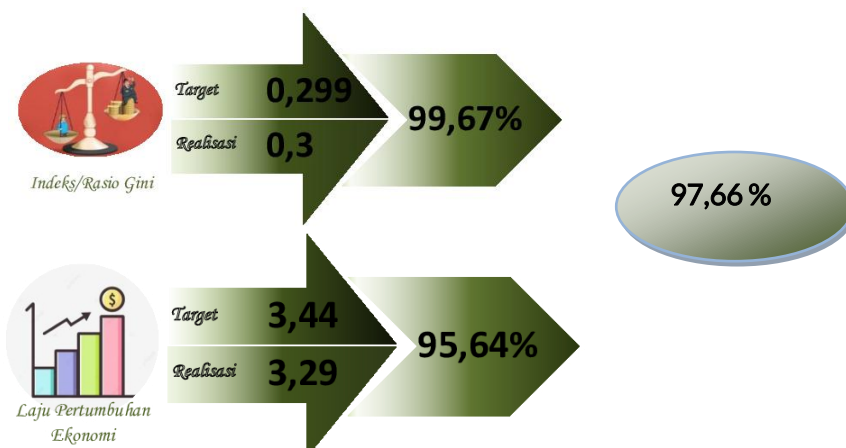
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan 4.1 Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah

Setelah terpuruk di tengah ketidakpastian dan kompleksitas masalah dunia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi merosot, angka pengangguran meningkat dan penduduk miskin bertambah yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi Covid-19, di tahun 2021 daerah-daerah di seluruh Indonesia mulai bangkit. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Daerah bersama seluruh *stakeholders*, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, terkhususnya Sumatera Barat. Perbaikan ekonomi Sumatera Barat tersebut telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak triwulan II hingga triwulan IV tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai implementasi dalam menindaklanjuti Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah sebagai tujuan untuk mendukung Misi 4 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat diwujudkan. Ketercapaian tujuan tersebut dilihat dari keberhasilan capaian indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Pencapaian tujuan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel 34 Capaian indikator kinerja tujuan 4.1



Berdasarkan 2 indikator tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah tercapai dengan capaian 97,66% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Berikut diuraikan penjelasan masing-masing indikator:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perbaikan ekonomi Sumatera Barat telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak triwulan II hingga triwulan IV tahun 2021, meskipun sedikit mengalami perlambatan dari triwulan II ke triwulan III karena kemunculan varian Delta. Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, Sumatera Barat berhasil melanjutkan pertumbuhan positif di triwulan IV.

Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan 3,44%. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator *laju pertumbuhan ekonomi* masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Target ini meningkat 5,04% dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 (-1,60%). Ekonomi Sumatera Barat tahun

2021 tumbuh sebesar 3,29% (C-to-C), dengan tingkat capaian kinerja 95,64%, termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 11/02/13/ThXXV, 7 Februari 2022 dan digambarkan pada tabel 35.

Tabel 35 PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019 – 2021

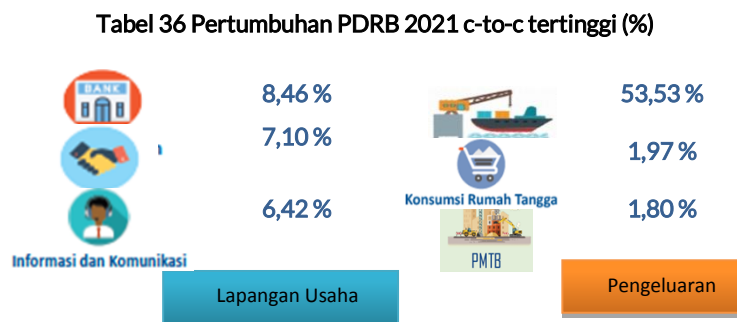
Lapangan Usaha		Nilai PDRB berdasarkan Harga Konstan 2010			Laju Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	54,20	37,61	38,82	1,19	2,62	2,19
2	Pertambangan dan Penggalian	10,34	7,12	6,9	-1,31	6,11	-1,77
3	Industri Pengolahan	20,92	16,13	16,62	-0,54	-1,95	3,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,18	0,175	-6,81	0,00	3,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,22	0,17	0,177	-1,28	6,25	5,53
6	Konstruksi	24,66	16,34	16,20	-2,92	8,43	2,18
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	38,16	27,89	28,96	-1,14	7,31	5,12
8	Transportasi dan Pergudangan	25,28	20,92	18,01	-16,10	4,76	2,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,99	1,98	1,76	-15,95	8,20	5,63
10	Informasi dan Komunikasi	15,58	12,76	14,86	9,76	8,78	6,42
11	Jasa keuangan dan asuransi	7,35	4,77	5,2	1,34	2,14	8,46
12	Real Estate	5,00	3,38	3,47	0,22	6,62	2,41
13	Jasa Perusahaan	1,07	0,77	0,745	-3,98	6,94	1,13
14	Adm Pemerintahan, pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	16,24	9,83	9,8	-0,69	7,20	0,85
15	Jasa Pendidikan	11,39	6,88	7,36	5,03	8,01	1,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,93	2,49	2,86	8,83	7,79	5,88
17	Jasa Lainnya	4,55	3,1	2,98	-10,10	7,64	7,10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		172,32	169,46	174,99	5,05	-1,60	3,29

Sumber data: BRS Nomor 11/02/13/ThXXV, 7 Februari 2022

Ekonomi Sumatera Barat secara kumulatif mengalami pertumbuhan positif baik dilihat dari Lapangan Usaha maupun terhadap semua komponen pengeluaran. Berdasarkan komponen lapangan usaha, Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 1,77%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah jasa keuangan sebesar 8,46%, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 7,10%, informasi dan komunikasi sebesar 6,42%, jasa kesehatan

dan kegiatan sosial sebesar 5,88%, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,53%.

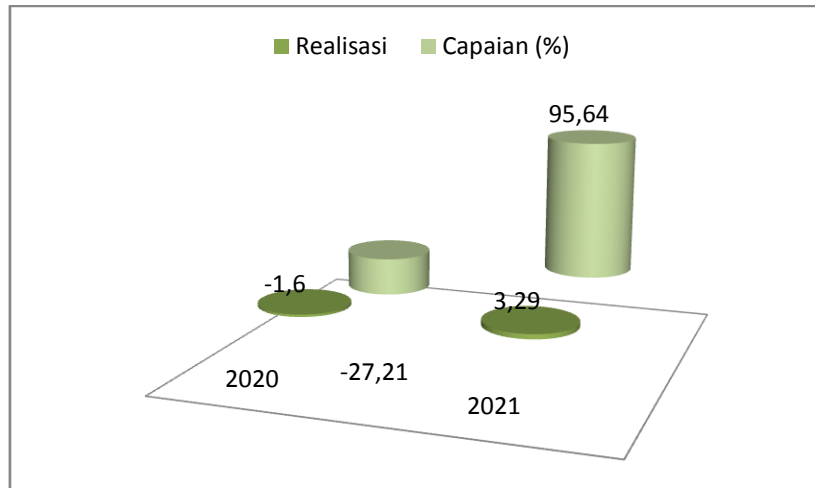
Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri sebesar 53,53%, diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,97%, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,80%, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,79%, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,15%. Sementara itu, komponen Impor Luar Negeri tumbuh sebesar 59,55%. Pertumbuhan perekonomian tertinggi berdasarkan komponen lapangan usaha dan pengeluaran dapat dilihat pada tabel 36.



Capaian indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sebesar 95,64% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*. Capaian sebesar 95,64% tersebut menunjukkan bahwa realisasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tercapai di bawah target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 122,85% walaupun kondisi tahun 2020-2021 masih sama tercapai di bawah target. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi tahun 2021 yang menunjukkan kenaikan 4,89 dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Walaupun terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,29 nyatanya belum mencapai target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 (3,44). Perbandingan realisasi dan capaian

indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 37.

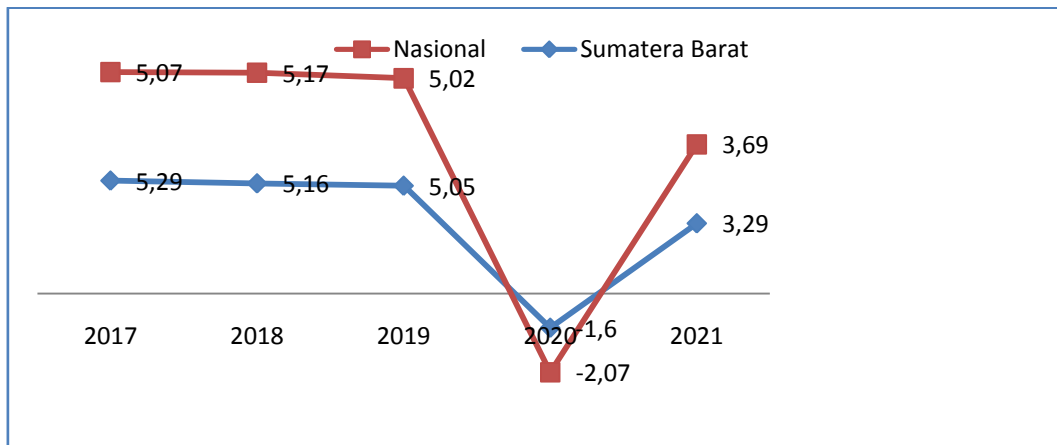
Grafik 37 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2021



Sumber data: data diolah

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan berfluktuatif yang cenderung menurun. Bahkan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid 19. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perbaikan walaupun belum bisa mencapai kondisi pertumbuhan sebelum pandemi. Tahun 2021 Sumatera Barat menjadi Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah keempat di Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara (2,61%), Lampung (2,79%) dan Bengkulu (3,24%) dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera yang sebesar 3,18% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69%. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada grafik 38.

Grafik 38 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dan Sumatera Barat khususnya berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi walaupun belum bisa mengejar pertumbuhan sebelum masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Sumatera Barat memiliki komitmen dan menjalankan upaya pemulihan ekonomi. Atas upaya tersebut, beberapa kondisi telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diantaranya:

- a. Ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi pasca membaiknya situasi pandemi COVID-19. Kondisi pandemi tidak lagi menghalangi aktivitas masyarakat, sebagian besar aktivitas perkantoran/perusahaan sudah berjalan normal seiring dengan penurunan kasus konfirmasi positif covid-19 dan aktivitas vaksinasi yg sangat gencar di Sumatera Barat.
- b. Aktivitas di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) triwulan IV tahun 2021 meningkat, terjadi kenaikan jumlah penumpang sebesar 11,96% dibandingkan triwulan IV 2020 dan sebesar 161,86% dibandingkan triwulan III 2021 (saat terjadi PPKM). Peningkatan aktivitas penerbangan terjadi karena meningkatnya aktivitas pariwisata dan perjalanan aktivitas kedinasan pada akhir tahun karena tidak lagi ada pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk berpergian, hanya diwajibkan vaksin dan antigen.

- c. Rata-rata harga sawit (Rp.2.494,44) meningkat 95,81% dibandingkan triwulan III tahun 2021 dan meningkat 116,90% dibandingkan triwulan IV tahun 2020. Sementara rata-rata harga karet (Rp.9.458,30) meningkat 57,53% dibandingkan triwulan sebelumnya dan meningkat 37,40% dibandingkan triwulan IV tahun 2020.
- d. Ekspor CPO meningkat dibandingkan triwulan IV 2020 sebesar 52,76%. Seiring dengan peningkatan permintaan mitra dagang di akhir tahun.
- e. Musim panen padi dan jagung terjadi pada sebagian besar wilayah penghasil padi dan jagung di Sumatera Barat.
- f. Walaupun kondisi perkantoran dan belajar-mangajar mulai normal, pertemuan daring untuk rapat jarak jauh dan perkuliahan daring pada beberapa kampus masih sering dilakukan sehingga permintaan jasa internet tetap meningkat dibandingkan tahun lalu.
- g. Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Sumatera Barat mencatat jumlah investor asal Sumatera Barat mencapai 102.055 orang hingga 30 November 2021. Terjadi kenaikan investor sebanyak 49.309 atau 93,48% dibandingkan jumlah pada Desember 2020. Dengan nilai investasi sebesar Rp. 17,4 Triliun yaitu 3 kali lipat dibandingkan akhir tahun 2020 (republika.id/Desember2021)
- h. Peningkatan penyaluran bantuan sosial berpengaruh pada konsumsi rumah tangga.
- i. Terjadinya peningkatan penjualan kendaraan baru dan bekas. Data dari SAMSAT menunjukkan peningkatan hingga 127,74% dibanding triwulan IV tahun 2020.
- j. Terjadi peningkatan hunian kamar hotel. Data menunjukkan terjadi peningkatan tingkat hunian kamar (TPK) hingga 33,02%.
- k. Peningkatan impor barang modal khususnya mesin-mesin hingga 351,53%.
- l. Perbaikan ekonomi mitra dagang utama Sumatera Barat seperti Pakistan, Bangladesh, India, Amerika dan China yang tumbuh positif pada triwulan IV 2021 berpengaruh pada permintaan barang Sumatera Barat.

2. Indeks Gini / Gini Ratio

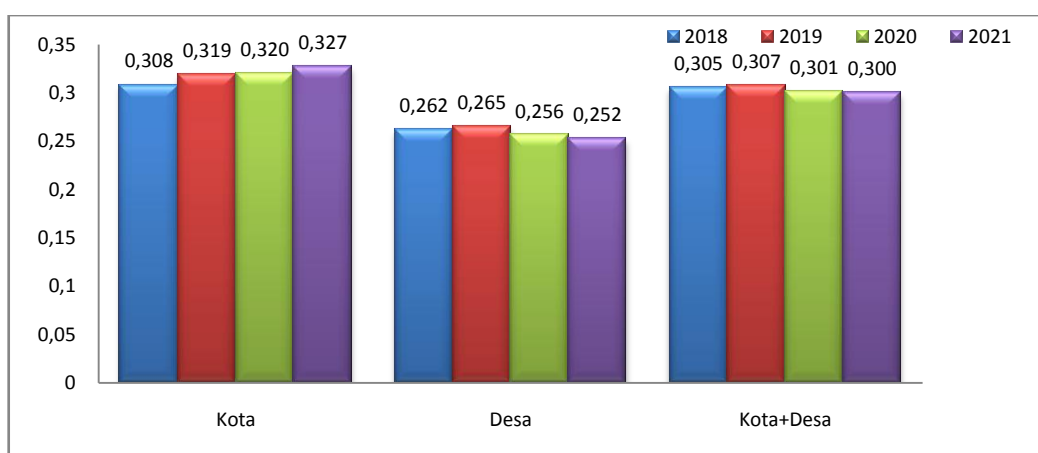
Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian masyarakat. Dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat kelompok pendapatan rendah dan menengah. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Nasional. Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh digunakan Indeks/Rasio Gini. Semakin kecil angka Indeks Gini maka akan semakin baik, karena mengindikasikan bahwa pemerataan distribusi ekonomi penduduk di suatu wilayah yang semakin baik atau semakin minimnya ketimpangan ekonomi penduduk suatu wilayah. Nilai indeks gini berkisar antar 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati 1, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi dan sebaliknya. Selain itu, penurunan ketimpangan juga dapat mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

Tahun 2021, indeks/rasio gini ditargetkan 0,299. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator *indeks/rasio gini* masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2020, target tahun 2021 ditetapkan turun 0,002 menjadi 0,299.

Realisasi tahun 2021 mencapai 0,300 dengan tingkat capaian kinerja 99,67%, termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*. Realisasi indeks/rasio gini diukur berdasarkan data tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik nomor 06/01/13/ThXXV, 17 Januari 2022.

Pada tahun 2021, indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Sumatera Barat makin membaik. Hal tersebut tergambar dari menurunnya indeks gini Provinsi Sumatera Barat dari 0,301 pada tahun 2020 menjadi 0,300 pada tahun 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks/rasio gini di daerah perkotaan selalu lebih besar dari pada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan area perkotaan lebih tinggi dibanding area perdesaan. Pada September 2021 indeks/rasio Gini perkotaan adalah 0,327, naik 0,007 poin dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (0,320). Pada wilayah perdesaan nilai indeks/rasio gini September 2021 menunjukkan angka 0,252 turun sebesar 0,004 poin dari September 2020 (0,256). Indeks/rasio gini perkotaan dan perdesaan Sumatera Barat selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 39.

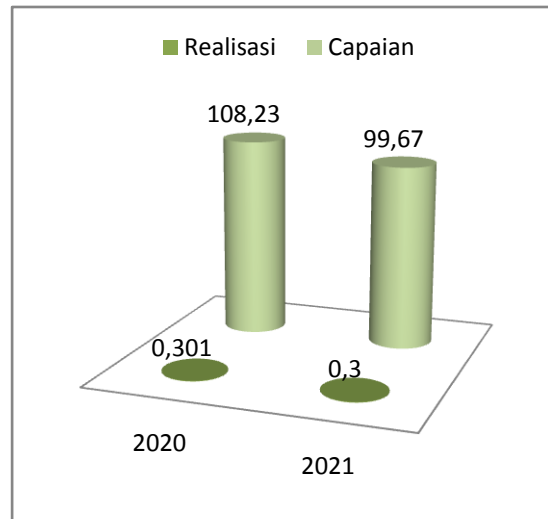
Grafik 39 Gambaran Indeks/Rasio Gini Sumatera Barat September 2018-2021



Sumber data : Berita Resmi Statistik No.14/02/13/ThXXIV, 15 Februari 2021

Capaian indikator kinerja indeks gini Perbandingan realisasi dan capaian sebesar 99,67% diukur menggunakan indikator kinerja indeks gini tahun 2020-*metode pengukuran kriteria yang* 2021 digambarkan pada grafik 40.
kedua. Capaian sebesar 99,67% menunjukkan bahwa realisasi indeks gini tahun 2021 tercapai di bawah target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian tahun 2021 menurun 8,56%. Sementara itu, indeks gini tahun 2021 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang berarti tingkat ketimpangan semakin membaik/kecil.

Grafik 40 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Gini tahun 2020-2021

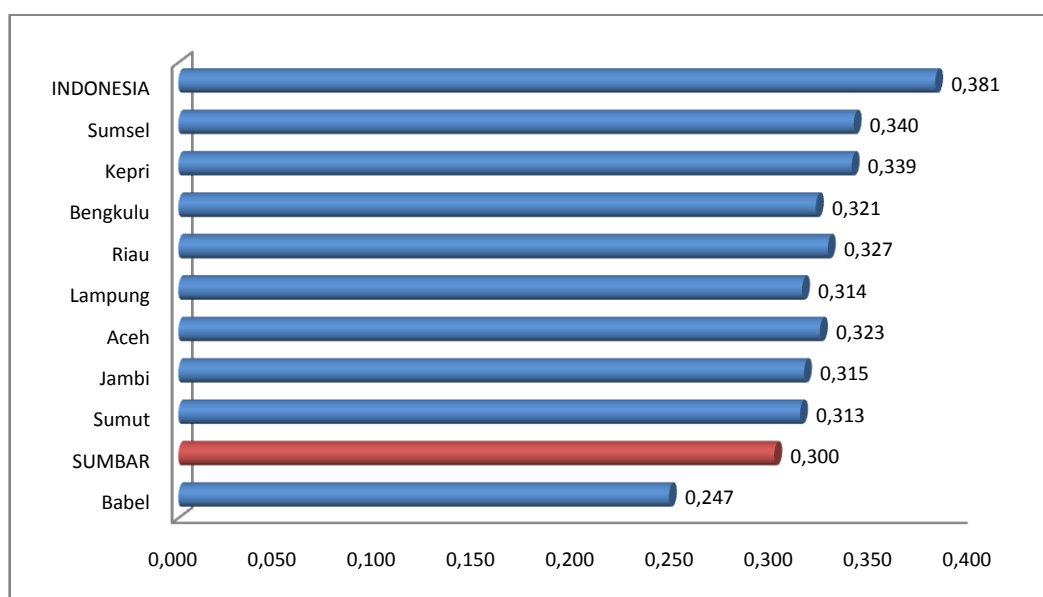


Sumber data: data diolah

Tahun 2021 sebagai target tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 menargetkan indeks gini tercapai 0,299. Realisasi indeks gini di tahun 2021 yang tercapai 0,3 menunjukkan realisasi tahun terakhir RPJMD periode ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Nilai ketimpangan ekonomi di Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 0,300 relatif lebih baik dibandingkan angka Nasional yang tercatat sebesar 0,381. Angka indeks/rasio gini Sumatera Barat masih terbilang cukup baik, yaitu berada pada urutan terendah ke-2 di Sumatera setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (0,247) dan ke-4 di Nasional setelah Kepulauan Babel (0,247), Maluku Utara (0,278) dan Kalimantan Utara (0,285). Perbandingan indeks gini Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi Lain di regional Sumatera digambarkan pada grafik 41.

Grafik 41 Indeks gini Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik

Berdasarkan realisasi laju pertumbuhan ekonomi dan rasio gini yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan misi 4 didukung oleh keberhasilan kinerja-kinerja berikut :

1. Ekonomi Sumatera Barat berhasil keluar dari pertumbuhan yang berkontraksi 1,60 pada tahun 2020. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *stakeholders* termasuk semua masyarakat, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,29% (c-to-c) di 2021.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 2021, otomatis meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat yang direfleksi dalam PDRB perkapita. PDRB perkapita Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. 45,29 juta, meningkat Rp. 1,26 juta dari tahun 2020 (Rp.44,03 juta). Angka tahun 2021 ini setara dengan PDRB perkapita sebelum masa pandemi tahun 2019 yang sebesar Rp. 45,29 juta.
3. Ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Sumatera Barat makin membaik. Hal tersebut tergambar dari menurunnya gini rasio Provinsi Sumatera Barat dari 0,301 pada tahun 2020 menjadi 0,300 pada tahun 2021.

Angka ini relatif lebih baik dibandingkan angka Nasional yang tercatat sebesar 0,381 dan berada pada urutan terendah ke-2 di Sumatera.

4. Investasi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,02% dengan total nilai investasi sebesar Rp.5.161.169.300.000,- meningkat sebesar Rp. 246.503.240.000 dibandingkan nilai investasi tahun 2020. Kontributor terbesar dalam meningkatkan nilai Investasi ini berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 81,06%, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar 18,94%.
5. Nilai Ekspor Sumatera Barat tahun 2021 terealisasi sebesar US\$ 3066,93 juta. Nilai ini meningkat 100,21% dibanding tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar US\$ 1531,84 juta.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah telah ditetapkan 4 sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Penduduk yang sejahtera diukur salah satunya dari Pendapatan perkapitanya. Semakin tinggi Pendapatan perkapita sebuah Negara/Daerah maka semakin makmur penduduk di sebuah Negara/daerah tersebut. Pendapatan rata-rata penduduk ini juga merupakan gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, karena Data [Total personal income/pendapatan perkapita total](#) sebuah daerah jarang sekali ada, sehingga PDRB perkapita lebih sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur pendapatan masyarakat. Maka dari itu, PDRB mempunyai ikatan erat dengan pendapatan perkapita. Dalam mengukur PDRB perkapita Sumatera Barat tahun 2021 digunakan data dari Badan Pusat Statistik. Cara menghitung PDRB perkapita dengan membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan BPS untuk membagi adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2021.

PDRB perkapita tahun 2021 ditargetkan dapat tercapai Rp. 46,09 juta. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator *PDRB perkapita* masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat digambarkan pada tabel 37.

Tabel 37 Capaian Indikator Sasaran 4.1.1



Indikator kinerja PDRB perkapita ditargetkan sebesar Rp. 46,09 juta, terealisasi Rp. 45,29 juta dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,26%, termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja PDRB perkapita dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$PDRB \text{ perkapita} = \frac{Rp. 252,75 \text{ Triliun}}{5,58 \text{ juta jiwa}} \times 100\% = Rp. 45,29 \text{ Juta}$$

Ket:

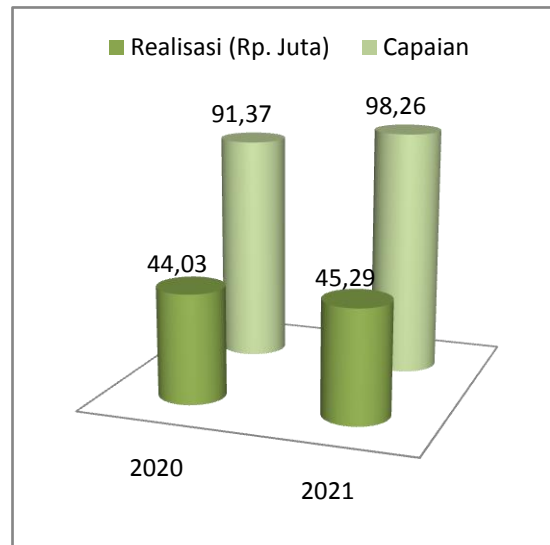
Total PDRB Tahun 2021 atas dasar harga berlaku = Rp.252,75 Triliun

Jumlah Penduduk Pertengahan tahun 2021 = 5,58 juta jiwa

Capaian indikator kinerja PDRB perkapita sebesar 98,26% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*. Capaian sebesar 98,26% berarti realisasi PDRB perkapita tahun 2021 tercapai di bawah target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian indikator ini di tahun 2020, capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,89%. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi tahun 2021 yang juga menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 1,26 juta dibandingkan dengan PDRB perkapita tahun sebelumnya.

Angka PDRB perkapita tahun 2021 ini setara dengan PDRB perkapita sebelum masa pandemi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 45,29 juta. Realisasi PDRB perkapita tahun 2021 yang tercapai Rp. 45,29 juta menunjukkan target PDRB perkapita tahun terakhir RPJMD 2016-2021 belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja PDRB perkapita tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 42.

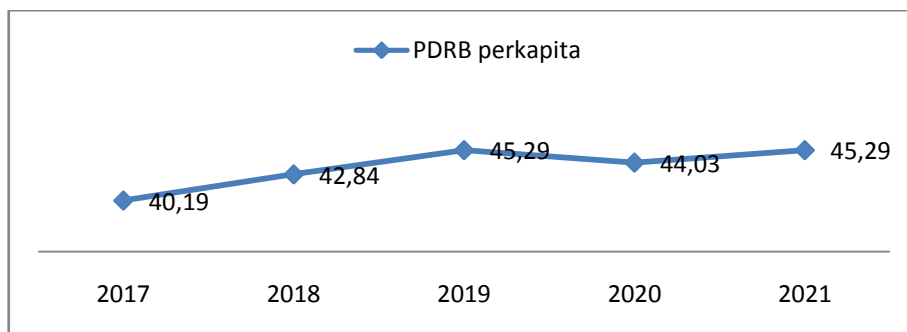
Grafik 42 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator PDRB perkapita tahun 2020-2021



Sumber data: data diolah

PDRB perkapita Sumatera Barat selama tahun 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan yang nilainya berfluktuatif, kecuali pada tahun 2020 yang menunjukkan penurunan akibat pandemi COVID-19. Rata-rata peningkatan PDRB perkapita dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah Rp. 1,28 juta per tahun. Peningkatan tertinggi Rp. 2,45 juta terjadi pada tahun 2019. Untuk tahun 2021, PDRB perkapita meningkat Rp. 1,26 juta dibanding tahun 2020. Hal ini seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19 dimana keadaan PDRB perkapita Sumatera Barat tahun 2021 kembali sama dengan tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19. Perkembangan PDRB perkapita tahun 2017-2021 digambarkan pada grafik 43.

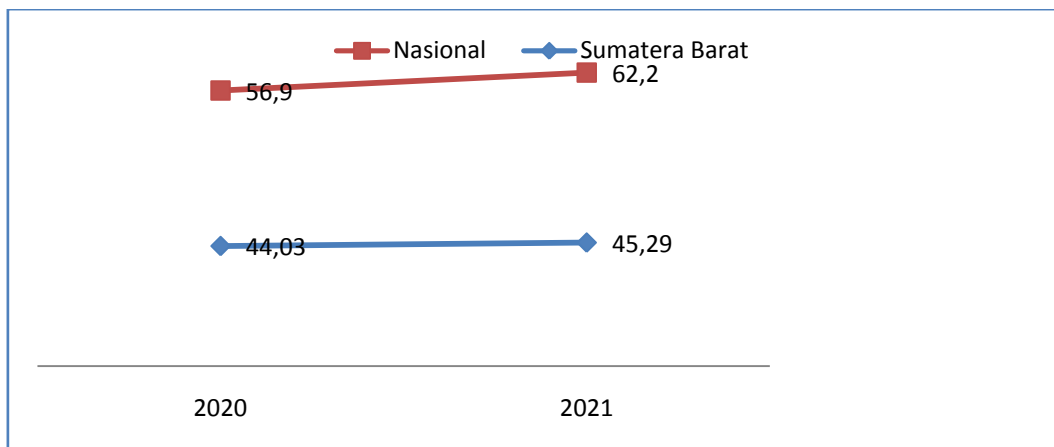
Grafik 43 Perkembangan PDRB perkapita tahun 2017-2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik tahun 2017-2021

Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Nasional sebesar Rp. 62,2 juta, PDRB perkapita Sumatera Barat masih berada jauh di bawah angka Nasional dengan selisih sebesar Rp. 16,91 juta. Perbandingan PDRB perkapita Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2020-2021 disajikan pada grafik 44.

Grafik 44 PDRB perkapita Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2020-2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik

Kembali meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat tahun 2021 seiring dengan meningkatkan faktor-faktor pendukung pertumbuhan PDRB, diantaranya:

1. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *stakeholders* termasuk semua masyarakat telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,29% (c-to-c) di 2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDRB perkapita Sumatera Barat meningkat menjadi Rp.45,29 juta, setara dengan PDRB perkapita sebelum pandemi yang sebesar Rp. 45,29 juga juga di tahun 2019.
2. Sepanjang tahun 2021, jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 8,46% telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha, sedangkan ekspor luar negeri berhasil tumbuh sebesar 53,53%, menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran.
3. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen kembali bertumbuh positif. Perdagangan internasional pun terus mencatat kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas. Pada

tahun 2021, kinerja ekspor meningkat sebesar 53,53% sementara impor tumbuh sebesar 59,55%.

4. Dari sisi Lapangan Usaha, Lima sektor kontributor utama perekonomian Sumatera Barat yaitu Pertanian, kehutanan, dan perikanan, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan pergudangan, Kontruksi, dan Industri pengolahan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Sumatera Barat.
5. Pengeluaran konsumsi Pemerintah yang berkontribusi sebesar 11,53% dengan laju pertumbuhan 0,15% terus memegang peranan aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Alhasil, upaya ini dapat mendorong peningkatan pada komponen yang merupakan kontributor tertinggi PDRB Sumatera Barat tahun 2021 dari sisi pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi. PK-RT berkontribusi sebesar 53,88% dengan laju pertumbuhan sebesar 1,97 %. Sedangkan kontribusi PMTB sebesar 30,30% dengan laju pertumbuhan sebesar 1,80 %.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 33 Program dengan 60 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **236.736.880.047,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 38.

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung opini WTP

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
H	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	60	236.736.880.047	216.904.521.620
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2	212.603.477	191.516.708
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	499.435.400	488.282.600
3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	1	1.029.819.300	943.679.893
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2	6.354.969.005	5.679.243.047
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	3.794.733.450	3.615.807.025
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1	797.285.150	706.490.900
7	Program Pengembangan UMKM	1	2.105.997.850	1.934.323.931
8	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	2	4.815.131.757	4.453.714.579
9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4	25.390.359.182	22.074.484.363
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	3.703.750.620	3.506.337.309
11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2	2.055.181.325	2.019.002.234
12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	2.381.459.311	2.254.579.028
13	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2	1.951.763.702	1.909.018.390
14	Program Pemasaran Pariwisata	1	11.212.656.427	9.896.850.087
15	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	857.692.575	773.864.113
16	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	8.996.628.785	8.388.280.862
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2	60.844.829.310	58.870.716.885
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	16.270.273.483	14.765.072.833
19	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	677.866.994	675.641.688
20	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	61.085.715	52.417.150
21	Program Penyuluhan Pertanian	3	4.325.292.438	3.776.792.549
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6	60.510.367.226	55.392.613.331
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	2.118.682.207	1.962.023.648
24	Program Pengendalian	4	2.050.661.490	1.987.277.824

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
25	Program Penyuluhan Pertanian	2	605.046.510	504.406.707
26	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	2	112.377.800	98.317.289
27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	2.145.057.515	2.096.797.649
28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2	673.163.000	492.728.172
29	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2	3.046.189.426	2.668.790.521
30	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	527.054.178	397.366.500
31	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	6.411.213.139	4.145.322.678
32	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1	121.763.850	109.369.917
33	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1	76.488.450	73.391.210

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **236.736.880.047,-** terealisasi sebesar Rp. **216.904.521.620,-** atau 91,62%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 19.832.358.427 (8,38%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat (98,26%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,62%) dengan tingkat efisiensi 6,64%.



Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah

Untuk menarik investor berinvestasi pada suatu daerah perlu dibangun iklim investasi yang baik pada daerah tersebut. Membangun iklim investasi yang baik memerlukan dukungan dari berbagai hal, baik dari segi kebijakan Pemerintah Pusat ataupun Daerah, Sumber Daya Ekonomi, potensi Sumber Daya Alam yang banyak, ketersediaan tenaga kerja serta dukungan sarana dan prasarana yang baik. Guna mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah yang merupakan misi keempat

RPJMD 2016-2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran **Meningkatnya pertumbuhan Investasi Daerah**. Sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah dengan berperan sebagai ujung tombak yang mampu bertindak lebih kreatif untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.

Persentase pertumbuhan investasi tahun 2021 ditetapkan sebesar 6%. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator *persentase pertumbuhan investasi* masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Pengukuran realisasi investasi diperoleh dari data investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nilai investasi berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi disajikan pada tabel 39.

Tabel 39 Capaian Indikator Sasaran 4.1.2



Indikator kinerja Persentase pertumbuhan investasi ditargetkan tercapai 6%, terealisasi 5,02% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 83,67%, termasuk kategori keberhasilan *baik*.

Realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi diperoleh berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Nilai Investasi tahun 2021 terdiri dari PMA sebesar \$ 66.949,00 ribu atau Rp.977.455.400.000,- (kurs

Rp.14.600/USD) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.4.183.713.900.000,- dengan nilai total investasi sebesar Rp.5.161.169.300.000,-. Perhitungan pertumbuhan investasi 2021 dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Rp. 5.161.169.300.000} - \text{Rp. 4.914.666.060.000}}{\text{Rp. 4.914.666.060.000}} \times 100 = 5,02\%$$

Ket:

1. Realisasi Investasi Tahun 2021 (PMA + PMDN) = Rp. 5.161.169.300.000,-
2. Realisasi Investasi Tahun 2020 = Rp. 4.914.666.060.000,-

Dari total Nilai investasi Sumatera Barat tahun 2021, PMDN berkontribusi sebesar 81,06% sedangkan PMA berkontribusi sebesar 18,94%. Secara total, nilai investasi Sumatera Barat tahun 2021 mengalami peningkatan 5,02% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan PMDN tahun 2021 sebesar 34,59%. Sementara itu, untuk realisasi PMA tahun 2021 (dalam US\$) tumbuh negatif sebesar 46,69% dibanding tahun 2020. Berdasarkan sektor usaha, Realisasi PMA dan PMDN tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 40.

Tabel 40 Realisasi PMA dan PMDN tahun 2021 berdasarkan sektor usaha

No	Sektor usaha menurut Perka No.17 Tahun 2015 BKPM RI	Penanaman Modal Asisng (PMA)		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	
		Ribu USD (ribu)	%	Rupiah (juta)	%
I.	SEKTOR PRIMER	2.764,10	4,13	634.400,60	15,16
1	Tanaman Pangan dan perkebunan	2.725,50	4,07	564.641,00	13,50
2	Peternakan	-	-	-	-
3	Kehutanan	-	-	3.151,50	0,08
4	Perikanan				
5	Pertambangan	38,60	0,06	66.608,10	1,59
II.	SEKTOR SEKUNDER	39.609,40	59,16	796.729,20	19,04
1	Industri Makanan	17.754,50	26,52	354.867,40	8,48
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari kulit dan alas kaki	-	-	1.074,70	0,03
4	Industri kayu	-	-	4.959,00	0,14
5	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia dan Farmasi	20.627,80	30,81	15.260,10	8,49
7	Industri Karet dan Plastik	1.227,00	1,83	355.342,10	8,49
8	Industri Mineral non Logam	-	-	51.384,10	1,23
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	-	-	3.539,40	0,08
10	Industri instrumen kedokteran,	-	-	9.932,30	0,24

No	Sektor usaha menurut Perka No.17 Tahun 2015 BKPM RI	Penanaman Modal Asing (PMA)		Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	
		Ribu USD (ribu)	%	Rupiah (juta)	%
	Presisi, Optik dan jam				
11	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya	-	-	-	-
12	Industri lainnya	-	-	370,10	0,36
III.	SEKTOR TERSIER	24.575,50	36,71	2.752.584,10	65,79
1	Listrik, Gas dan Air	8.717,30	13,02	618.413,70	14,78
2	Konstruksi	-	-	1.048.363,30	25,06
3	Perdagangan dan reparasi	69,30	0,10	77.545,10	1,85
4	Hotel dan restoran	785,20	1,17	253.809,20	6,07
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	14.532,90	21,71	397.353,00	9,50
6	Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran	380,60	0,57	74.089,80	1,77
7	Jasa lainnya	90,20	0,13	283.010,00	6,76
	TOTAL	66.949,00	100,00	4.183.713,90	100,00

Sumber data: D. Penanaman Modal dan PTSP

Informasi yang dapat dijelaskan dari tabel 40 adalah sebagai berikut:

1. Tiga besar sektor usaha yang mendominasi realisasi investasi PMA tahun 2021 yaitu industri kimia dan farmasi sebesar USD 20.627,80 ribu (30,81%), sektor industri makanan sebesar USD 17.754,50 ribu (26,52%), dan sektor transportasi, gudang dan komunikasi sebesar USD 14.532,90 ribu (21,71%).
2. Tiga besar sektor usaha yang mendominasi realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha tahun 2021 yaitu sektor usaha konstruksi sebesar Rp 1.048.363,30 juta (25,06%), sektor usaha listrik, air dan gas sebesar Rp 618.413,70 juta (14,78%) dan sektor tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp 564.641,00 (13,50%).

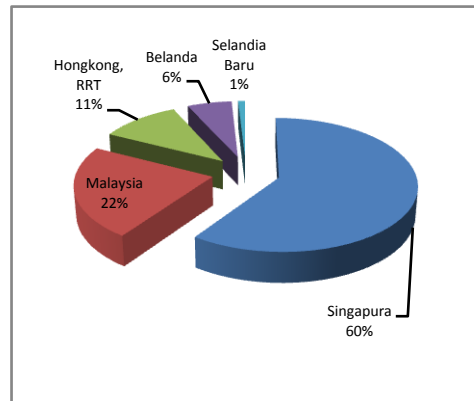
Selain berdasarkan sektor usaha, realisasi PMA juga dilihat berdasarkan Negara penyumbang. Lima Negara penyumbang terbesar Penanaman Modal Asing Tahun 2021 adalah Negara Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 38.872,50 ribu (58,06%), kemudian disusul oleh negara Malaysia dengan nilai investasi sebesar USD 14.737,40 ribu (22,01%), Negara Hongkong, RRT dengan nilai investasi sebesar USD 6.964,70 ribu (10,40%), Negara Belanda sebesar USD 3.856,50 ribu (5,76%), dan Negara Selandia Baru dengan nilai investasi sebesar

USD 616,40 ribu (0,92%). Informasi tersebut digambarkan pada tabel 41 dan grafik 45.

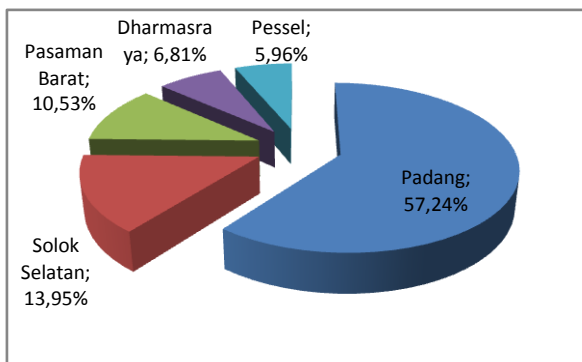
Tabel 41 Realisasi Investasi PMA berdasarkan Negara Tahun 2021

NO	NEGARA	INVESTASI (Ribu USD)	%
1	Singapura	38.872.50	58,06
2	Belanda	3.856,50	5,76
3	Malaysia	14.737,40	22,01
4	Hongkong, RRT	6.964,70	10,40
5	Jerman	456,90	0,68
6	Mauritius	231,80	0,35
7	Australia	270,40	0,40
8	Belgia	57,90	0,09
9	India	79,90	0,12
10	Brasil	168,50	0,25
11	British Virgin Island	445,70	0,67
12	Perancis	102,70	0,15
13	Inggris	7,40	0,01
14	Afrika Selatan	0,30	0,00
15	Korea Selatan	8,40	0,001
16	Amerika Serikat	65,90	0,10
17	Selandia Baru	616,40	0,92
18	RR Tiongkok	5,70	0,01

Grafik 45 Negara Penyumbang PMA terbesar Tahun 2021



Grafik 46 Kabupaten/Kota Penerima PMA terbesar Tahun 2021

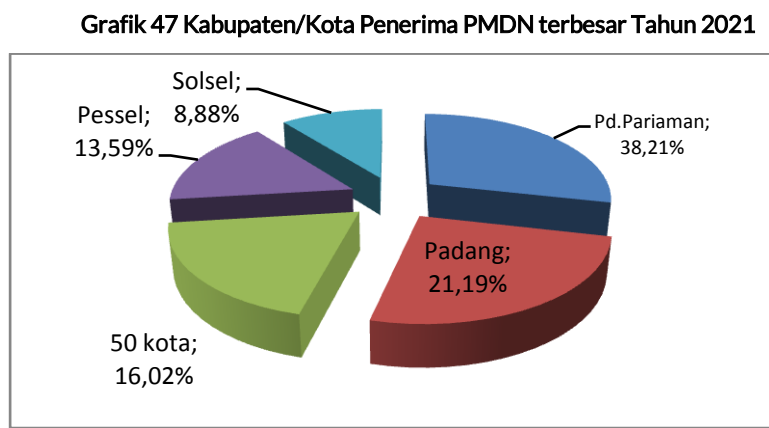


Sumber data: D. Penanaman Modal dan PTSP

Jika dilihat dari daerah penerima Investasi, Kabupaten/Kota penerima Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar tahun 2021 adalah Kota Padang dengan nilai investasi yang diterima sebesar USD 38.324,60 ribu (57,24%), kemudian disusul Kabupaten Solok Selatan dengan nilai investasi sebesar USD 9.341,50 ribu (13,95%), Kabupaten

Pasaman Barat dengan nilai investasi sebesar USD 7.054,90 ribu (10,53%), Kabupaten Dharmasraya dengan Nilai investasi sebesar USD 4.557,80 ribu (6,81%) dan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar USD 3.993,30 ribu (5,96%). Informasi tersebut digambarkan pada grafik 46.

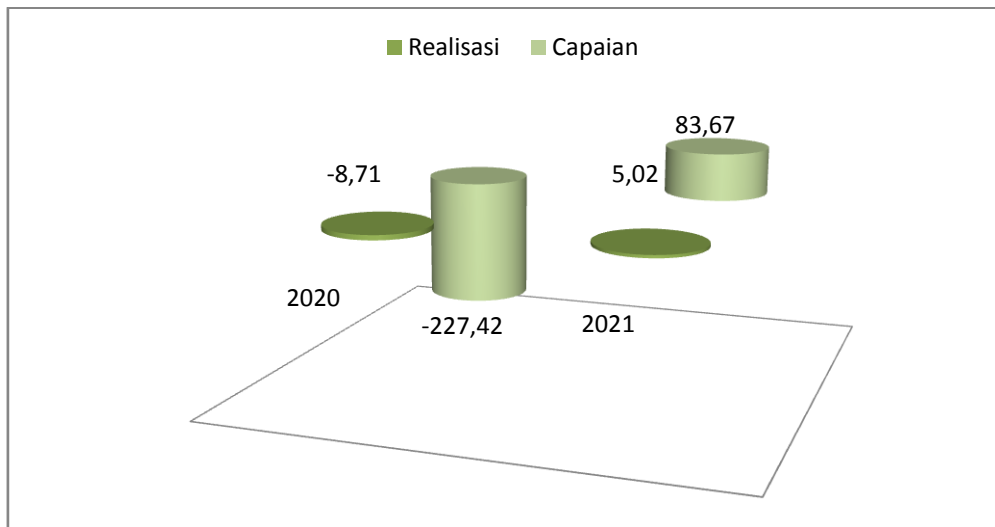
Berbeda dengan PMA, daerah yang menerima PMDN terbesar adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan penerimaan investasi sebesar Rp. 995.818,20 juta (23,80%), kemudian disusul dengan Kota Padang dengan nilai investasi sebesar Rp. 886.614,60 juta (21,19%), Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai investasi sebesar Rp. 670.166,40 juta (16,02%), Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai investasi sebesar Rp. 568.515,10 juta (13,59%) dan Kabupaten Solok dengan nilai investasi sebesar Rp.371.449,70 juta (8,88%) sebagaimana dapat dilihat pada grafik 47.



Sumber data: D. Penanaman Modal dan PTSP

Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*. Capaian indikator kinerja ini sebesar 83,67%, menunjukkan realisasi persentase pertumbuhan investasi tahun 2021 tercapai di bawah target yang direncanakan. Walaupun demikian, dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian tahun 2021 jauh meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada Investasi Sumatera Barat tahun 2021 yang berhasil tumbuh positif pada angka 5,02%. Angka ini meningkat 13,9% dibandingkan angka pertumbuhan tahun 2020 (-8,71%). Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 48.

Grafik 48 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator persentase pertumbuhan investasi tahun 2020-2021

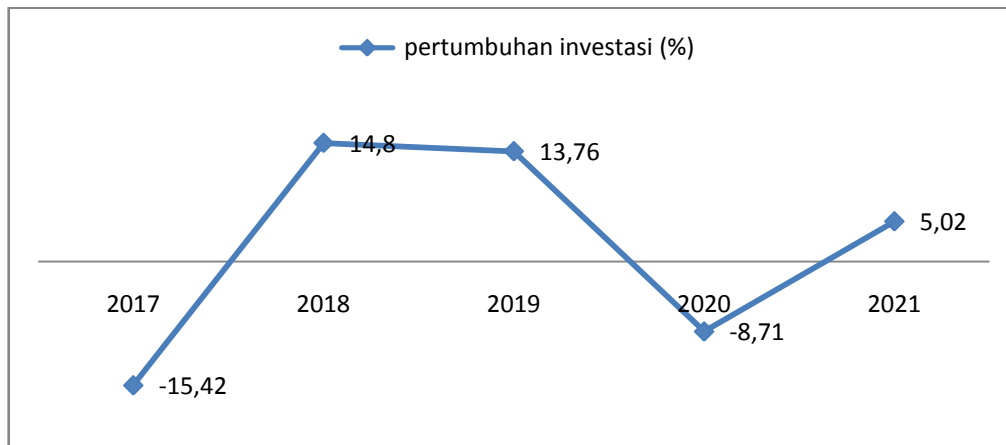


Sumber data: data diolah

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 telah menargetkan nilai investasi meningkat 6%. Sementara itu, realisasi Nilai investasi meningkat 5,02% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan target persentase pertumbuhan investasi tahun terakhir RPJMD 2016-2021 belum tercapai sesuai dengan harapan.

Pertumbuhan investasi di Sumatera Barat sepanjang tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan yang befluktuatif. Pertumbuhan negatif terjadi di tahun 2017 dan 2020 sedangkan pertumbuhan positif terjadi di tahun 2018, 2019 dan 2021. Pertumbuhan investasi tertinggi terjadi di tahun 2018 yang mana pertumbuhan investasinya mencapai 14,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi di Sumatera Barat tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 49.

Grafik 49 Pertumbuhan investasi di Sumatera Barat tahun 2017-2021



Sumber data: data diolah

Keberhasilan Sumatera Barat bangkit dari pertumbuhan investasi negatif pada tahun 2021 ini, banyak dipengaruhi oleh banyak faktor dan usaha, diantaranya:

1. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMA dan PMDN (Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan).
2. Melakukan sosialisasi produk hukum terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.
3. Melakukan revisi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.
4. Melakukan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

Meskipun investasi tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih banyak hambatan yang dihadapi untuk mengajak investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Penanaman Modal sesuai standar.
2. Masih terdapat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sesuai dengan regulasi yang baru.

3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan.
4. Banyaknya perusahaan bidang usaha ketenagalistrikan yang belum merealisasikan investasinya karena belum adanya kesepakatan harga pembelian dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan nilai rencana investasinya cukup besar.
5. Beberapa perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM.
6. Belum *Clear and Cleanny* tanah lokasi untuk berinvestasi disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat.
7. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara *online* melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB.
8. Adanya permasalahan tata ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.
9. Sistem Perizinan *Online Single Submission* (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

Melihat hambatan-hambatan yang terjadi selama ini maka di tahun yang akan datang perlu memaksimalkan kinerja-kinerja berikut, diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan perizinan dan mengupayakan tim teknis yang ada di OPD teknis agar berada di PTSP.
2. Sosialisasi terkait dengan Regulasi Tanah Ulayat ke masyarakat.
3. Pengembangan sistem terkait informasi peta potensi dan peluang investasi dan lokasi berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan bimbingan kepada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing belum memiliki pengetahuan dan pengalaman

dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga menyebabkan belum maksimalnya perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan membuka Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LaKon LKPM).

5. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari untuk menyusun produk hukum dan aturan teknis yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal.
6. Mendorong Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan revisi RTRW yang terbuka terhadap investasi.
7. Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
8. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha atas perizinan secara *online* melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis WEB lewat pendampingan dalam menggunakan aplikasi serta sosialisasi terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 5 Program dengan 5 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **4.988.666.986,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4.1.2. dapat dilihat pada tabel 42.

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.2.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5	4.988.666.986	4.933.083.491
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	581.772.675	572.592.059
2	Program Promosi Penanaman Modal	1	632.068.000	627.365.871
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	2.874.240.186	2.853.635.159
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	821.100.375	800.113.902
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	79.485.750	79.376.500

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **4.988.666.986,-** terealisasi sebesar Rp. **4.933.083.491,-** atau **98,89 %**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 55.583.495 (1,11%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah (83,67%) lebih rendah 15,22% dari realisasi anggaran (98,89%).



Sasaran 4.1.3 Meningkatkan Nilai Ekspor

Ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya nilai ekspor sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai untuk mencapai tujuan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya nilai ekspor adalah nilai ekspor (Juta USD).

Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat menetapkan target ekspor tercapai US\$ 1393,13 juta. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator *nilai ekspor* masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-

2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Target ditetapkan lebih rendah US\$ 138,71 juta dari nilai ekspor tahun 2020 dan meningkat 2% (US\$ 27,32 juta) dari target tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian nilai ekspor tahun 2021, digambarkan pada tabel 43.

Tabel 43 Capaian Indikator Sasaran 4.1.3



Indikator kinerja nilai ekspor ditargetkan tercapai US\$ 1.393,13 juta, terealisasi US\$ 3.066,93 juta dengan tingkat capaian kinerja sebesar 220,15%, termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Data realisasi nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2021 ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik No. 10/02/13/Th.XXV, 2 Februari 2022 tentang Perkembangan ekspor dan impor Sumatera Barat Desember 2021. Realisasi nilai ekspor yang tercapai US\$ 3.066,93 juta menunjukkan kinerja ekspor Sumatera Barat tahun 2021 tumbuh hingga 100,21% (US\$ 1535,09 juta) dibandingkan tahun 2020. Walaupun tahun 2021 masih dimaknai sebagai tahun pandemi Covid-19, namun kinerja ekspor tetap meningkat karena didorong peningkatan harga komoditas global dan semakin pulihnya permintaan global.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, Nilai terbesar ekspor Sumatera Barat adalah kelompok Non Migas. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 44.

Tabel 44 Ekspor Non Migas Sumatera Barat Berdasarkan Beberapa Golongan Barang Tahun 2017-2021

No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US\$)					Kontribusi terhadap nilai ekspor 2021 (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Lemak & minyak Hewan/Nabati	1.416,44	1.139,83	967,45	1.213,58	2.448,73	79,84
2	Karet dan Barang dari Karet	443,48	290,43	229,98	163,75	188,10	6,13
3	Bahan-bahan Nabati	24,00	23,64	31,85	51,06	109,31	3,56
4	Garam, Belerang, Kapur	41,26	65,01	71,40	50,22	64,33	2,10
5	Berbagai produk kimia	38,06	29,90	18,20	33,10	32,52	1,06
6	Buah-buahan	3,11	0,14	1,00	0,48	54,34	1,77
7	Ikan dan Udang	0,25	0,26	0,47	0,13	38,56	1,26
8	Lak, Getah dan Damar	0,03	0,16	0,11	-	41,38	1,35
9	Daging dan Olahan Ikan	0,11	0,16	0,14	-	20,23	0,66
10	Perangkat Musik	0,51	-	-	-	4,23	0,14
Total 10 Gol Barang lainnya		1.967,25	1.549,54	1.320,61	1.304,09	3.001,74	97,87
	Lainnya	79,02	49,07	18,42	-	65,20	2,13
	Total Ekspor	2.046,27	1.598,61	1.339,03	1.531,84	3066,93	100,00
	% Pertumbuhan	19,77	(22,05)	(25,44)	14,39	100,21	

Sumber : BRS No. 10/02/13/Th.XXV, 2 Februari 2022

Golongan lemak dan minyak hewan/nabati berkontribusi paling besar terhadap nilai ekspor yaitu sebesar 79,84% dengan total nilai sebesar US\$2.448,73 juta, kemudian diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 188,10 juta (6,13%). Komoditas yang paling banyak diekspor pada golongan lemak dan minyak hewan/nabati adalah *Refined palm oil*, *Liquid fractions of refined palm oil, with iodine value 55 or more but less than 60*, dan *Crude palm oil*. Selanjutnya pada golongan karet dan barang dari karet, komoditas yang diekspor adalah *Technically Specified Natural Rubber (TSNR) 20* dan *Compounded other rubber with carbon black/sicila, unvulcanised, in primari form*.

Berdasarkan negara tujuannya, Pakistan memiliki pangsa pasar sebesar US\$ 864,65 juta atau 28,19% dari ekspor total Sumatera Barat. Selanjutnya India memiliki pangsa pasar sebesar 15,13% atau sebesar US\$ 463,88 juta. Berikut tabel ekspor Sumatera Barat berdasarkan negara tujuan tahun 2021.

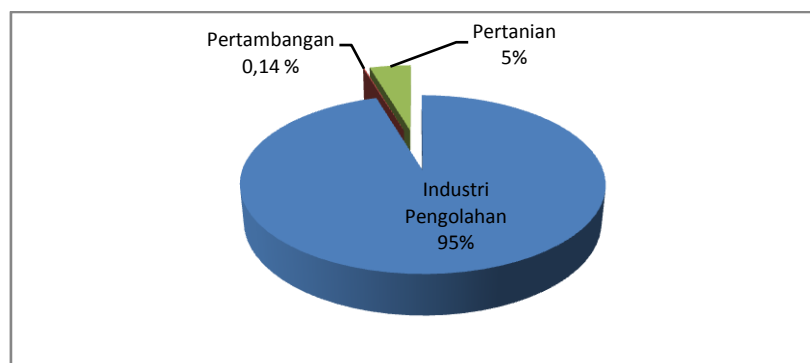
Tabel 45 Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Negara Tujuan	Nilai Ekspor 2021	Peran Terhadap total 2021 (%)
1	Pakistan	864,65	28,19
2	United States	216,65	7,06
3	India	463,88	15,13
4	Bangladesh	297,31	9,69
5	Myanmar	200,47	6,54
6	Japan	94,61	3,08
7	Netherlands	64,41	2,10
8	New Zeland	18,49	0,60
9	Italy	7,68	0,25
10	Malaysia	93,85	3,06
Total 10 Negara Tujuan		2.322,01	75,71
Lainnya		744,93	24,29
Total Ekspor		3.066,93	100,00

Sumber : BRS No. 10/02/13/Th.XXV, 2 Februari 2022

Sektor utama ekspor Sumatera Barat masih didominasi Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 95,32% dari total nilai ekspor atau sebesar US\$ 2.923,38. Pertumbuhan industri pengolahan meningkat seiring dengan tingginya permintaan ekspor komoditas unggulan Sumatera Barat. Nilai ekspor sektor Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 90,99% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh tingginya permintaan komoditas ekspor Sumatera Barat yaitu komoditas CPO. Nilai ekspor asal Sumatera Barat menurut sektor pada tahun 2021 digambarkan pada grafik 50.

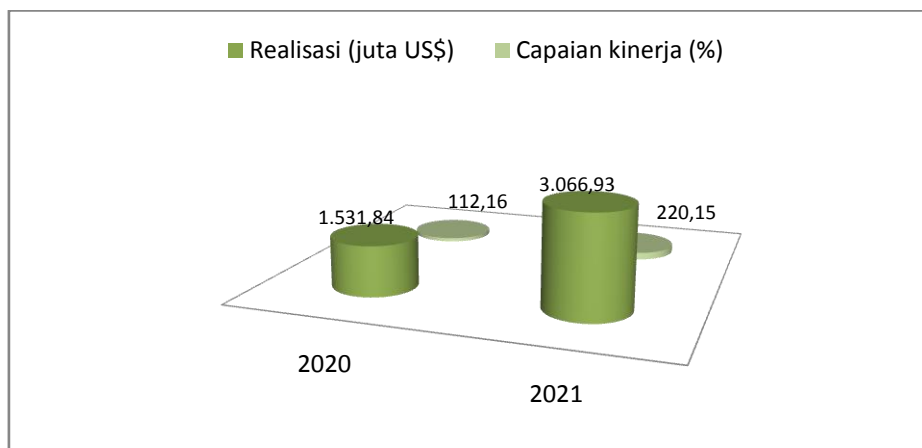
Grafik 50 Struktur Nilai Ekspor asal Sumatera Barat menurut sektor Tahun 2021



Sumber : BRS No. 10/02/13/Th.XXV, 2 Februari 2022

Capaian indikator kinerja nilai ekspor (juta USD) sebesar 220,15% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*. Dengan capaian sebesar 220,15% berarti realisasi nilai ekspor tahun 2021 tercapai di atas target yang direncanakan. Capaian indikator ini di tahun 2021 jauh meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dengan peningkatan 107,99%. Hal yang sama juga terjadi pada nilai ekspor di tahun 2021 yang meningkat sebesar US\$ 1535,09 juta atau 100,21% dibandingkan dengan tahun 2020. Nilai ekspor yang tercapai US\$ 3066,93 juta menunjukkan target tahun terakhir RPJMD 2016-2021 tercapai dengan sangat memuaskan. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja nilai ekspor tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 51.

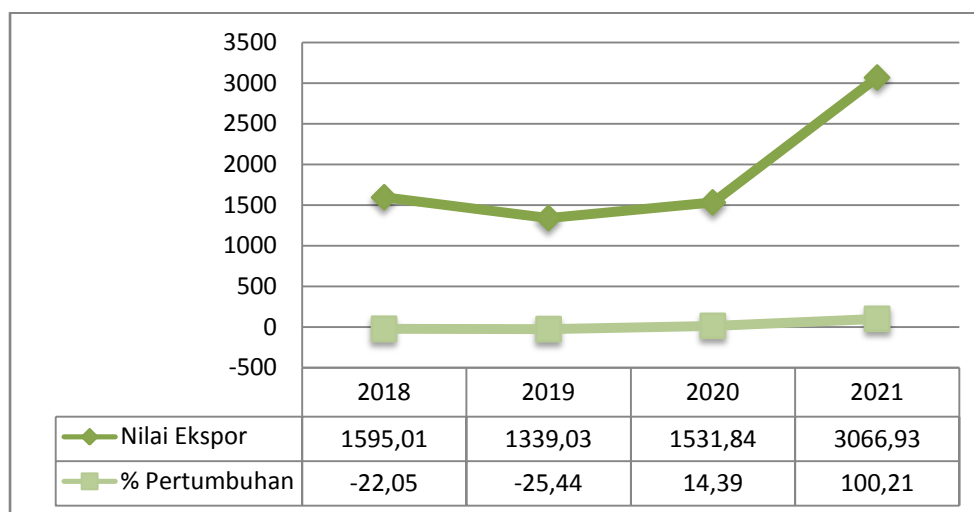
Grafik 51 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Ekspor tahun 2020-2021



Sumber data: data diolah

Jika dibandingkan dengan kinerja nilai ekspor selama beberapa tahun terakhir, kinerja ekspor tahun 2021 tumbuh paling tinggi begitupun dengan nilai realisasinya. Gambaran Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021 disajikan pada grafik 52.

Grafik 52 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021



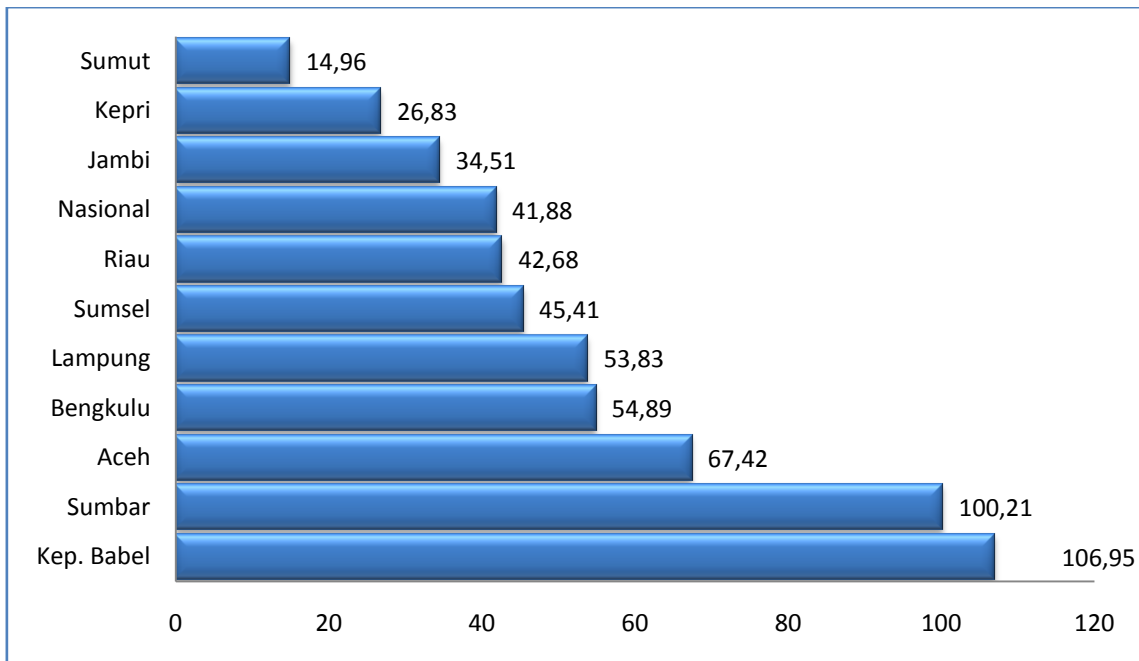
Sumber data: Berita Resmi Statistik

Ekspor Indonesia memang sempat terpuruk sejak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terjadi pada tahun 2018. Hal ini berpengaruh terhadap menurunnya harga komoditas utama ekspor Sumatera Barat yaitu CPO. Hal ini berdampak pada merosotnya pertumbuhan ekspor di tahun 2018 yang berkontraksi sebesar 22,05% dan berlanjut hingga tahun 2019 dengan kontraksi kinerja ekspor sebesar 25,44%. Pandemi Covid-19 yang merebak pun sempat memperparah keadaan. Namun meski pandemi belum berakhir, kinerja ekspor mulai menemukan momentum pada triwulan III hingga IV tahun 2020, yaitu sejumlah harga komoditas utama mengalami kenaikan yang cukup tajam. Faktor ini membuat kinerja ekspor pada tahun 2020 tumbuh positif sebesar 14,39%. Kondisi ini pun masih berlanjut hingga tahun 2021, kinerja ekspor makin menggembirakan. Nilai ekspor mencapai US\$ 3066,93 juta atau tumbuh sebesar 100,21%, tertinggi sejak lima tahun belakangan.

Nilai ekspor Nasional tahun 2021 adalah sebesar US\$ 231.540,8. Terhadap nilai ekspor Nasional tersebut Provinsi Sumatera Barat berkontribusi sebesar 1,32%. Jika dibandingkan dengan nilai ekspor provinsi lain di Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada pada posisi keenam setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Kemudian, jika dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan ekspor Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 100,21% jauh di atas pertumbuhan Nasional

sebesar 41,88% dan berada pada peringkat tertinggi kedua secara regional setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kinerja ekspornya tumbuh sebesar 106,95%. Pertumbuhan nilai ekspor Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional digambarkan pada grafik 53.

Grafik 53 Pertumbuhan Nilai Ekspor Provinsi di Pulau Sumatera dengan Nasional Tahun 2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik

Peningkatan Nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2021 yang semakin membaik didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Pertumbuhan ekspor didorong oleh berangsur pulihnya aktivitas dagang global khususnya negara mitra dagang Sumatera Barat karena mulai pulihnya ekonomi Tiongkok dan beberapa negara Eropa dari pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi beberapa negara tujuan tersebut mendorong peningkatan permintaan komoditas utama seperti CPO.
2. Kinerja ekspor tahun 2021 terbantu oleh kenaikan harga komoditas utama Sumatera Barat yang cukup tajam.
3. Ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 meningkat sejalan dengan perbaikan ekonomi pasca membaiknya situasi pandemi COVID-19 sehingga tidak lagi menghalangi aktivitas masyarakat.

Dilain sisi juga terdapat beberapa faktor yang menghambat peningkatan nilai ekspor secara maksimal, diantaranya adalah:

1. Kinerja volume ekspor Sumatera Barat sebenarnya belum meningkat signifikan, peningkatan nilai 2 tahun ini masih mengandalkan peningkatan harga komoditas.
2. Mayoritas produk ekspor komoditas Sumbar masih bertumpu pada *primary product* dan teknologi yang digunakan belum terlalu canggih sehingga memiliki nilai tambah yang rendah.
3. Daya saing produk yang dihasilkan masih relatif rendah baik dari kemasan, sertifikasi mutu produk (GMP, halal, SNI) dan sertifikasi komoditi ekspor potensial (sertifikat kesesuaian mutu).
4. Kapasitas produksi yang dihasilkan oleh pelaku usaha Sumatera Barat masih terbatas.
5. Negara tujuan ekspor sebagian besar masih terpaut ke negara tujuan nasional.
6. Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sehingga berpengaruh terhadap permintaan luar negeri.
7. Masuknya pasokan karet dengan kualitas yang lebih baik dari Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar ke pasar dunia yang letak geografisnya lebih dekat dengan negara pengguna seperti Tiongkok, Jepang dan Korea sehingga biaya distribusinya lebih murah.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya agar nilai ekspor terus meningkat diantaranya dengan memfokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha bagi perdagangan luar negeri, yakni melalui:

1. Meningkatkan standar dan mutu komoditi ekspor melalui pengujian mutu, peningkatan pengawasan mutu komoditi potensial ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian komoditi ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji.
2. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha ekspor tentang prosedur perdagangan luar negeri melalui bimbingan teknis dan temu usaha.

3. Melakukan diversifikasi pasar produk potensial ekspor Sumatera Barat ke negara dagang non konvensional melalui pameran produk ekspor ke luar negeri.
4. Penyediaan data dan informasi perdagangan luar negeri melalui pembuatan buku data dan *booklet*.

Untuk kedepannya, agar nilai ekspor terus mengalami peningkatan, akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan hilirisasi industri pada komoditas unggulan Sumatera Barat serta diversifikasi terhadap produk yang berorientasi ekspor.
2. Secara konsisten meningkatkan standar dan mutu komoditi dan atau produk ekspor.
3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha industri melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
4. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai ekspor, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Program Pengembangan Ekspor dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. 18.050.800,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan mendukung sasaran meningkatnya nilai ekspor. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4.1.3 dapat dilihat pada tabel 46.

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.3.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Nilai Ekspor	1	18.055.800	16.220.800
1	Program Pengembangan Ekspor	1	18.055.800	16.220.800

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 18.050.800,- dan terealisasi Rp. 16.220.800,- atau 89,83%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. Rp.1.835.000 (10,17%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya nilai ekspor (220,15%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (89,83%) dengan tingkat efisiensi 130,32%.

Sasaran 4.1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Tahun 2021, pemerintah masih mempunyai PR besar dalam mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran akibat dampak negatif pandemi Covid-19. Kemiskinan merupakan suatu masalah multidimensional. Selain sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan, juga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan dan pengangguran mengharuskan semua komponen, stakeholder terkait, dan juga termasuk masyarakat itu sendiri mempunyai peran untuk mengatasinya.

Beragam kebijakan telah diterapkan untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak negatif pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ketenagakerjaan tetap dilanjutkan agar target pengentasan kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai. Pencapaian sasaran strategis menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat dilihat pada tabel 47.

Tabel 47 Capaian indikator kinerja tujuan 4.1



Berdasarkan 2 indikator tersebut, sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran tercapai dengan capaian 104,16% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Berikut diuraikan penjelasan masing-masing indikator:

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 ditargetkan akan tercapai 6,40%. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator *nilai ekspor* masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di 2020 sebesar 6,56%, target tahun 2021 ini ditetapkan menurun 0,16% yaitu sebesar 6,40 %.

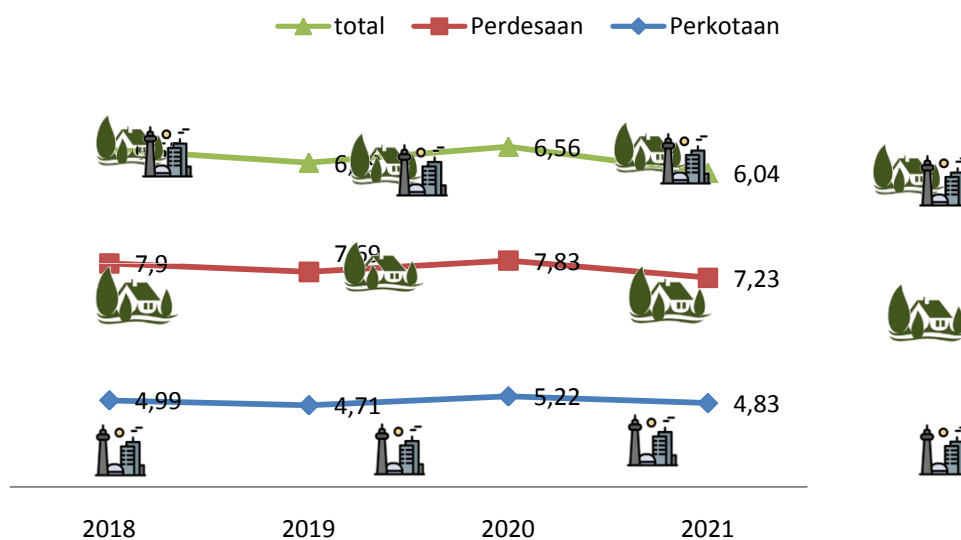
Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar 6,40% terealisasi 6,04% dengan tingkat capaian sebesar 105,63% termasuk kategori keberhasilan *sangat memuaskan*. Realisasi ini diukur berdasarkan data tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 05/01/13/ThXXV tanggal 17 Januari 2022.

Konsep atau pendekatan yang digunakan BPS tentang kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin digunakan garis kemiskinan September 2021 yaitu Rp. 579.545,- (kapita/bulan). Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar Rp. 32.305 di tahun 2021 (yoy). Garis Kemiskinan ditentukan oleh dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Terkait dengan tingkat kemiskinan 6,56% dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 2021 (September 2021) mencapai 339,93 ribu jiwa, berkurang sebesar 24,86 ribu jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 (September 2020). Terjadi penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase.
2. Berdasarkan daerah asal, jumlah penduduk miskin perkotaan lebih rendah dari perdesaan. Pada perkotaan jumlah penduduk miskin sebanyak 134,53 ribu jiwa atau sebesar 4,83% dari total penduduk miskin tahun 2021. Angka ini menurun sebanyak 6,78 ribu jiwa dibanding tahun lalu. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 205,39 ribu jiwa (7,23%) juga mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebanyak 18,08 ribu jiwa, sebagaimana disajikan pada grafik 54.

Grafik 54 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin menurut Daerah September 2020-September 2021



Sumber data : Berita Resmi Statistik Nomor 05/01/13/ThXXV tanggal 17 Januari 2022.

3. Pada tahun 2021, Garis Kemiskinan pada daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada daerah perkotaan 2021 (September 2021) meningkat 4,73% dibanding tahun 2020 (September 2020). Begitupun pada daerah perdesaan 2021 meningkat 6,90% dibanding tahun 2020. Jika memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2021 sebesar 75,63%. Kondisi ini digambarkan pada tabel 48.

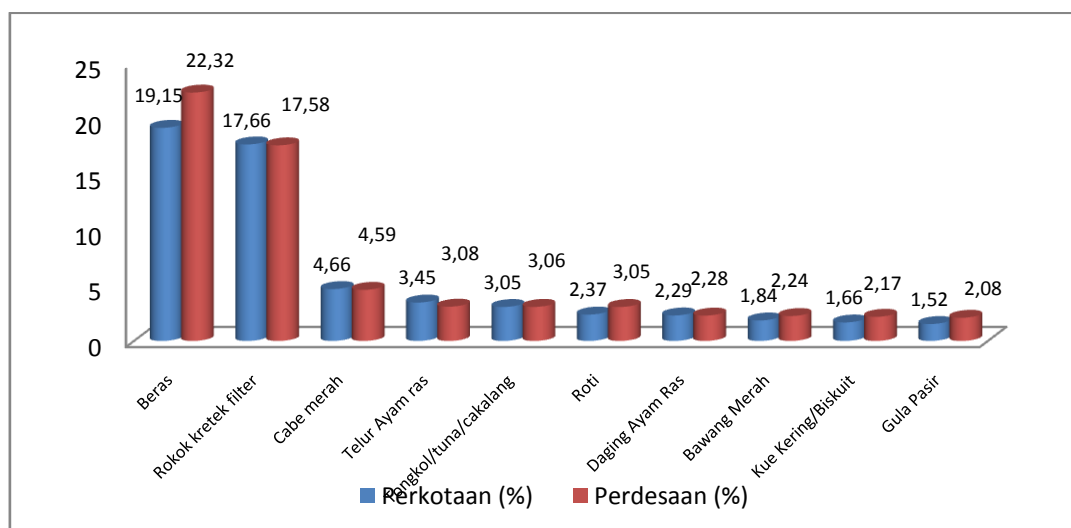
Tabel 48 Tabel Garis Kemiskinan Tahun 2020-2021

Daerah	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
		Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan	September 2020	413.073	152.458	565.531
	September 2021	431.008	161.294	592.302
Perdesaan	September 2020	416.419	113.254	529.673
	September 2021	444.693	121.531	566.224
Total	September 2020	414.949	132.291	547.240
	September 2021	438.308	141.237	579.545

Sumber data : Berita Resmi Statistik Nomor 05/01/13/ThXXV tanggal 17 Januari 2022.

- Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar dalam komponen komoditi penyusun GK, sebesar 19,15% di perkotaan dan 22,32% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK (17,66% di perkotaan dan 17,58 di perdesaan). Komoditi penyumbang terbesar ketiga adalah cabe merah (4,66% di perkotaan dan 4,59% di perdesaan). Daftar komoditi makanan yang berkontribusi terhadap garis kemiskinan disajikan pada grafik 55.

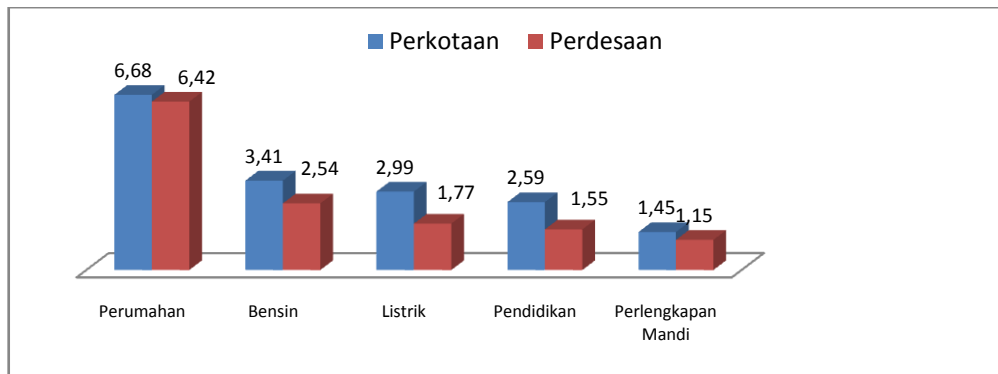
Grafik 55 Daftar Komoditi Makanan Yang Berkontribusi Terhadap Garis Kemiskinan



Sumber data : Berita Resmi Statistik Nomor 05/01/13/ThXXV tanggal 17 Januari 2022.

5. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan serta perlengkapan mandi. Daftar komoditi bukan makanan yang berkontribusi terhadap garis kemiskinan disajikan pada grafik 56.

Grafik 56 Daftar Komoditi Non Makanan Yang Berkontribusi Terhadap Garis Kemiskinan

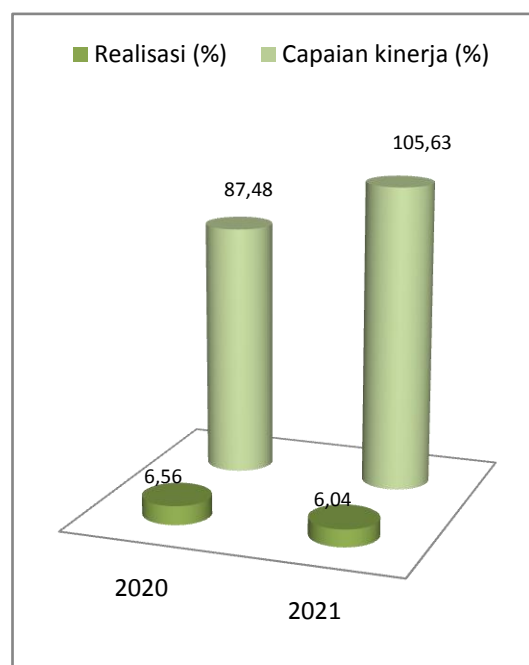


Sumber data : Berita Resmi Statistik Nomor 05/01/13/ThXXV tanggal 17 Januari 2022.

Capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2020-2021 kemiskinan sebesar 105,63% diukur digambarkan pada grafik 57.

menggunakan *metode pengukuran kriteria yang kedua*. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 18,15% di tahun 2021. Tingkat kemiskinan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,52%. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin berkurang di tahun 2021. Tingkat kemiskinan yang tercapai 6,04% menunjukkan tingkat kemiskinan yang ditargetkan pada tahun terakhir RPJMD 2016-2021 tercapai melebihi target yang ditetapkan. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat

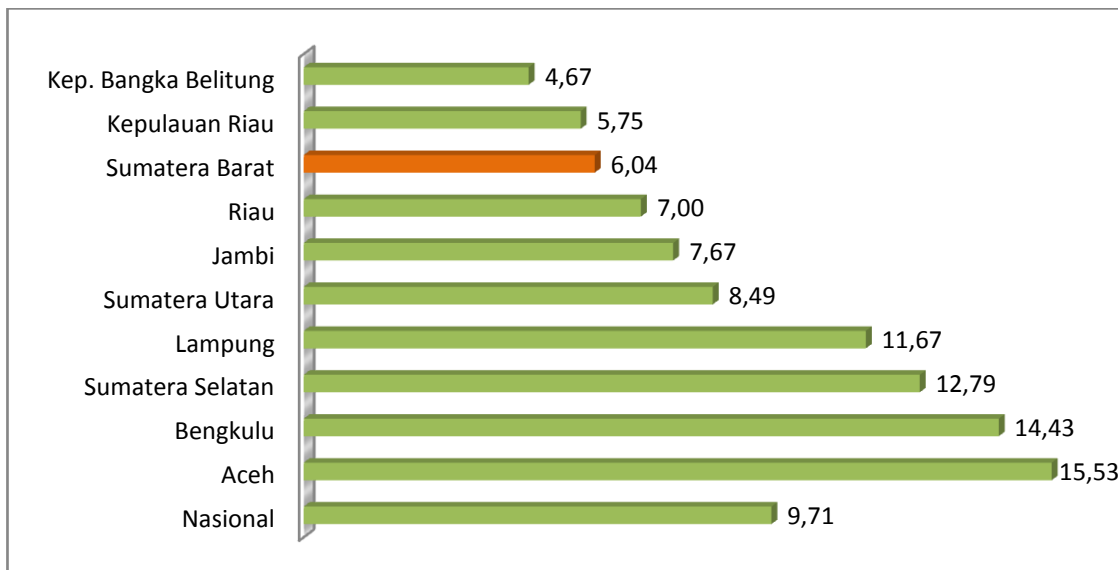
Grafik 57 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator tingkat kemiskinan tahun 2020-2021



Sumber data: data diolah

Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat 3,67 lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara Nasional dan berada di urutan ke tiga terendah dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi Bangka Belitung (4,67%), Provinsi Kepulauan Riau (5,75%). Gambaran perbandingan tingkat kemiskinan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 58

Grafik 58 Tingkat Kemiskinan Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber data : Berita Resmi Statistik Nomor 05/01/13/ThXXV tanggal 17 Januari 2022.

Menurunnya angka kemiskinan Sumatera Barat di tahun 2021 dipengaruhi banyak faktor diantaranya :

1. Ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 3,29%, angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 1,60%, setelah terpukul akibat pandemi Covid-19. Bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi barang ataupun jasa mendorong pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,97% dibanding tahun lalu.
3. Selama periode Maret 2021-September 2021, angka inflasi umum di Sumatera Barat tercatat sebesar -0,10%.

4. Meningkatnya pendapatan petani dalam kurun waktu 1 tahun ini yang terlihat dari nilai NTP September 2021 sebesar 110,69, lebih tinggi dibandingkan NTP Maret 2021 yang sebesar 105,57. NTP di atas 100 menunjukkan harga yang diterima petani lebih besar dari yang dibayarkan.
5. Menurunnya kasus covid-19 harian sejak September 2021.

Walaupun sudah menunjukkan kinerja peningkatan, dalam menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2021 masih banyak ditemukan hambatan yaitu:

- a. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 masih berlanjut di tahun 2021 dengan kemunculan varian Delta, sehingga pemerintah kembali menerapkan PPKM yang memberi dampak pada aktivitas ekonomi masyarakat seperti pengurangan pertemuan, pesta, perjalanan, dan memilih berbelanja secara daring/*Online*. Akibatnya, usaha jasa penyewaan gedung, pemesanan catering, percetakan, pelayanan transportasi hotel dan lainnya menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- b. Secara umum jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase telah terjadi penurunan dibanding tahun 2020 memang tak terbantahkan. Namun pada sisi lain, secara parsial, diparitas kemiskinan antar wilayah perkotaan dan perdesaan di Sumatera Barat terlihat masih tinggi. Hal ini tercermin dari data BPS dimana tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 4,83% sedangkan diperdesaan 7,23%. Fakta ini juga seiring dengan memburuknya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah perdesaan. Berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di perkotaan yang semakin menurun, di perdesaan malah semakin meningkat. Tercatat indeks kedalaman kemiskinan pada September 2021 di perdesaan sebesar 1,177 lebih tinggi 0,435 dari perkotaan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan diperdesaan sebesar 0,308 lebih tinggi 0,167 dari perkotaan.

Guna mengatasi peningkatan angka kemiskinan, telah dilakukan beberapa upaya di tahun 2021 ini dan tetap akan dilaksanakan kedepannya. Upaya ini antara lain:

- a. Struktur APBD Sumatera Barat tahun 2021 (baik murni maupun perubahan) tetap memprioritaskan bagi program/kegiatan yang mengarah pada pemulihan ekonomi masyarakat akibat dari dampak Covid-19.
- b. Meningkatkan verifikasi dan sinkronisasi dalam rangka pemutakhiran data DTKS di Kabupaten/Kota. Salah satu aspek penting untuk mendukung penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan. Apalagi dalam menghadapi pandemi covid-19, peran desa dalam menahan laju peningkatan kemiskinan juga demikian besar. Menjaga daya beli desa, meningkatkan kinerja, serta potensi desa perlu terus didorong.
- d. Penguatan sektor pertanian melalui kebijakan stimulus produksi dan harga jual komoditas hasil pertanian. Keberadaan penduduk miskin di perdesaan tentu berkorelasi dengan sektor pertanian. Berdasarkan data BPS sebagian besar rumah tangga di Sumatera Barat bekerja di sektor pertanian dengan persentase sebesar 34,70% (Agustus 2021).
- e. Mendorong peningkatan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan meningkatkan nilai tambah dan produktifitas usaha perdagangan dan industri kecil/menengah.
- f. Pemulihan sektor Pariwisata Sumatera Barat yang masih terdampak pandemi covid-19 apalagi pada triwulan III 2021 kasus harian kembali meningkat setelah munculnya varian delta. Dengan memaksimalkan potensi keelokan alam, budaya dan kulinernya telah membangkitkan kembali sektor pariwisata Sumatera Barat walaupun masih melambat. Diharapkan pada tahun 2022 sektor pariwisata akan semakin tumbuh positif.
- g. Melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya seperti BAZNAS daerah dan juga LAZ daerah untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan penduduk kemiskinan di wilayahnya dengan mengkombinasikan program-program

sosial dari pemerintah daerah dengan program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada pada lembaga zakat.

- h. Melaksanakan program jangka panjang dengan memberikan keringanan mengakses permodalan, infrastruktur penunjang, dan penciptaan iklim pasar yang kondusif.

2. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Untuk tahun 2021, tingkat pengangguran ditargetkan 6,7%. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator *tingkat pengangguran* masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran tahun 2020 (6,88%), target 2021 ditetapkan menurun 0,18 %.

Tingkat pengangguran tahun 2021 ditargetkan 6,7%, terealisasi sebesar 6,52% dengan tingkat capaian sebesar 102,69% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data tingkat pengangguran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor 59/11/13/Th XXIV, tanggal 5 November 2021. Tingkat pengangguran Sumatera Barat sebesar 6,52% berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang yang menganggur. Tingkat pengangguran diukur dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja pada periode Agustus tahun 2021 dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{179.950 \text{ orang}}{2.761.390 \text{ orang}} \times 100 = 6,52\%$$

Ket:

$$\begin{aligned} \text{Angka Pengangguran (Agustus 2021)} &= 179.950 \text{ orang} \\ \text{Angkatan Kerja (Agustus 2021)} &= 2.761.390 \text{ orang} \end{aligned}$$

Pada Agustus 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 63.190 orang dari periode yang sama di tahun 2021 (Februari 2021) menjadi 4.077.630 orang. Dari penduduk usia kerja tersebut 2.761.390 orang tergolong angkatan kerja (67,72%) dan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Agustus 2020), jumlah angkatan kerja tahun 2021 ini menurun 10.740 orang. Sementara itu, untuk jumlah bukan angkatan kerja pada Agustus 2021 mengalami kenaikan sebanyak 71.600 dibandingkan dengan periode Agustus 2020. Seiring dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2021 periode Agustus juga mengalami penurunan dengan penurunan sebesar 1,29% dibandingkan periode Agustus 2020 (69,01%).

Untuk jumlah penduduk yang bekerja periode Agustus 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Agustus 2020 dengan jumlah penurunan sebesar 80 orang. Begitupun dengan jumlah pengangguran yang juga mengalami penurunan dengan jumlah penurunan sebesar 10.660 orang di tahun 2021 atau 0,36%. Tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Sumatera Barat tahun 2020-2021 disajikan pada tabel 49.

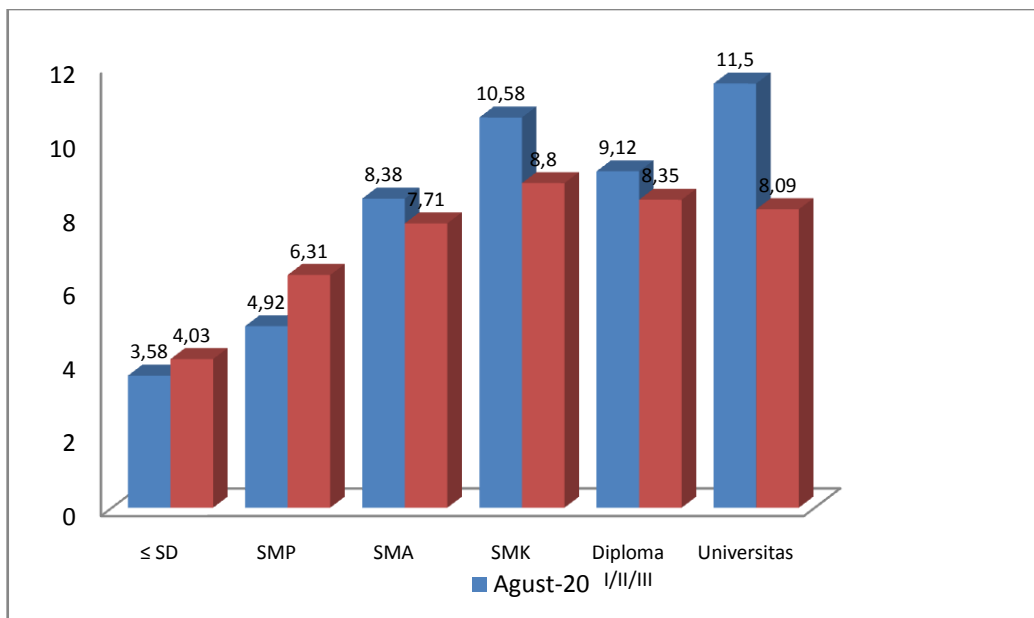
Tabel 49 Tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2020-2021

Status Ketenagakerjaan	Agustus 2020 (Ribuan orang)	Agustus 2021 (Ribuan orang)	Perubahan 1 Tahun (Agust 2021-Agust 2020)	
			Ribuan (Orang)	%
Penduduk Usia Kerja	4.016,78	4.077,63	60,85	1,51
1. Angkatan Kerja	2.772,13	2.761,39	-10,74	-0,39
Bekerja	2.581,52	2.581,44	-0,08	0,00
Pengangguran	190,61	179,95	-10,66	-5,59
2. Bukan Angkatan Kerja	1.244,64	1.316,24	71,59	5,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,88	6,52		-0,36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,01	67,72		-1,29

Sumber data : Berita Resmi Statistik No.59/11/13/Th.XXIV, 5 November 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan, pada Agustus 2021 tingkat pengangguran dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,80%. Sementara tingkat pengangguran yang paling rendah berasal dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 4,03%. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan SD ke bawah (32,27%) lebih tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan Diploma dan Universitas 16,49%. Gambaran tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 59.

Grafik 59 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2020-2021



Sumber data : Berita Resmi Statistik No.59/11/13/Th.XXIV, 5 November 2021

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (8,65%) lebih tinggi hampir dua kali TPT di daerah perdesaan (4,50%). Untuk 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi berada pada Kota Padang yaitu sebesar 13,37%, disusul oleh Kota Payakumbuh (6,47%) dan Kota Sawahlunto (6,38%). TPT terendah berada di Kabupaten 50 Kota. Berikut penyajian rinci tingkat pengangguran terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tabel 50.

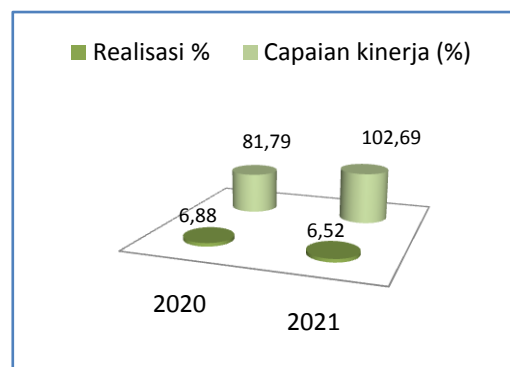
Tabel 50 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan (%)
Kepulauan Mentawai	3,98	2,79	-1,19
Pesisir Selatan	7,00	5,97	-1,03
Solok	4,65	4,67	0,02
Sijunjung	5,30	3,57	-1,73
Tanah Datar	4,79	4,63	-0,16
Padang Pariaman	8,13	8,41	0,28
Agam	4,61	5,06	0,45
Lima Puluh Kota	3,03	2,25	-0,78
Pasaman	5,04	4,92	-0,12
Solok Selatan	5,62	4,84	-0,78
Dharmasraya	5,31	5,00	-0,31
Pasaman Barat	4,69	5,02	0,33
Kota			
Padang	13,64	13,37	-0,27
Kota Solok	8,35	5,15	-3,20
Sawahlunto	8,20	6,38	-1,82
Padang Panjang	7,22	4,90	-2,32
Bukittinggi	7,51	6,09	-1,42
Payakumbuh	6,68	6,47	-0,21
Pariaman	5,73	6,09	0,36
Sumatera Barat	6,88	6,52	-0,36

Sumber data : Berita Resmi Statistik No.59/11/13/Th.XXIV, 5 November 2021

Capaian indikator kinerja tingkat pengangguran sebesar 102,69% diukur menggunakan *metode pengukuran kriteria yang kedua*. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja tingkat pengangguran mengalami peningkatan 20,9%. Secara absolut tingkat pengangguran juga mengalami penurunan 10.660 orang atau 0,36% di tahun 2021.

Grafik 60 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Pengangguran tahun 2020-2021

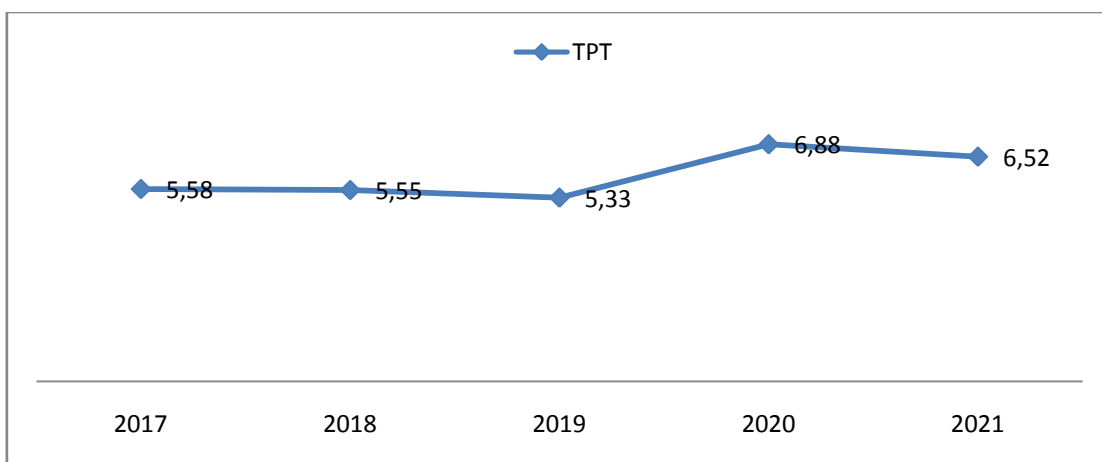


Sumber data: data diolah

Dengan tingkat pengangguran yang 6,52% berarti target tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 dapat dicapai dengan baik dengan selisih lebih tinggi 0,18%. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat pengangguran tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 60.

Tingkat pengangguran Sumatera Barat tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, menurun pada tahun 2017-2019 dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2020 dan kembali menurun di tahun 2021. Peningkatan sebesar 1,55% di tahun 2020 salah satunya dikarenakan pandemi covid 19 yang berkembang cepat di sepanjang tahun 2020, dan mulai membaik di akhir 2021. Perkembangan tingkat pengangguran Sumatera Barat tahun 2017-2021 digambarkan pada grafik 61.

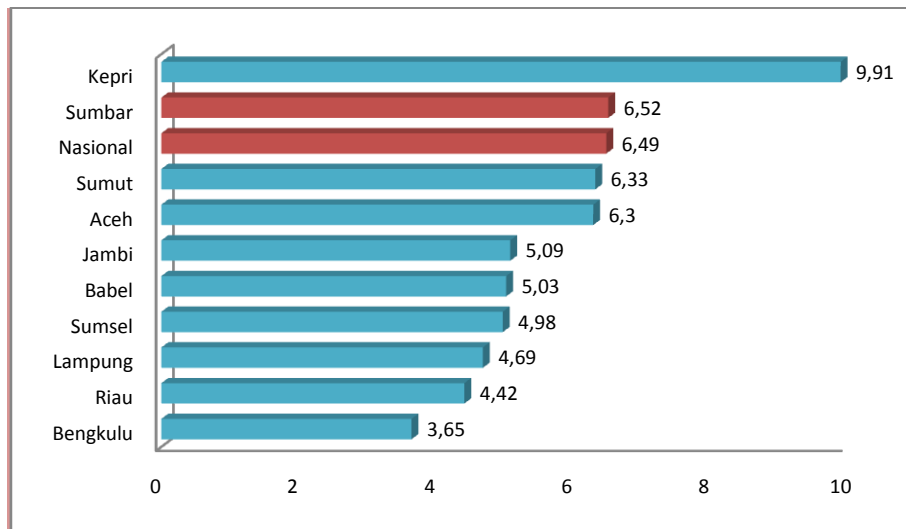
Grafik 61 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat Tahun 2017-2021



Sumber data: Berita Resmi Statistik 2017-2021

Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran secara Nasional, tingkat pengangguran Sumatera Barat lebih tinggi 0,03%. Sementara itu dari 10 Provinsi yang ada di regional Sumatera, tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat berada di urutan kedua tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat pengangguran terendah berada di Provinsi Bengkulu, disusul oleh Provinsi Riau dan Provinsi Lampung. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Kepulauan Riau. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional disajikan pada grafik 62.

Grafik 62 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Agustus 2021



Sumber Data : Berita Resmi Statistik

Dalam hal menurunkan tingkat pengangguran, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan, pemagangan, akreditasi LPK, penempatan tenaga kerja baik formal maupun informal.
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja.
3. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui entrepreneur (Wira Usaha Baru dan Wira Usaha Produktif) melalui pelatihan kewirausahaan.
 - Jumlah Wira Usaha Baru yg didampingi dan dilatih 24 orang
 - Jumlah Wira Usaha Produktif yg didampingi dan dilatih 100 orang
4. Peningkatan kemitraan penempatan peluang kerja keluar daerah sebanyak 1.199 orang dan ke luar negeri sebanyak 304 orang (tahun 2021).

Dalam menurunkan tingkat pengangguran masih ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Masih kurangnya perusahaan besar yang berada di Sumatera Barat sehingga kurangnya penempatan Angkatan Kerja.
2. Masih adanya ketidaksesuaian (disparitas) antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi calon tenaga kerja.

3. Masih rendahnya daya saing Tenaga Kerja di Sumatera Barat.
4. Budaya masyarakat dalam memilih-milih pekerjaan masih tinggi.
5. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas Lembaga Pelatihan Kerja di Sumatera Barat. Dari 187 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), 106 LPK sudah terakreditasi dan 81 LPK belum terakreditasi.

Untuk kedepannya, penurunan tingkat pengangguran diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan upaya berikut ini:

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja di Sumatera Barat melalui pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri (DUDI) dan meningkatkan kompetensi LPK.
2. Meningkatkan kerjasama dan komitmen pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menggiatkan pariwisata.
3. Perbaiki tingkat pendidikan masyarakat (angkatan kerja).

Untuk mencapai sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 16 Program dengan 25 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **62.657.512.063,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4.1.4. dapat dilihat pada tabel 51.

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.4.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	25	62.657.512.063	58.947.347.020
1	Program Pemberdayaan Sosial	1	6.979.202.515	4.758.083.767
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1	2.691.100	2.691.100
3	Program Rehabilitasi Sosial	4	25.373.065.696	24.979.383.704
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	774.248.510	601.397.250

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
5	Program Penanganan Bencana	1	321.894.400	280.490.812
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	44.159.000	44.141.560
7	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	1.173.343.050	1.169.915.700
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	6.448.435.315	6.290.090.783
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	7.622.420.034	7.349.940.594
10	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1	22.282.000	22.282.000
11	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	218.048.875	217.632.875
12	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1	146.782.000	146.461.600
13	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3	11.136.692.168	10.824.306.921
14	Program Penempatan Tenaga Kerja	2	680.456.100	666.447.811
15	Program Hubungan Industrial	3	569.813.300	531.383.667
16	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	1.143.978.000	1.062.696.876

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **62.657.512.063,-** terealisasi sebesar Rp. **58.947.347.020,-** atau **94,08%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.710.165.043 (5,92%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran (104,16%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,08%) dengan tingkat efisiensi sebesar 10,08%.

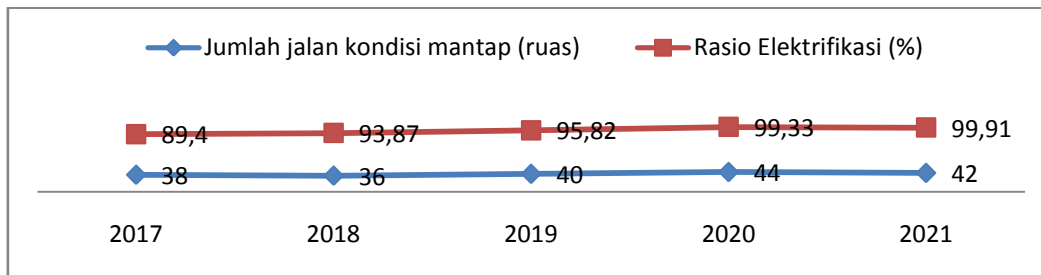
MISI 5 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan 5.1 Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan pengembangan wilayah

Untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah diperlukan infrastruktur penunjang perekonomian. Infrastruktur tersebut antara lain jalan, jembatan, jaringan listrik dan irigasi. Infrastruktur jalan dan jembatan untuk menciptakan konektivitas dan aksesibilitas antara daerah/wilayah, infrastruktur ketenagalistrikan untuk memastikan pemerataan energi ketenagalistrikan, serta irigasi yang bermanfaat untuk pengairan daerah pertanian. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan **“meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah”** menjadi tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan misi 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Pencapaian tujuan ini antara lain dilakukan melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jaringan listrik serta pemeliharaan irigasi

Untuk mengukur tercapainya tujuan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil dari indikator sasaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Indikator yang digunakan adalah jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap dan rasio elektrifikasi. Perkembangan indikator tersebut dari tahun 2017-2021 digambarkan pada grafik 63.

Grafik 63 Perkembangan indikator Tujuan 5.1



Sumber Data : Berita Resmi Statistik

Berdasarkan grafik tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap (kondisi mantap >72%, tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Menurun di tahun 2018 dan 2021, dan meningkat dari tahun 2018-2020. Dengan jumlah ruas jalan mantap >72% sebanyak 42 ruas jalan di tahun 2021, berarti 72,42% dari 58 ruas jalan Provinsi memiliki kondisi mantap >72%.
2. Tahun 2017-2021, rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut adalah sebesar 2,63% pertahun. Dengan kondisi rasio elektrifikasi 99,91% di tahun 2021 (hampir 100%), berarti hanya tersisa 0,09% rumah tangga yang belum terlistriki (dengan catatan jumlah RT tidak mengalami penambahan).

Berdasarkan realisasi ke dua indikator tersebut, dapat disimpulkan tujuan **“Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan pengembangan wilayah”** dapat dicapai dengan baik. Walaupun demikian, pemeliharaan dan pembangunan jalan serta pembangunan jaringan listrik akan terus dilaksanakan untuk menunjang perekonomian Sumatera Barat.

Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan pengembangan wilayah”** telah ditetapkan tiga sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi dan analisis 3 sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:



Sasaran 5.1.1 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Konektivitas wilayah diartikan sebagai terhubungnya suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu daerah/negara. Konektivitas wilayah menjadi aspek yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah/negara. Salah satu manfaat konektivitas wilayah adalah kemudahan akses/aksesibilitas wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang baik menyebabkan mobilitas barang, jasa dan manusia lebih efisien yang dampaknya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah tersebut perlu peningkatan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut meliputi prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan **“meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah”** sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap. *Kondisi jalan mantap disini ditetapkan untuk ruas jalan dengan kondisi mantap $\geq 72\%$.* Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap akan meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga jarak tempuh antar wilayah akan semakin cepat/lebih singkat, menurunkan nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan 40 ruas jalan terkoneksi dengan kondisi mantap $\geq 72\%$. Penetapan target tahun 2021 ini mengacu pada target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis. Jika dibandingkan dengan ruas jalan mantap $\geq 72\%$ tahun 2020, target tahun 2021

menurun 4 ruas jalan. Penurunan target ini mempertimbangkan penurunan kondisi jalan akibat penggunaan, umur ekonomis jalan serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Pencapaian sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah tergambar pada tabel 52.

Tabel 52 Capaian Indikator Sasaran 5.1.1



Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 40 ruas jalan, realisasi 42 ruas jalan dengan tingkat capaian sebesar 105% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2021 diperoleh berdasarkan data dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai hasil survei IRMS (*Integrated Road Management System*). Panjang Jalan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 adalah 1525,20 km dengan 58 ruas jalan. Dari 58 ruas jalan tersebut, baru 42 ruas jalan (72,42%) mempunyai kondisi mantap $\geq 72\%$. Sementara itu, secara total panjang jalan dalam kondisi mantap adalah sebesar 1153,020 Km (75,034%). Ruas Jalan Provinsi Sumatera Barat dalam kondisi mantap $\geq 72\%$ disajikan pada tabel 53.

Tabel 53 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat per Ruas Tahun 2021

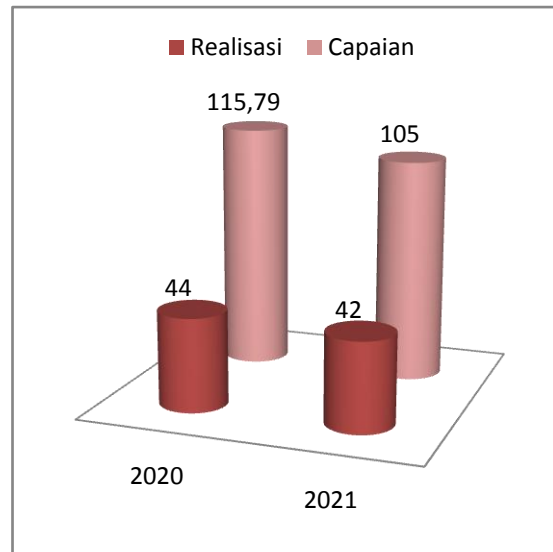
NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	KEMANTAPAN			
				MANTAP		TIDAK MANTAP	
				KM	%	KM	%
1	007	Simancung - Tanjung Ampalu	11,080	76,53	8,48	23,47	2,60
2	008	Tanjung Ampalu- Sijunjung	20,000	91,00	18,20	9,00	1,80
3	010	Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	29,000	89,66	26,00	10,34	3,00
4	011	Simp. Koto Baru - Simalidu	11,900	98,32	11,70	1,68	0,20
5	012	Simp. Koto Baru - Junction	5,400	100,00	5,40	0,00	0,00
6	018	Inderapura - Muara Sakai	7,300	100,00	7,30	0,00	0,00
7	025	Manggopoh - Padang Luar	69,430	87,61	60,83	12,39	8,60
8	028	Sicincin - Kurai Taji	16,440	92,09	15,14	7,91	1,30
9	031	Panti - Simp. Empat	74,230	91,11	67,63	8,89	6,60

NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	KEMANTAPAN			
				MANTAP		TIDAK MANTAP	
				KM	%	KM	%
10	033	Simp. Empat - Sasak	20,000	97,00	19,40	3,00	0,60
11	034.2	Air Balam - Air Bangis	12,600	98,02	12,35	1,98	0,25
12	035	Kubu Kerambil - Batu Sangkar	18,500	85,95	15,90	14,05	2,60
13	036	Baso - Batu Sangkar	28,790	84,72	24,39	15,28	4,40
14	037	Batu Sangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino	10,400	78,85	8,20	21,15	2,20
15	038	Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	30,600	90,93	27,82	9,07	2,78
16	039	Guguk Cino - Sitangkai	15,120	90,74	13,72	9,26	1,40
17	040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17,280	79,17	13,68	20,83	3,60
18	044	Bts. Payakumbuh - Sitangkai	50,610	89,73	45,41	10,27	5,20
19	054	Junction - Abai Siat	12,600	100,00	12,60	0,00	0,00
20	055	Sijunjung - Tanah Badantung	4,400	100,00	4,40	0,00	0,00
21	056.1	Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	20,000	97,50	19,50	2,50	0,50
22	068	Padang Sawah - Kumpulan	36,500	84,11	30,70	15,89	5,80
23	069.2	Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	46,850	95,30	44,65	4,70	2,20
24	070	Batu Sangkar - Ombilin	18,510	80,82	14,96	19,18	3,55
25	071	Solok - Alahan Panjang	47,800	90,38	43,20	9,62	4,60
26	072	Lubuk Basung - Sei. Limau	30,900	96,76	29,90	3,24	1,00
27	075	Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman	20,500	99,02	20,30	0,98	0,20
28	078	Simp. Koto Mambang-Balingka	39,400	97,97	38,60	2,03	0,80
29	080	Matur - Palembang	20,700	93,72	19,40	6,28	1,30
30	081	Palembayan - Palupuah - Simpang Patai	13,300	83,46	11,10	16,54	2,20
31	083	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	44,100	99,55	43,90	0,45	0,20
32	084	Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh)	14,170	83,06	11,77	16,94	2,40
33	085	Simp. Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional)	2,050	100,00	2,05	0,00	0,00
34	088	Padang Koto Gadang - Palembang	31,000	88,39	27,40	11,61	3,60
35	091	Simp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	23,000	94,13	21,65	5,87	1,35
36	092	Simp. Ganting - Bts. Tanah Datar - Sumani	28,400	99,30	28,20	0,70	0,20
37	093	Singkarak - Aripin - Tanjung - Balit	30,000	85,33	25,60	14,67	4,40
38	094	Pintu Angin - Labua Saiyo	5,500	100,00	5,50	0,00	0,00
39	095	Rao Rokan - Batas Riau	33,000	95,15	31,40	4,85	1,60
40	098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	12,000	100,00	12,00	0,00	0,00
41	100	Batu Batembak - Pelabuhan Penasahan	1,200	100,00	1,20	0,00	0,00
42	103	Simp. SP II - Kantor Camat	5,100	100,00	5,10	0,00	0,00

Sumber data : Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (Laporan Akhir Survei IRMS 2021)

Capaian indikator jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap yang tercapai sebesar 105% menunjukkan realisasi indikator ini tahun 2021 tercapai di atas target yang ditetapkan. Untuk capaian diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian indikator ini di tahun 2021 10,79% lebih rendah. Untuk realisasi juga mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 42 ruas jalan. Perbandingan realisasi dan capaian indikator jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 64.

Grafik 64 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2020-2021

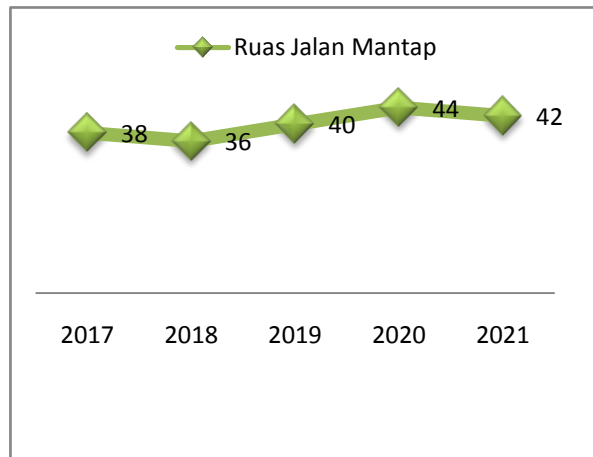


Sumber data: data diolah

Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap \geq 72% pada tahun 2021 tercapai 42 ruas jalan. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercapai 44 ruas jalan. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan tidak sebanding dengan aktivitas penggunaan oleh banyak kendaraan dan umur jalan yang digunakan tersebut serta perbedaan pengukuran ruas jalan kondisi mantap di tahun 2020 dengan tahun 2021.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021), jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ berfluktuatif, meningkat di tahun 2019-2020 dan menurun di tahun 2018 dan 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan 4 ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ di tahun 2021. Perkembangan ruas jalan mantap tahun 2017-2021 digambarkan pada grafik 65.

Grafik 65 Perkembangan Ruas Jalan Kondisi Mantap $\geq 72\%$ tahun 2017-2021



Sumber data : D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (Laporan Akhir Survei IRMS 2021)

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, menargetkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ sebanyak 40 ruas jalan. Realisasi 42 ruas jalan di tahun 2021 menunjukkan target tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan sepanjang 5,63 KM pada 5 ruas jalan.
2. Melaksanakan rekonstruksi jalan (penanganan dan pengamanan badan jalan) sepanjang 1,18 KM pada 3 ruas jalan.
3. Peningkatan struktur jalan sepanjang 11,95 KM pada 13 ruas jalan.
4. Mempertahankan kemantapan jalan yang sudah ada dengan pemeliharaan jalan. Pemeliharaan yang dilakukan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - pemeliharaan berkala sepanjang 150,30 KM pada 6 ruas jalan.

- pemeliharaan rutin 1.206,64 KM pada 57 ruas jalan.
 - rehabilitasi jalan 10.329 KM pada 55 ruang jalan.
5. Mencari sumber pembiayaan lain untuk mendukung pembangunan jalan (APBN).
 6. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermuatan lebih.

Hambatan/kendala dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan metode survei kemandapan jalan dengan tahun yang lalu serta periode *cut off* data yang berbeda.
2. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang bermuatan lebih.
3. Kondisi alam yg rawan bencana seperti longsor, banjir, terban (jalan amblas).
4. Belum tersedianya rencana pembangunan jalan dan utilitas secara terintegrasi.

Upaya di masa yang akan datang untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah antara lain memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP utilitas jalan dan meningkatkan sinergisitas antara perangkat daerah terkait.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 7 Program dengan 22 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp.**396.073.381.384,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.1.1 dapat dilihat pada tabel 54.

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.1.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
L	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	22	396.073.381.384	313.450.622.431
1	Program Penataan Bangunan Gedung	1	129.761.912.734	79.624.409.515
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	1.502.225.452	1.264.737.830
3	Program Penyelenggaraan Jalan	1	258.384.680.911	226.341.680.556
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4	1.843.425.513	1.734.666.594
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6	3.564.285.380	3.481.570.041
6	Program Pengelolaan Pelayaran	6	759.981.394	753.191.268
7	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3	256.870.000	250.366.627

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **396.073.381.384,-** terealisasi sebesar Rp. **313.450.622.431,-** atau **79,14%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 82.622.758.953 (20,86%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah (105%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (79,14%) dengan tingkat efisiensi sebesar 25,86%.



Sasaran 5.1.2 Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan

Infrastruktur lain yang perlu untuk ditingkatkan selain jalan dan jembatan adalah infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. Infrastruktur ketenagalistrikan memegang peranan penting dalam memastikan terjaganya pasokan energi di seluruh Indonesia. Pemerataan infrastruktur ketenagalistrikan juga diyakini dapat memastikan seluruh wilayah di Nusantara dapat menikmati energi yang tentunya berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,

mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.

Salah satu peran pemerintah adalah memastikan seluruh wilayah dapat menikmati energi listrik melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pembangunan tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memanfaatkan/menggunakan energi listrik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan **meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan** sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rasio elektrifikasi.

Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan rasio elektrifikasi tercapai 99,30%. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator rasio elektrifikasi masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan rasio elektrifikasi tahun 2020, target tahun 2021 ditetapkan menurun 0,03%. Penetapan ini mempertimbangkan peningkatan jumlah rumah tangga yang terjadi di tahun 2021. Pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan tergambar pada tabel 55.

Tabel 55 Capaian Indikator Sasaran 5.1.2



Rasio elektrifikasi ditargetkan 99,30%, realisasi 99,91% dengan tingkat capaian sebesar 100,61% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Rasio elektrifikasi sebesar 99,91% diukur berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{1.363.274}{1.364.440} \times 100\% = 99,91\%$$

Ket:

1. Jumlah pelanggan Rumah Tangga Total = 1.363.274 RT (1.346.446 pelanggan PLN dan 16.828 pelanggan non PLN)
2. Jumlah Rumah Tangga 2021 = 1.364.440 RT

Rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 berasal dari rata-rata rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota, 6 Kabupaten/Kota sudah mencapai Rasio Elektrifikasi 100% yaitu Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Solok. Kabupaten dengan rasio elektrifikasi terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai (95,24%). Rincian rasio elektrifikasi per Kabupaten/Kota diuraikan pada tabel 56.

Tabel 56 Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota tahun 2021

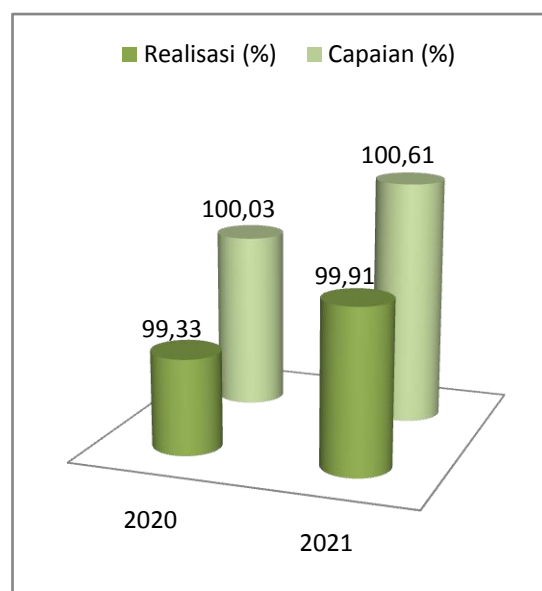
NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	REALISASI DESEMBER 2021					
		JUMLAH RUMAH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
	SUMATERA BARAT	1.364.440	1.346.446	16.828	1.363.274	98,681	99,91
1	Agam	128.535	128.110	418	128.528	99,67	99,99
2	Dharmasraya	54.103	54.100		54.100	99,99	99,99
3	Kepulauan Mentawai	23.001	15.699	6.208	21.907	68,25	95,24
4	Lima Puluh Kota	88.501	87.896	600	88.496	99,32	99,99
5	Padang Pariaman	108.660	108.403	251	108.654	99,76	99,99
6	Pasaman	60.248	57.765	2480	60.245	95,88	100
7	Pasaman Barat	110.511	109.561	944	110.505	99,14	99,99
8	Pesisir Selatan	111.069	109.442	1621	111.063	98,54	99,99
9	Sijunjung	53.009	52.435	571	53.006	98,92	99,99
10	Solok	88.581	87.083	1.493	88.576	98,31	99,99
11	Solok Selatan	39.237	37.119	2.116	39.235	94,60	99,99
12	Tanah Datar	92.268	92.157	106	92.263	99,88	99,99
13	Kota Padang	266.687	266687		266.687	100	100
14	Kota Pariaman	21.535	21.535		21.535	100	100

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	REALISASI DESEMBER 2021					
		JUMLAH RUMAH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
15	Kota Padang Panjang	13.928	13.927		13.927	99,99	99,99
16	Kota Bukittinggi	32.806	32.806		32.806	100	100
17	Kota Payakumbuh	35.347	35.347		35.347	100	100
18	Kota Solok	19.648	19.648		19.648	100	100
19	Kota Sawahlunto	16.766	16.726	20	16.746	99,76	99,88

Sumber data: Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Capaian indikator rasio elektrifikasi yang tercapai sebesar 100,61% menunjukkan realisasi indikator ini tahun 2021 tercapai di atas target yang ditetapkan. Untuk capaian diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Rasio elektrifikasi tahun 2021 mengalami peningkatan 0,58% dibandingkan dengan rasio elektrifikasi tahun 2020. Begitupun dengan capaian indikator rasio elektrifikasi tahun 2021, juga lebih tinggi 0,58% dari capaian 2020. Perbandingan realisasi dan capaian indikator rasio elektrifikasi tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 66.

Grafik 66 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Rasio Elektrifikasi Tahun 2020-2021

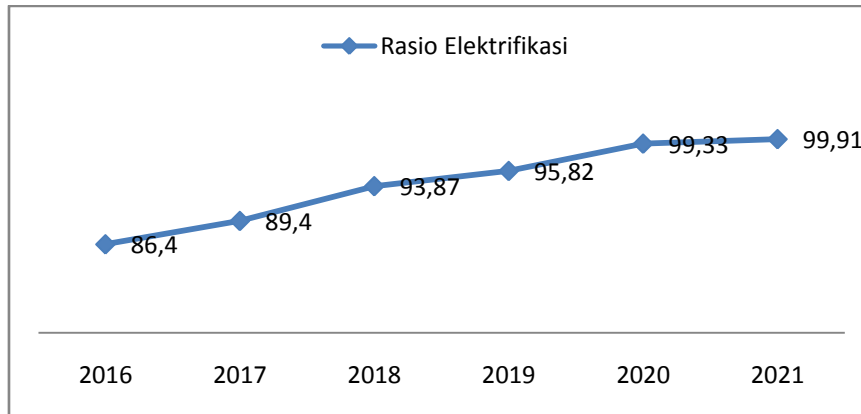


Sumber data: Data diolah

Dalam kurun waktu 2016-2021, rasio elektrifikasi Sumatera Barat menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,702%. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 4,47%. Sementara itu, di tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup kecil yaitu 0,58% dibandingkan dengan tahun 2020. Secara absolut, jumlah RT yang menjadi pelanggan listrik sampai dengan tahun

2021 mencapai 1.363.274 RT. Perkembangan rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 digambarkan pada grafik 67.

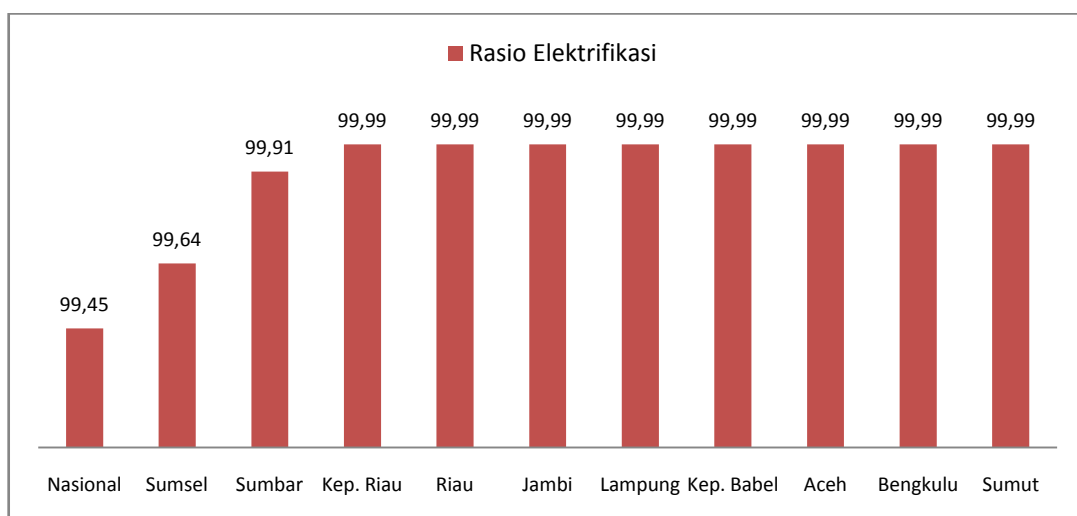
Grafik 67 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



Sumber data: D. Energi Sumber Daya Mineral

Rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2021 (99,91%) tercapai melebihi rasio elektrifikasi Nasional (99,45%) dengan selisih lebih tinggi sebesar 0,46%. Rata-rata semua Provinsi yang ada di Pulau Sumatera juga mencapai rasio elektrifikasi di atas Nasional. Jika dibandingkan dengan 9 Provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan kesembilan di atas Provinsi Sumatera Selatan. Rincian rasio elektrifikasi Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 68.

Grafik 68 Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat, Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber data: Dinas ESDM

Selama tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melaksanakan upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Upaya tersebut antara lain:

- a. Melakukan pemasangan instalasi listrik tahun 2021 untuk 1200 KK tersebar di 16 Kabupaten/Kota.
- b. Membangun 57 PLTS (20 unit di Kota Sawahlunto, 1 unit di Kabupaten Pasaman, 13 unit di Kabupaten Sijunjung, 23 unit di Kabupaten Tanah Datar).
- c. Revitalisasi PLTMH rusak ringan dan sedang di Jorong Rotan Gotah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman dan jorong Banjar Durian Gadang, Nagari Kinali, Kec Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
- d. Perencanaan DED pembangunan PLTS terpusat di Jorong Gasing, Kab. Solok Selatan.

Seiring dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga masih terkendala dalam mencapai Lokasi/daerah yang belum berlistrik karena kondisi geografis dan topografi wilayah di Sumatera Barat yang sangat bervariasi. Hal ini cukup mempengaruhi peningkatan jumlah rumah tangga yang berlistrik di Sumatera Barat.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap konsisten mengupayakan agar 100% Rumah tangga di Sumatera Barat sudah dapat menggunakan energi listrik. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan sensus untuk *update* data rumah tangga dan melakukan pemasangan listrik pada Rumah Tangga yang belum berlistrik.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan, Pemerintah Provinsi melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan 3 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. 7.534.424.829,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan infrastruktur

energi ketenagalistrikan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.1.2. dapat dilihat pada tabel 57.

Tabel 57 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.2.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur EKTL	3	7.534.424.829	7.279.665.081
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3	7.534.424.829	7.279.665.081

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 7.534.424.829,- terealisasi sebesar Rp. 7.279.665.081,- atau 96,62%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 254.759.748 (3,38%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan (100,61%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,62%) dengan tingkat efisiensi sebesar 3,96%.



Sasaran 5.1.3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumberdaya Air

Infrastruktur sumber daya air berpengaruh dalam hal pengelolaan sumber daya air. Infrastruktur ini sangat bermanfaat dan menunjang kehidupan masyarakat dalam hal mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi. Manfaat infrastruktur sumber daya air antara lain adalah sebagai penyedia air baku atau air minum, irigasi, pembangkit listrik, dan pengendali banjir. Tak hanya itu, infrastruktur sumber daya air seperti waduk dan bendungan juga bisa dimanfaatkan dalam sektor perikanan dan wisata.

Selain dari manfaat yang diberikan oleh sumber daya air, ternyata ketersediaan/keberadaan sumber daya ini tidak selalu tetap sesuai kebutuhan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan air bisa disebabkan oleh kekeringan, bencana banjir serta belum optimalnya kinerja jaringan irigasi. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pembangunan

infrastruktur sumber daya air antara lain melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.

Dalam hal pengelolaan sumber daya air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air baku, mengendalikan daya rusak air dan melaksanakan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran **meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air** sebagai sasaran ke 3 yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Pada tahun 2021, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan dapat tercapai 61,94%. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 (64,20%), target tahun 2021 ini ditetapkan lebih rendah 2,26% dengan pertimbangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tergambar pada tabel 58.

Tabel 58 Capaian Indikator Sasaran 5.1.3



Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 61,94%, realisasi 64,93% dengan tingkat capaian sebesar 104,82% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 64,93% diukur berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air} = \frac{70,62 \% + 58,50 \% + 65,66 \%}{3} = 64,93\%$$

Ket:

1. Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi = 70,62%
2. Persentase volume tampungan sumber-sumber air = 58,50%
3. Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 65,66%

Perkembangan masing-masing komponen infrastruktur pengelolaan sumber daya air diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 65 Daerah Irigasi dengan luas total areal irigasi 65.007 Ha (luas baku perencanaan). Berdasarkan usulan revisi Permen PU maka luas daerah irigasi tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu luas baku (63.954 ha), luas potensial (50.646 ha) dan luas fungsional 33.884 ha). Pada tahun 2021, persentase pemenuhan air irigasi diukur berdasarkan indikator kinerja Indeks Kinerja Sistem Irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

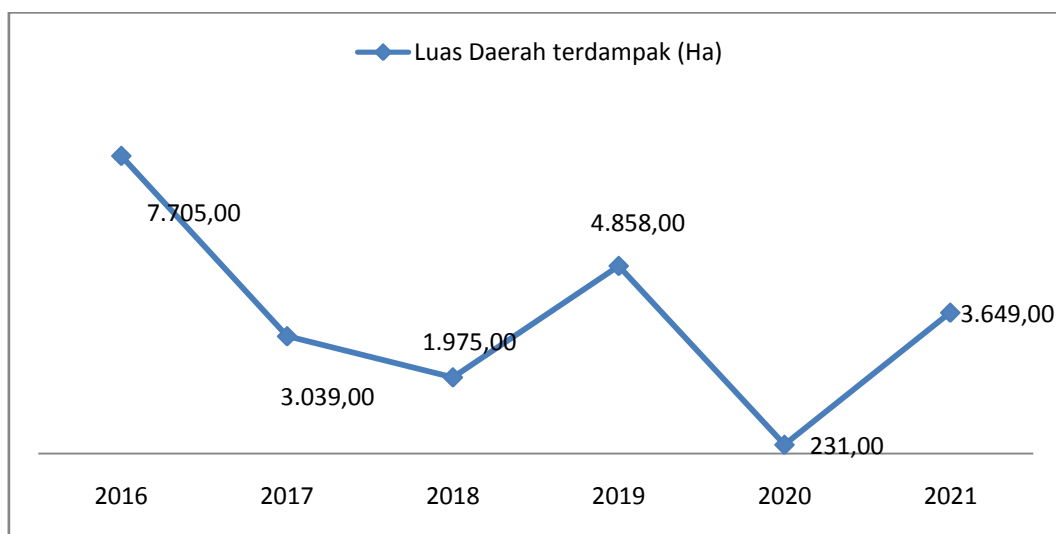
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Indikator kinerja ini menggambarkan tentang kinerja sistem irigasi terhadap suatu daerah.

Pada tahun 2021, persentase pemenuhan air irigasi tercapai 70,62%. Secara absolut, dari pemeliharaan/rehabilitasi saluran irigasi yang dilakukan selama tahun 2021 berdampak pada 3.649 ha area persawahan. Rincian perhitungan Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi berdasarkan perhitungan bobot dan Indeks Penilaian Kinerja Sistem Jaringan Irigasi Utama adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Formula	Realisasi 2021
a	Prasarana fisik	45%	33,47%
b	Produktivitas tanaman	15%	9,62%
c	Sarana penunjang	10%	6,68%
d	Organisasi personalia	15%	11,58%
e	Dokumentasi	5%	4,24%
f	Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A/GP3A)	10%	5,03%
Jumlah		100%	70,62%

Proses rehabilitasi Daerah Irigasi selama 6 tahun terakhir (2016-2021) berdampak pada 21.456 ha (luas daerah terdampak). Rincian luas daerah terdampak rehabilitasi irigasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 digambarkan pada grafik 69.

Grafik 69 Luas Daerah Terdampak rehabilitasi Irigasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



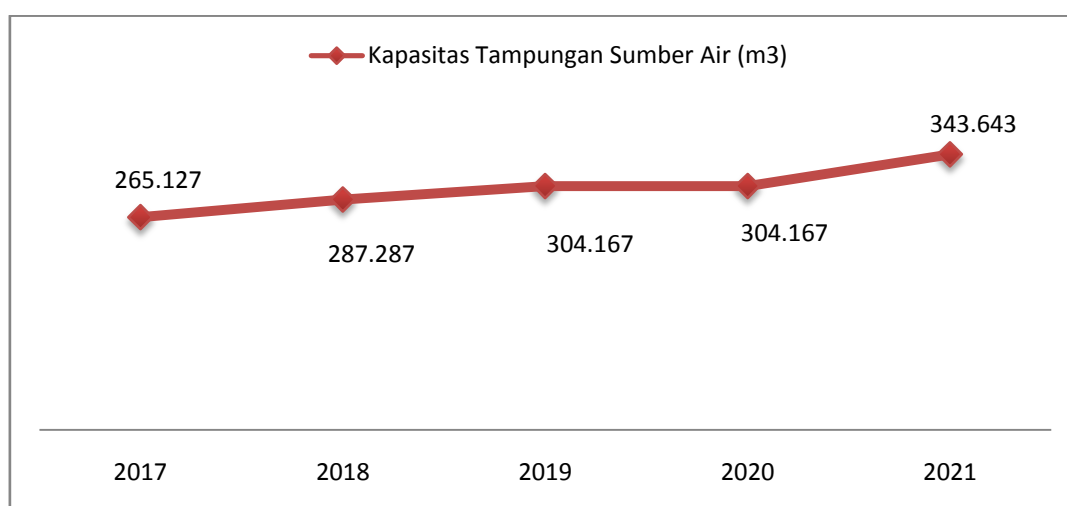
Sumber data: DPSDA dan BK

2. Volume tampungan sumber-sumber air

Total potensi tampungan sumber-sumber air dikelola Provinsi adalah sebesar 587.467 m³. Sampai dengan 2021 dengan telah dilaksanakannya penyediaan tampungan sumber-sumber air maka kapasitas tampungan sumber air menjadi sebesar 343.643 m³ (58,50%). Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan volume tampungan sumber-sumber air sebanyak 39.476 m³.

Perkembangan kapasitas tampungan sumber air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 digambarkan pada grafik 70.

Grafik 70 Perkembangan kapasitas tampungan sumber air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021



Sumber data: DPSDA dan BK

3. Luas Kawasan yang terlindung dari daya rusak air

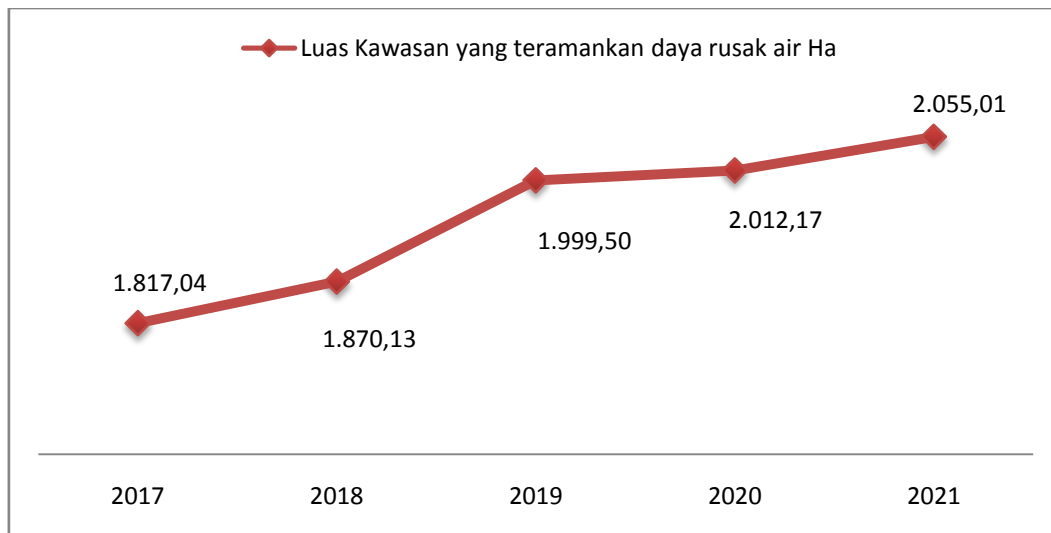
Total luas daerah terdampak daya rusak air yang akan ditangani adalah 3.130 Ha (dari luapan air sungai, banjir kanal) pada wilayah kewenangan Provinsi. Wilayah sungai di Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 8 wilayah sungai yaitu:

- a. 2 WS kewenangan Provinsi yaitu WS Silaut-Tarusan dan Masang-Pasaman (total luas Daerah terdampak 3.000 ha).
- b. 1 WS kewenangan Kab Mentawai yaitu WS Pagai-Sipora-Siberut (total Luas Daerah terdampak 229 ha).

- c. 5 WS kewenangan Pusat yaitu WS Rokan, WS Kampar (Sumbar-Riau), WS Natal-Batahan (Sumbar-Sumut), WS Indragiri-Akuaman (Arau, Kuranji, Anai, Mangor, Antokan, Naras), WS Batang Hari (Sumbar-Jambi). (Total Luas Daerah Terdampak 14.243,30 ha).

Sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan pengamanan kawasan terdampak banjir dan abrasi pantai sehingga total luas kawasan yang teramankan dari daya rusak air menjadi 2055,01 Ha. Perkembangan luas kawasan yang teramankan dari daya rusak air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 digambarkan pada grafik 71.

Grafik 71 Perkembangan luas kawasan yang teramankan dari daya rusak air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021

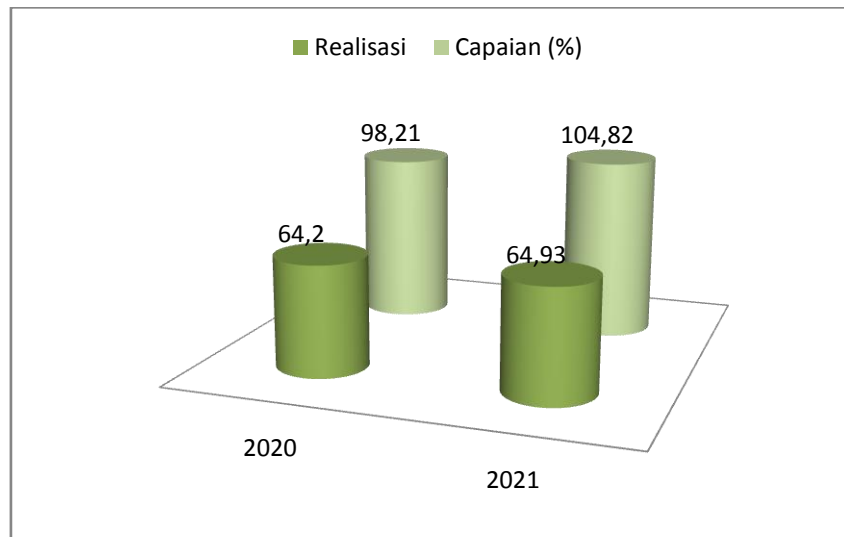


Sumber data: DPSDA dan BK

Capaian indikator persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2021 tercapai sebesar 104,82%. Hal ini menunjukkan realisasi indikator ini telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2021 tercapai 64,93% lebih tinggi 0,73% dari rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 (64,20%). Begitupun dengan capaian indikator rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2021, juga lebih tinggi 6,61%

dari capaian 2020. Perbandingan realisasi dan capaian indikator rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 72.

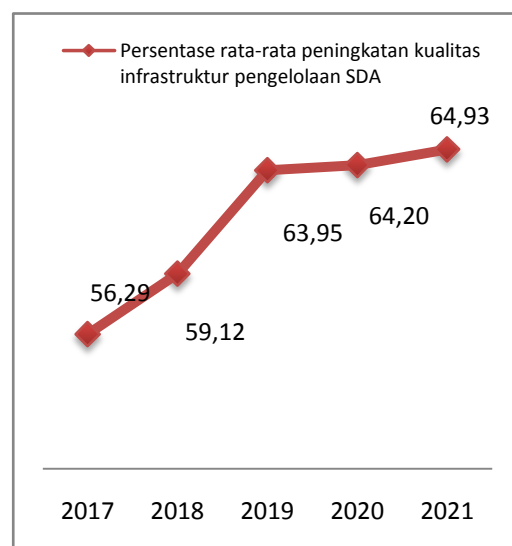
Grafik 72 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020-2021



Sumber data: data diolah

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut sebesar 2,16%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (4,83%) dan terendah terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur SDA mengalami peningkatan sebesar 0,73% dari tahun 2020. Perkembangan indikator ini tahun 2017-2021 tergambar pada grafik 73.

Grafik 73 Perkembangan Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021



Sumber data: DPSDA dan BK

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menargetkan persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tercapai 61,94%. Realisasi indikator kinerja Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air di tahun 2021 tercapai 64,93 atau 2,99% melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan target tahun terakhir untuk indikator Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sudah tercapai dengan baik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Upaya tersebut antara lain:

1. Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada 43 Daerah Irigasi (DI) (8.416,30 m primer, 15.226,30 m sekunder, Total 23.642,60 m). Rincian 43 DI yang direhabilitasi tahun 2021 disajikan pada tabel 59.

Tabel 59 Daerah Irigasi yang direhabilitasi Tahun 2021

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi	Jumlah yang direhabilitasi	
			Meter	Ha
1	D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan (IPDMIP)	Sekunder	2.000,00	39,3600
2	D.I Bandar Batang Dareh Kabupaten Agam (DAK)	Primer	1.669,00	190,7800
3	D.I Batang Agam Kabupaten Lima Puluh Kota - Kota Payakumbuh	Sekunder	650,00	89,0000
4	D.I Batang Lampasi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh (IPDMIP)	Sekunder	3.248,00	302,0000
5	D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Sekunder	175,00	63,0000
6	D.I Batang Partupangan Kabupaten Pasaman Barat	Sekunder	210,00	169,0000
7	D.I Batang Sianok Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi (DAK)	Sekunder	456,60	39,7000
8	D.I Batang Suliti Kab Solok Selatan (DAK)	Primer	505,70	239,5000
9	D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan	Primer	104,35	33,5000
10	D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok	Primer	662,40	196,0000
11	D.I Bdr. Bulaan Dalam Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Primer	99,78	14,9200
12	D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Primer	137,50	14,0000
13	D.I Bdr. Jambu Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Primer	119,00	17,0000
14	D.I Bdr. Kubu Banda Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi (DAK)	Sekunder	1.239,00	95,0000
15	D.I Bdr. Muka Air Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Primer	185,30	10,0000

No	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi	Jumlah yang direhabilitasi	
			Meter	Ha
16	D.I Bdr. Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok (DAK)	Sekunder	1.500,00	188,0000
17	D.I Bdr. Rupik Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Primer	150,00	20,0000
18	D.I Bdr. Sigando Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang	Primer	188,60	14,9700
19	D.I Bintungan Kab Solok (DAK)	Sekunder	654,00	40,0000
20	D.I Btg Selo Kab Tanah Datar (DAK)	Primer	530,00	223,0000
21	D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat (IPDMIP)	Sekunder	1.072,70	247,0000
22	D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan	Sekunder	35,00	30,0000
23	D.I Koto Salapan Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	Sekunder	1.300,00	101,0000
24	D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekunder	281,00	24,0000
25	D.I Rehabilitasi D.I Bandar Halim Kabupaten Solok - Kota Solok (DAK)	Primer	581,50	169,0000
26	D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat	Sekunder	200,00	40,0000
27	D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok Selatan	Primer	1.585,50	131,0000
28	D.I Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan	Primer	206,00	97,0000
29	D.I Sei. Dareh Kabupaten Lima Puluh Kota - Kota Payakumbuh (DAK)	Primer	1.029,17	51,3000
30	D.I Sicaung Kabupaten Padang Pariaman (DAK)	Sekunder	779,70	281,9000
31	D.I Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan	Primer	362,00	35,0000
32	D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan	Sekunder	169,00	59,8000
33	Jaringan Irigasi D.I Bandar Pamujan Kabupaten Solok - Kota Solok	Sekunder	180,00	88,0000
34	Jaringan Irigasi D.I Batang Lampasi Kabupaten Lima Puluh Kota - Kota Payakumbuh (Lanjutan)	Sekunder	76,00	14,9500
35	Jaringan Irigasi D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Sekunder	68,00	16,0000
36	Jaringan Irigasi D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh	Sekunder	73,00	15,0000
37	Jaringan Irigasi D.I Bdr. Bulaan Dalam Kabupaten Tanah Datar-Kota Padang Panjang (Lanjutan)	Sekunder	69,30	15,0000
38	Jaringan Irigasi D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar-Kota Padang Panjang (Lanjutan)	Primer	120,50	14,0000
39	Jaringan Irigasi D.I Gunung Nago Kota Padang (Lanjutan)	Sekunder	110,00	14,0000
40	Jaringan Irigasi D.I Koto Tuo Kota Padang	Sekunder	108,00	16,0000
41	Jaringan Irigasi D.I Sei. Dareh Kabupaten Lima Puluh Kota - Kota Payakumbuh (Lanjutan)	Sekunder	48,00	15,0000
42	Jaringan Irigasi D.I Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman	Sekunder	140,00	101,0000
43	D.I Gunung Nago Kota Padang	Sekunder	564,00	74,0000

2. Melakukan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi Permukaan pada 52 DI.
3. Pembangunan Embung Kandih Bukit Kandung Kabupaten Solok dan Pembangunan Embung Talago Parayun Kabupaten Solok yang menghasilkan outcome sebesar 39.476 M³.
4. Melakukan Operasi dan Pemeliharaan (OP) 13 unit Embung.
5. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 44 unit (4.563,93 m) dengan rincian disajikan pada tabel 60.

Tabel 60 Pembangunan Perkuatan Tebing Tahun 2021

No	Objek yang dibangun	Jumlah yang dibangun	
		Meter	Ha
1	Pembangunan Prasarana Sungai dan Perkuatan Tebing Batang Patibubur Kabupaten Pasaman Barat	41,50	0,42
2	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh	138,00	0,69
3	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Aia Bangih Kab.Pasaman Barat	42,00	0,42
4	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Aia Katiak Kab. Agam	175,25	0,88
5	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Ampu Kab. Pasaman Barat	30,00	0,30
6	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Bayang Kab. Pesisir Selatan	57,00	0,57
7	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Hulu Masang Kab. Pasaman	222,00	2,22
8	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Inderopuro Kab. Pesisir Selatan	173,00	1,73
9	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kambang-Lengayang Kab. Pesisir Selatan	100,00	1,00
10	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kamumuan Kab. Padang Pariaman	246,00	2,46
11	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kapar Kabupaten Pasaman Barat	36,00	0,36
12	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kapur Sembilan Kab. Lima Puluh Kota	65,70	0,66
13	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lakitan Kabupaten Pesisir Selatan	62,00	0,62
14	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lapu KaB. Pasaman barat	44,00	0,44
15	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lembang Kabupaten Solok	64,00	0,32
16	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lumpo Kab. Pesisir Selatan	100,00	1,00
17	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lurus-Maransi Kota Padang	560,00	1,75
18	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Maligi Kab. Pasaman Barat	84,00	0,84
19	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Nyalo Kabupaten Pesisir Selatan	36,00	0,36
20	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Palangai Kab. Pesisir Selatan	32,00	0,32
21	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Pasaman Kab. Pasaman Barat	63,00	0,63
22	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Pulau Kota Payakumbuh	114,00	1,14
23	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Salido Kab. Pesisir Selatan	100,00	1,00
24	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sariak Malai Kab. Padang Pariaman	55,00	0,55
25	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Siguntur Kab. Pesisir Selatan	66,00	0,66
26	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sikabau Kab. Pasaman Barat	95,00	0,95
27	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sikilang Kab. Pasaman barat	47,00	0,47

No	Objek yang dibangun	Jumlah yang dibangun	
		Meter	Ha
28	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sumpur Kab. Pasaman	150,00	1,50
29	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Surantih Kab. Pesisir Selatan	236,00	2,36
30	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	328,20	3,28
31	Pembangunan Prasarana Sungai dan Perkuatan Tebing Batang Mandiangin Kabupaten Pasaman Barat	40,00	0,40
32	Pembangunan Prasarana Sungai dan Perkuatan Tebing Batang Pigogah Kabupaten Pasaman Barat	13,00	0,13
33	Normalisasi Bangunan Perkuatan Tebing Batang Hino Kabupaten Tanah Datar	320,00	1,60
34	Normalisasi Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapar Kabupaten Pasaman Barat	159,00	1,59
35	Normalisasi Bangunan Perkuatan Tebing Batang Patimah Kabupaten Pasaman	160,00	1,60
36	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Bayang (Lanjutan) Kabupaten Pesisir Selatan	8,00	0,08
37	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Belimbing Kota Padang	52,00	0,26
38	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Kapar (Lanjutan) Kabupaten Pasaman Barat	18,00	0,18
39	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lampasi Kota Payakumbuh	36,00	0,36
40	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Nyalo (Lanjutan) Kabupaten Pesisir Selatan	43,00	0,43
41	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Palangai (Lanjutan) Kabupaten Pesisir Selatan	9,00	0,09
42	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pulau Kota Payakumbuh (Lanjutan)	38,28	0,38
43	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sariak Kabupaten Pasaman Barat	58,00	0,58
44	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Sungai Talang Kabupaten Pasaman Barat	47,00	0,47

6. Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 3 unit (480 m) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Air Haji Kab. Pesisir Selatan 123 M.
 - b. Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Air Manis Kota Padang 47 M.
 - c. Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Bungus Kota Padang 310 M.
7. Melaksanakan pembinaan konstruksi melalui Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan sertifikasi terhadap Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Masyarakat Konstruksi.

8. Peningkatan pengendalian kontrak dalam hal mutu dan administrasi hukum kontrak.
9. Peningkatan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air masih ditemukan berbagai kendala, antara lain:

1. Keterlambatan penandatanganan kontrak akibat menunggu proses pelelangan yang cukup lama karena jumlah paket yang cukup banyak dan adanya evaluasi kewajaran harga yang cukup menyita waktu, serta adanya beberapa kegiatan yang mengalami tender ulang.
2. Masih ditemukan penyedia jasa konstruksi yang kinerjanya masih rendah dalam menyelesaikan pekerjaan.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi akan mengupayakan untuk:

1. Memprioritaskan penambahan alokasi anggaran untuk infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan provinsi.
2. Melaksanakan kegiatan tender penyedia jasa konstruksi dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran efektif dan efisien sehingga menghasilkan penyedia jasa yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
3. Konsisten meningkatkan pengendalian kontrak dalam hal mutu dan administrasi hukum kontrak.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 5 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp.152.458.517.921,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.1.3 dapat dilihat pada tabel 61.

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.3.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	5	152.458.517.921	118.497.364.326
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	150.835.084.319	117.167.505.521
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3	1.623.433.602	1.329.858.805

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **152.458.517.921,-** terealisasi sebesar Rp. **118.497.364.326,-** atau **77,72%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 33.961.153.595 (22,28%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air (104,82%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (77,72%) dengan tingkat efisiensi sebesar 27,1%.



Sasaran 5.1.4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

Layanan dasar masyarakat meliputi air bersih, sanitasi, listrik dan permukiman. Hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi layanan dasar tersebut adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Pembangunan ini diharapkan akan berdampak pada pemenuhan akan air bersih, sanitasi, listrik dan permukiman yang layak huni. Pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu kewajiban pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis **meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat** untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat. Cakupan infrastruktur layanan masyarakat dalam hal ini meliputi cakupan air minum, cakupan sanitasi dan rumah layak huni.

Pada tahun 2021, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat ditargetkan dapat tercapai 54,68%. Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 (55,57%), target tahun 2021 ini ditetapkan lebih rendah 0,89%. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan anggaran untuk pencapaian target tersebut. Pencapaian sasaran strategis persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tergambar pada tabel 62.

Tabel 62 Capaian Indikator Sasaran 5.1.4.



Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat ditargetkan 54,68%, realisasi 55,37% dengan tingkat capaian sebesar 101,26% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 55,37% diukur berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat} = \frac{82,05\% + 82,26\% + 1,79\%}{3} = 55,37\%$$

Ket:

1. Persentase Cakupan Sanitasi = 82,05%
2. Persentase Cakupan Air Minum = 82,26%
3. Persentase penurunan rumah tidak layak huni = 1,79%

Perkembangan masing-masing komponen layanan masyarakat diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Sanitasi

Cakupan sanitasi menargetkan agar rumah tangga memiliki akses jamban yang sehat. Cakupan sanitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 tercapai 82,05% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

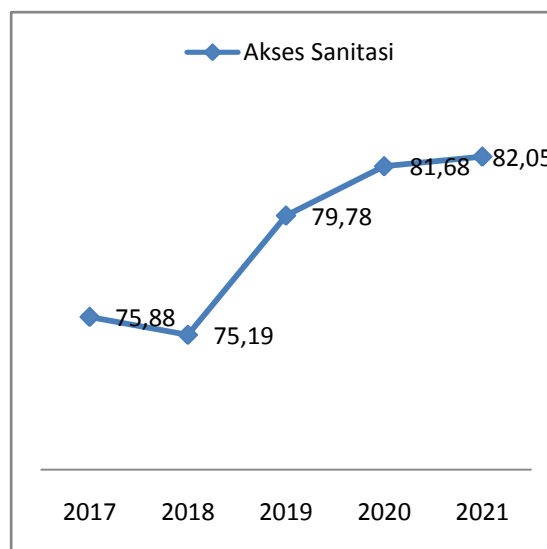
$$\text{Persentase cakupan Sanitasi} = \frac{1.034.238 \text{ KK}}{1.260.499 \text{ KK}} \times 100\% = 82,05\%$$

Ket:

1. Jumlah KK yang akses Sanitasi = 1.034.238 KK
2. Jumlah KK Keseluruhan = 1.260.499 KK

Cakupan akses sanitasi Sumatera Barat tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, meningkat di tahun 2019-2021 dan sedikit menurun di tahun 2018. Rata-rata peningkatan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 1,54%. Peningkatan tertinggi yaitu sebesar 1,9% terjadi di tahun 2020. Perkembangan cakupan akses sanitasi tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 74.

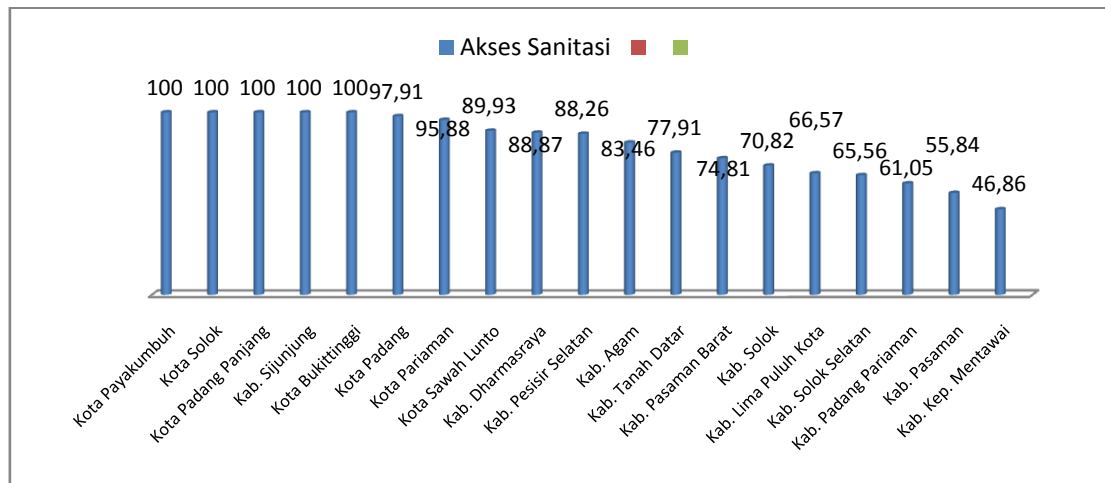
Grafik 74 Akses Sanitasi tahun 2017-2021



Sumber data: Data Diolah

Akses Sanitasi Sumatera Barat sebesar 82,50% merupakan akumulasi akses sanitasi yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupten/Kota, 5 Kabupaten/Kota memiliki akses sanitasi 100% dan 7 Kabupaten/Kota memiliki akses sanitasi <75%. Akses sanitasi terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 46,86%. Akses Sanitasi berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada grafik 75.

Grafik 75 Akses Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2021



Sumber: D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Untuk meningkatkan cakupan sanitasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

- Memfasilitasi/mendampingi beberapa Kabupaten/Kota mendapatkan pendampingan dalam penyusunan Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) Kota Pariaman dan Kab. Kep. Mentawai.
- Melakukan monitoring ke 19 Kabupaten/Kota terkait peningkatan Sanitasi.
- Menyurati Pemda Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pencapaian sanitasi di 19 Kabupaten/Kota.
- Rapat koordinasi dengan OPD terkait PAMSIMAS.

Dalam hal berupaya meningkatkan cakupan sanitasi, masih ditemukan hambatan/kendala sebagai berikut:

- Beberapa program pendukung belum dapat dilaksanakan, karena masih ada beberapa program strategis lain yg masih menjadi prioritas.
- Masih rendahnya tingkat komitmen dari beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menganggarkan program sanitasi.
- Terbatasnya kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota menjadi kendala dalam mengejar target nasional.

- d. Ketidakmampuan nagari-nagari dalam memanfaatkan dana pusat untuk memprogramkan pembangunan di daerahnya, termasuk pembangunan sanitasi.

Untuk kedepannya, akan dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mengaktifkan kembali pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) terkait kebijakan dan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pelaksanaan untuk mengawal percepatan pembangunan akses air minum dan sanitasi.
- b. Melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada tahun 2022.
- c. Mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan provinsi untuk bisa melaksanakan pemantauan terhadap data dan informasi kegiatan DAK untuk menunjang fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

2. Cakupan Air Minum

Cakupan air minum menggambarkan penduduk yang sudah memiliki akses penyediaan air minum aman. Pada tahun 2021, cakupan air minum Sumatera Barat tercapai 82,26% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase cakupan Air Minum} = \frac{4.283.663 \text{ jiwa}}{5.207.191 \text{ jiwa}} \times 100\% = 82,26\%$$

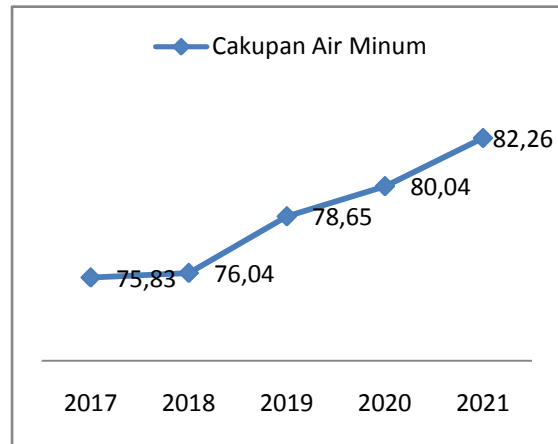
Ket:

1. Jumlah penduduk yang memiliki akses penyediaan air minum aman = 4.283.663 jiwa
2. Jumlah penduduk Keseluruhan = 5.207.191 jiwa

Cakupan air minum Sumatera Barat sebesar 82,26% merupakan akumulasi Cakupan air minum yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota tersebut, 3 Kabupaten memiliki cakupan air minum yang tercapai <75%. Untuk cakupan air minum tertinggi berada di Kota Payakumbuh (99,44%). Akses air minum berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada grafik 77.

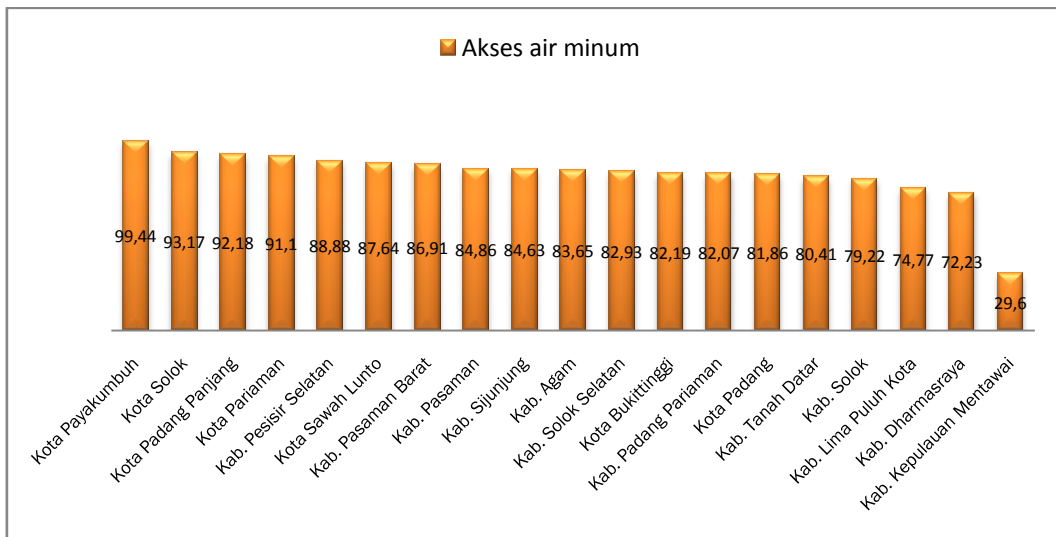
Cakupan air minum Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir (2017-2021) terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 1,61%. Peningkatan tertinggi yaitu sebesar 2,61% terjadi di tahun 2019. Perkembangan cakupan air minum tahun 2017-2021 disajikan pada grafik 76.

Grafik 76 Cakupan Air Minum tahun 2017-2021



Sumber data: Data Diolah

Grafik 77 Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota tahun 2021



Sumber: D. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pemerintah selalu mengupayakan peningkatan cakupan air minum yang aman di Sumatera Barat, upaya tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring ke 19 Kabupaten/Kota terkait peningkatan akses Air Minum.
- Melakukan pendampingan dan monitoring dalam kegiatan PAMSIMAS sebagai (*Provincial Project Management Unit* (PPMU)).
- Menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pencapaian sanitasi dan Air Minum di 19 Kabupaten/Kota.

d. Rapat koordinasi dengan OPD terkait kegiatan PAMSIMAS

Beberapa hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan cakupan air minum adalah:

- a. Beberapa program pendukung belum dapat dilaksanakan, karena masih ada beberapa program strategis lain yg masih menjadi prioritas.
- b. Masih rendahnya tingkat komitmen dari beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menganggarkan program sanitasi dan air minum.
- c. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota menjadi kendala dalam mengejar target nasional.
- d. Ketidakmampuan nagari-nagari dalam memanfaatkan dana pusat untuk memprogramkan Pembangunan di daerahnya, termasuk pembangunan sanitasi dan akses air minum.

Untuk kedepannya, Pemerintah akan selalu konsisten untuk mengupayakan peningkatan akses air minum sehat melalui upaya berikut ini:

- a. Mengaktifkan kembali pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) terkait kebijakan dan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pelaksanaan untuk mengawal percepatan pembangunan akses air minum dan sanitasi.
- b. Mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan provinsi untuk bisa melaksanakan pemantauan terhadap data dan informasi kegiatan DAK untuk menunjang fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

3. Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

Kondisi rumah tidak layak huni yang terdata di awal tahun 2021 adalah sebanyak 195.083 unit. Sepanjang tahun 2021, Pemerintah Sumatera Barat telah menangani 3.490 unit rumah tidak layak huni (1,79%) dengan formula perhitungan sebagai berikut:

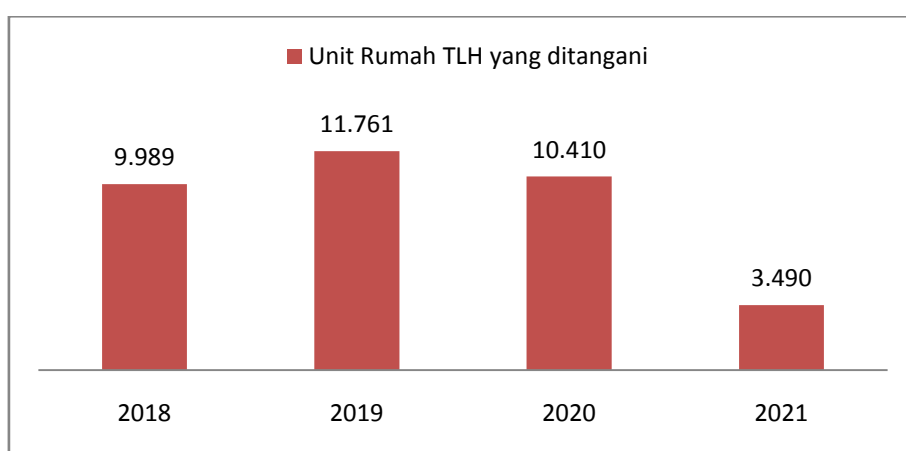
$$\text{Persentase penurunan Rumah tidak Layak Huni} = \frac{3.490 \text{ unit}}{195.083 \text{ unit}} \times 100\% = 1,79\%$$

Ket:

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni awal 2021 = 195.083 unit
 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani = 3.490 unit

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Pemerintah sudah menangani 35.650 unit Rumah tidak layak huni. Penanganan rumah tersebut jumlahnya cenderung menurun selama 3 tahun terakhir (2019-2021) dengan penurunan yang cukup signifikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik 78.

Grafik 78 Rumah TLH yang ditangani dari tahun 2018-2021



Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Penanganan Rumah tidak layak huni sebanyak 3.490 unit tersebar di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Berikut ini akan dirinci penanganan rumah tidak layak huni pada masing-masing Kabupaten /Kota:

Tabel 63 Rincian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021				
		BSPS (unit)	Rusus (unit)	BSPS NAHP (unit)	BSPS APBD Kabupaten/Kota (unit)	BSPS DAK (unit)
1	Kota Padang	200	0	0	45	41
2	Kota Bukittinggi	0	0	0	37	10
3	Kota Pariaman	0	0	0	0	49
4	Kota Payakumbuh	18	0	0	0	61
5	Kota Sawahlunto	0	0	0	0	68
6	Kota Padang Panjang	0	0	0	0	52
7	Kota Solok	0	0	0	0	115
8	Kab Padang Pariaman	0	0	0	0	
9	Kab Agam	31	0	0	0	137
10	Kab Pasaman	52	0	0	0	0
11	Kab Pasaman Barat	18	0	0	44	69
12	Kab Tanah Datar	25	0	0	0	0
13	Kab Pessel	20	0	0	0	0

14	Kab Sijunjung	20	0	0	0	55
15	Kab Solok	1600	0	0	0	0
16	Kab Solok Selatan	20	0	0	0	54
17	Kab Kep Mentawai	0	0	350	0	69
18	Kab Limapuluh Kota	0	0	0	185	0
19	Kab Dharmasraya	45	0	0	0	0
Jumlah		2049	0	350	311	780
Total Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni				3490		

Sumber Data: D. Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan rumah tidak layak huni adalah dengan mendorong swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni, koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyediaan rumah layak huni.

Dalam mengupayakan penurunan rumah tidak layak huni, masih ditemukan hambatan/kendala sebagai berikut:

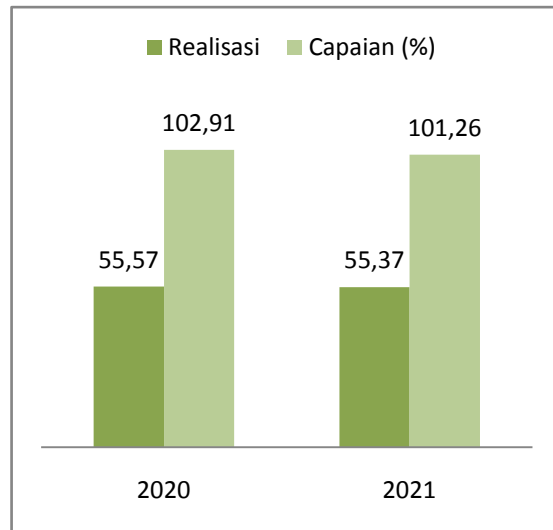
- Adanya perubahan data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
- Kurangnya tingkat keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah layak huni.
- Kurangnya sumber daya untuk pembangunan rumah layak huni.
- Terbatasnya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten/Kota.
- Perbedaan konsep penetapan masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan dari Kemensos (masyarakat miskin) dengan Kementerian PU (masyarakat berpenghasilan rendah).

Upaya ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penurunan rumah layak huni yaitu:

- Penanganan (rehabilitasi) RTLH pada kawasan kumuh kewenangan provinsi (10 Ha s/d < 15 ha).
- Kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan rumah layak huni.
- Mendorong pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan rumah layak huni.

Capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur masyarakat tahun 2021 tercapai 101,26% (>100%) atau tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (102,91%), capaian 2021 lebih rendah 1,65%. Begitupun realisasi tahun 2021 juga tercapai lebih rendah 0,2% dari realisasi tahun 2020 (55,57%). Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 79.

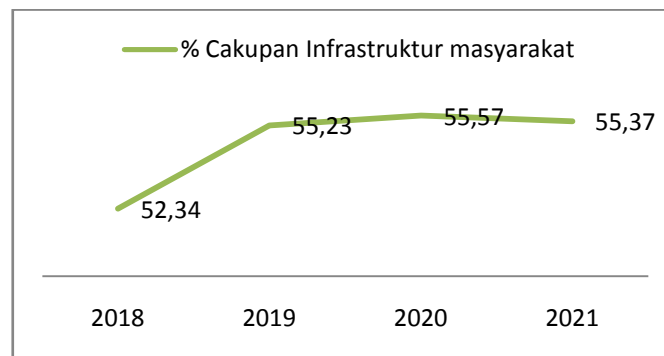
Grafik 79 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020-2021



Sumber data: Data diolah

Perkembangan cakupan infrastruktur masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020, dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2021, sebagaimana tergambar pada grafik 80.

Grafik 80 Cakupan infrastruktur masyarakat tahun 2018-2021



Sumber data: Data diolah

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menargetkan cakupan layanan masyarakat tercapai 54,68%. Dengan capaian indikator kinerja ini di tahun 2021 sebesar 101,26% berarti target tahun terakhir ini telah tercapai dengan baik. Walaupun jika dilihat dari masing-masing indikator pendukung masih ada indikator yang tidak tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu penurunan rumah tidak layak huni.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat, Pemerintah Provinsi melaksanakan 15 Program dengan 18 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **62.875.814.831,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.1.4 dapat dilihat pada tabel 64.

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.4

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	18	62.875.814.831	61.339.880.040
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	510.019.900	455.103.650
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	1.925.682.850	1.924.259.343
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	378.526.200	362.385.932
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1	6.567.194.030	6.493.940.950
5	Program Pengembangan Perumahan	2	516.928.116	436.862.450
6	Program Kawasan Permukiman	1	259.072.600	188.916.955
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	52.218.810.433	51.150.165.766
8	Program Pengelolaan Izin Lokasi	1	32.220.625	19.170.500
9	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	173.924.936	81.024.150
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1	68.846.974	56.990.397
11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1	73.260.723	51.377.997
12	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	2	46.767.100	40.243.600
13	Program Penetapan Tanah Ulayat	1	20.093.544	16.395.000
14	Program Pengelolaan Tanah Kosong	2	53.747.000	37.145.700
15	Program Penatagunaan Tanah	1	30.719.800	25.897.650

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **62.875.814.831,-** terealisasi sebesar Rp. **61.339.880.040,-** atau **97,56%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.535.934.791 (2,44%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat (101,26%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (97,56%) dengan tingkat efisiensi sebesar 3,7%.

Tujuan 5.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan **meningkatkan kualitas lingkungan hidup** guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup adalah keniscayaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kelangsungan makhluk hidup yang membutuhkan unsur-unsur penting dari lingkungan hidup itu sendiri, seperti air, udara dan mineral. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di tingkat provinsi. IKLH merupakan hasil penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran melalui Surat Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, memberikan arahan kepada Gubernur dan

Bupati/Walikota terkait target IKLH tahun 2021–2024. Target IKLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar 72,70 yang meliputi IKA: 55,79 IKU: 87,09 IKL: 67,48 dan IKAL: 75,60. Penetapan target IKLH Provinsi Sumatera Barat tidak mengikuti target sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas karena dari hasil evaluasi tren data dan prediksi ke depan. Dalam menetapkan target IKLH 2021–2024 dilakukan perhitungan ulang (*recalculating*) dengan mempertimbangkan data-data IKLH lima tahun terakhir serta dinamika pembangunan Sumatera Barat. Penetapan target IKLH 2021 ini juga dipengaruhi oleh perubahan pembobotan IKLH dari tahun-tahun sebelumnya, dan penambahan indikator pengukuran yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dalam perhitungan IKLH tahun 2021 ini.

Perbedaan target IKLH ini telah disampaikan dan didiskusikan kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera pada saat pembahasan Target IKLH untuk Region Sumatera. Hasil diskusi yang berkembang bahwa P3E Sumatera bisa mengakomodir usulan penentuan target IKLH untuk Provinsi Sumatera Barat yang berbeda dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun target IKLH Provinsi Sumatera Barat yang diusulkan adalah 80,05 yang meliputi target IKA:76,80 IKU: 90,39 IKL: 66,30 dan IKAL : 67,00. Komponen yang digunakan dalam perhitungan IKLH di tahun 2021 yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan saja walaupun Indeks Kualitas air laut sudah dilakukan. Perhitungan IKLH menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

IKLH tersebut kemudian dikategorikan sesuai kategori yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 65 Skor dan Kriteria IKLH

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Sumber : KLHK, 2021

Pada tahun 2021 IKLH ditargetkan sebesar 80,05 (kategori baik). Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator IKLH masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tergambar pada tabel 66.

Tabel 66 Capaian Indikator Tujuan 5.2



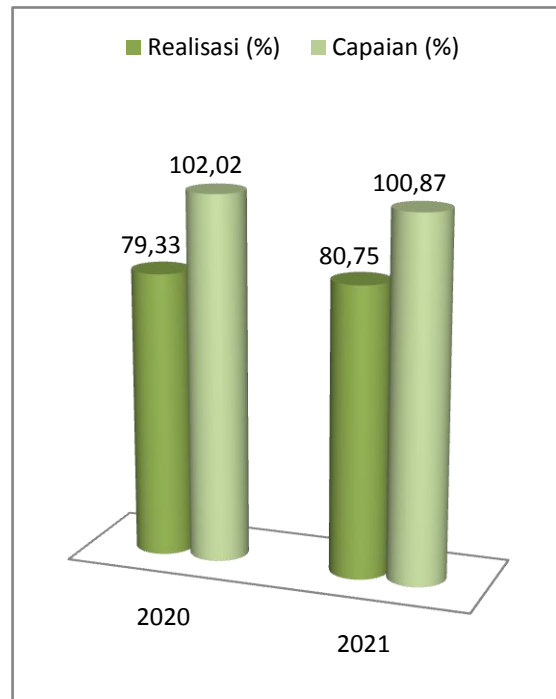
IKLH ditargetkan 80,05, realisasi 80,75 dengan tingkat capaian 100,87% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi indikator kinerja IKLH diukur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup. IKLH sebesar 80,75 berarti kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori Baik. Hal ini menunjukkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik. Rincian IKLH diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai 2021
1	Indeks Kualitas Air	79,00
2	Indeks Kualitas Udara	90,39
3	Indeks Kualitas Lahan	66,30

Capaian indikator kinerja IKLH tahun 2021 adalah 100,87% (>100%) yang menunjukkan realisasi IKLH tahun 2021 telah tercapai melebihi target yang direncanakan. Begitupun dengan tahun 2020, capaian indikator ini juga tercapai >100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian kinerja indikator ini di tahun 2021 lebih rendah 2,85. Akan tetapi, realisasi IKLH tahun 2021 tercapai lebih tinggi 1,42 dari tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 81.

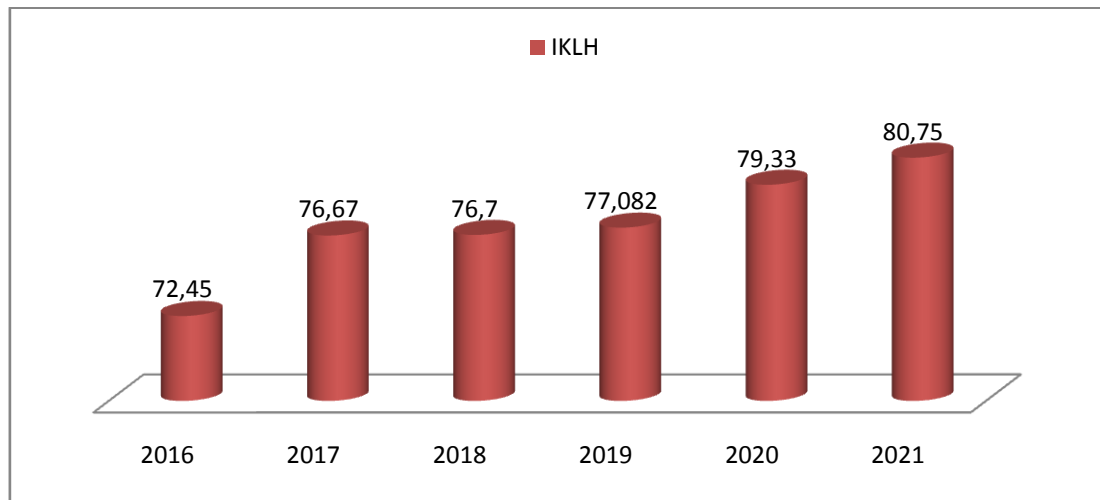
Grafik 81 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja IKLH tahun 2020-2021



Sumber Data: Data Diolah

IKLH Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang berkisar pada angka 72,45 – 80,75 menunjukkan kualitas lingkungan hidup Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir termasuk kategori Baik. Secara absolut, IKLH tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan yang bervariasi per tahunnya. Rata-rata peningkatan dalam 6 tahun tersebut adalah 1,66 per tahun. IKLH di tahun 2021 yang tercapai 80,75, menunjukkan IKLH pada tahun terakhir RPJMD 2016-2021 sudah tercapai lebih tinggi 3,81. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan IKLH 1,42 di tahun 2021. Perkembangan IKLH tahun 2016-2021 digambarkan pada grafik 82.

Grafik 82 IKLH Sumatera Barat tahun 2016-2021



Sumber data: Data diolah

Untuk pencapaian lingkungan hidup yang berkualitas, tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah, namun juga harus ada upaya perubahan dari masyarakat hingga industri yang menjaga aktivitasnya agar ramah lingkungan. Kesadaran berbagai pihak perlu terus ditingkatkan untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah:

1. Menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan hukum terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
2. Peningkatan kepedulian masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan lingkungan.
3. Meningkatkan upaya pemeliharaan lingkungan hidup melalui regulasi, pembinaan dan koordinasi berupa:
 - a. Terbitnya Surat Gubernur yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota terkait dengan kewajiban penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen KLHS dan AMDAL/UKL-UPL.
 - b. Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan subtransi dan/atau

draft Perda dokumen perencanaan yang akan diproses penetapannya.

- c. Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota terkait upaya-upaya pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup secara terintegrasi dengan perannya masing-masing antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta *stakeholder* baik secara perorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan melalui penetapan 4 (empat) orang calon penerima Kalpataru tahun 2021, peran aktif 81 orang/kelompok masyarakat dalam bank sampah dan dasawisma, dan peran aktif 14 orang/kelompok dalam kegiatan kampung iklim.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan berbagai isu lingkungan seperti:

1. *Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air*. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, belum optimalnya pengawasan, dan keterbatasan sarana dan prasana pengelolaan lingkungan hidup.
2. *Persampahan*. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya dukungan pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang optimal dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain peningkatan pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan perumahan, dan lahan untuk perkebunan, serta kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur, sarana

dan prasarana pendukung kehidupan masyarakat, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk:

1. Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi dan jasa lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, pembinaan, penerapan supremasi hukum (*law enforcement*) dan mengambil langkah-langkah penanggulangan dan pengendalian.
3. Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemeliharaan, serta dukungan terhadap kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk proaktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup telah ditetapkan 3 sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

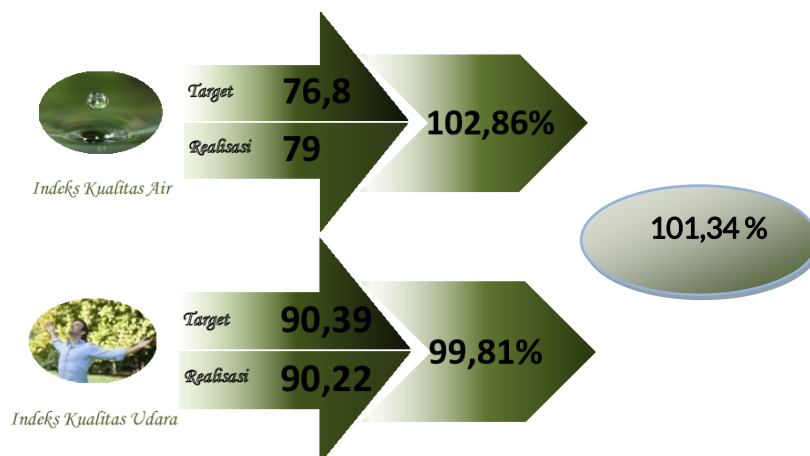


Sasaran 5.2.1 Meningkatkan Kualitas Air dan Udara

Air dan udara merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peningkatan kualitas air dan udara akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, begitupun sebaliknya. Agar air dan udara dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup maka air dan udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air dan udara.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan **meningkatnya kualitas air dan udara** sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara disajikan pada tabel 67.

Tabel 67 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.1



Berdasarkan 2 indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas air dan udara tercapai dengan sangat baik dengan rata-rata capaian 101,34%. Berikut diuraikan penjelasan masing-masing indikator:

1. Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk menjaga fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Untuk mengetahui kualitas air ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA). Penetapan indikator IKA diukur berdasarkan pemantauan sungai lintas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Untuk perhitungan IKA terlebih dahulu dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA) yang diperoleh dari hasil pengukuran kualitas air sungai. Setelah IPA diperoleh kemudian dilakukan konversi ke IKA. Perhitungan IPA dengan menggunakan rumus:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan :

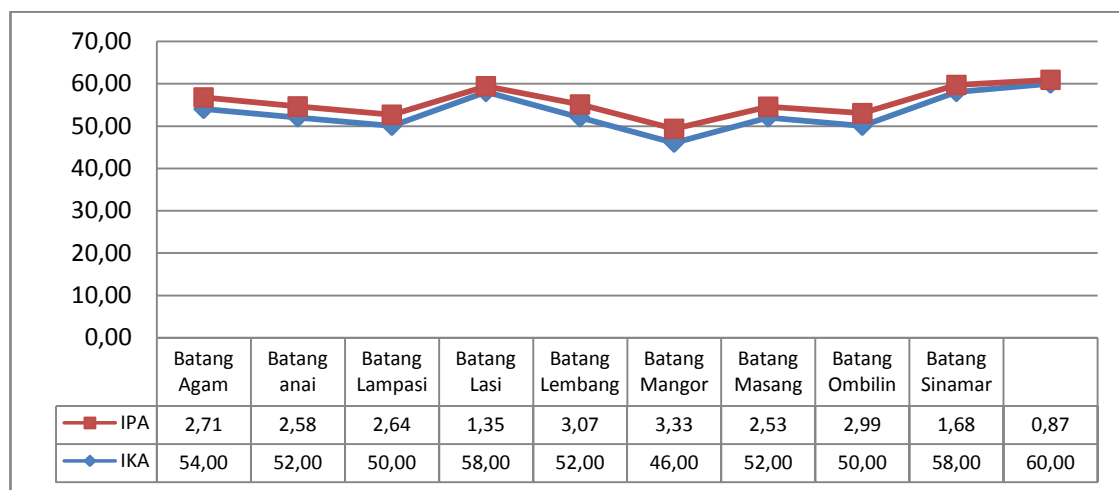
- PI_j Indeks Pencemaran Air (IPA) sungai
- C_i/L_{ij} perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan Baku Mutu
- M Maksimum
- R Rata-rata

Pada tahun 2021, IKA ditargetkan tercapai 76,8 (kategori baik). Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator IKA masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan IKA tahun 2020 (75) target tahun 2021 ditetapkan lebih tinggi 1,8.

IKA ditargetkan 76,8, realisasi 79 dengan tingkat capaian 102,86% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

Realisasi indikator kinerja IKA diperoleh berdasarkan hasil pemantauan terhadap 9 sungai dan 1 danau yang dilakukan pada satu periode selama setahun. Sembilan sungai yang dipantau tahun 2021 yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Lasi, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Masang, Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Sinamar. Sementara, air danau yang dipantau kualitas airnya adalah air Danau Maninjau. Rincian IPA dan IKA sungai dan danau yang dipantau di tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 83.

Grafik 83 IPA dan IKA sungai dan danau yang dipantau di tahun 2021



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

IKA yang tercapai 79 menunjukkan kualitas air di Sumatera Barat termasuk kategori Baik. Hal ini sesuai dengan kategori kualitas air berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel 68.

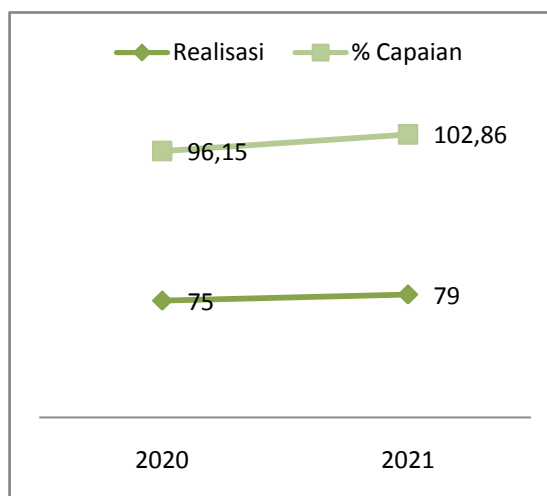
Tabel 68 Kategori IKA

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Capaian indikator kinerja IKA tahun 2021 yang tercapai 102,86% (>100%) menunjukkan realisasi indikator ini telah melebihi target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (96,15%), capaian 2021 meningkat 6,71%. Sama halnya dengan capaian yang meningkat di tahun 2021, realisasi IKA juga meningkat di tahun 2021 sebesar 4 poin menjadi 79. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 84.

Grafik 84 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks kualitas air tahun 2020-2021



Sumber data: Data diolah

Perkembangan IKA Sumatera Barat tahun 2016-2017 bervariasi, mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, menurun di tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021. Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 menargetkan IKA tercapai 76,8. Realisasi IKA tahun 2021 sebesar 79 menunjukkan target IKA tahun terakhir RPJMD 2016-2021 ini sudah tercapai 2,2 poin di atas target. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021, perhitungan IKA menggunakan skala perhitungan skala 70. Dengan adanya perubahan metode perhitungan, capaian realisasi IKA tahun 2016-2021 dapat disajikan dengan perhitungan skala 100 dan skala 70 dapat dilihat pada tabel 69.

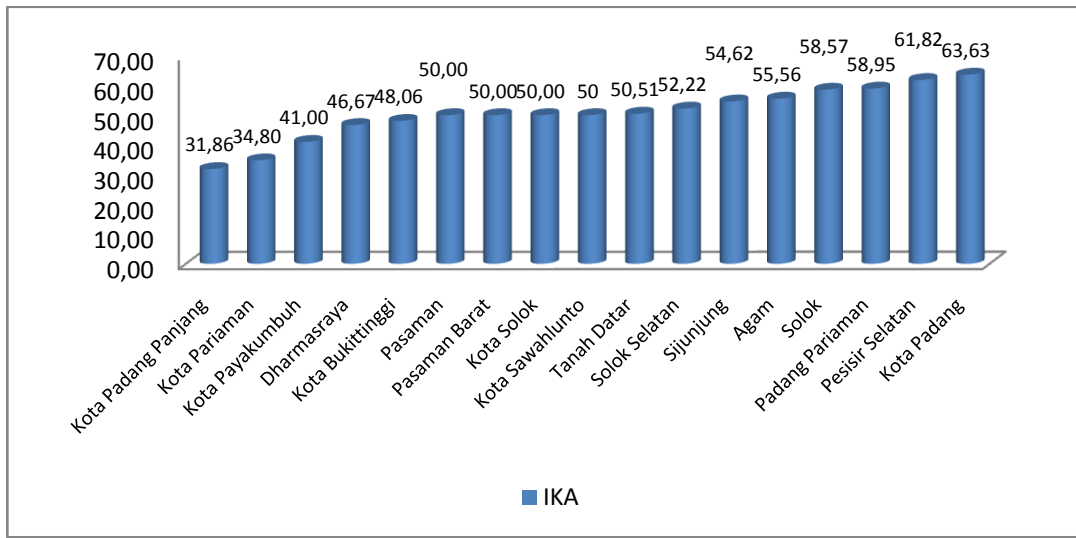
Tabel 69 Perkembangan IKA tahun 2016-2021 (skala 100 dan skala 70)

Tahun	Skala 100	Skala 70	Keterangan
2016	65,40		Perhitungan skala 70 mengacu pada Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021
2017	75,69	54,32	
2018	77,29	51,83	
2019	77,67	51,69	
2020	75,00	50,00	
2021	79,00	52,55	

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, IKA nya diperoleh dari aplikasi IKLH dengan perhitungan bobot 70. Kabupaten/Kota yang memiliki IKA yang terendah adalah Kota Padang Panjang sedangkan yang tertinggi adalah Kota Padang. Rata-rata IKA Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah 50,49. Nilai IKA masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 85.

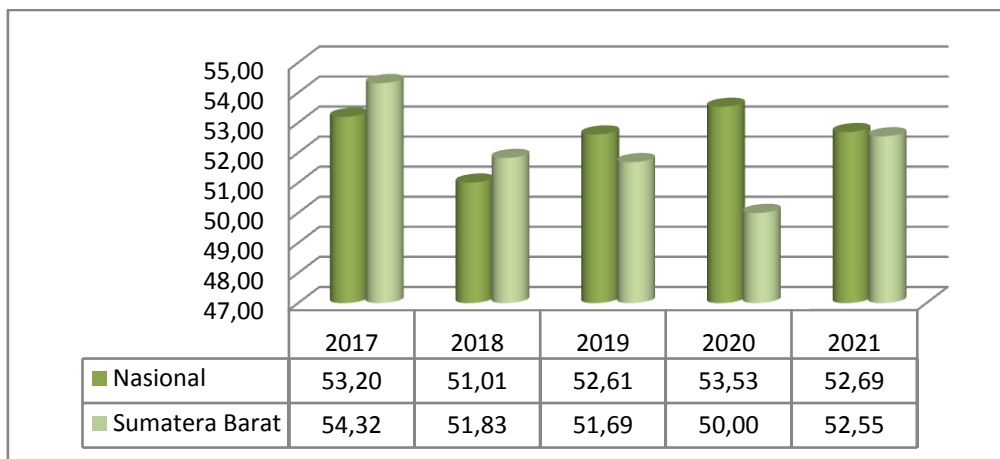
Grafik 85 Nilai IKA Kabupaten/Kota tahun 2021



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Jika dibandingkan dengan Nasional, untuk tahun 2019-2021 IKA Sumatera Barat lebih rendah dari IKA Nasional. Sedangkan tahun 2017 dan 2018, IKA Sumatera Barat lebih tinggi dari IKA Nasional. Perbandingan IKA Sumatera Barat dengan Nasional digambarkan pada grafik 86.

Grafik 86 Perbandingan IKA Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2017-2021



Sumber Data: Data diolah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air. Upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan limbah cair.
2. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
3. Melaksanakan pembinaan kepada instansi pengelola lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakkan hukum guna meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
4. Melakukan pengujian kualitas air limbah yang dilakukan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Laboratorium Lingkungan.
5. Mengerakkan pertanian organik, Pengendalian Organisme Pengganti Tumbuhan Ramah Lingkungan dan Pertanian Ramah Lingkungan. Kegiatan ini telah dilakukan beberapa tahun belakang dan tetap dipertahankan hingga saat ini, dan masa yang akan datang.
6. Pembangunan sanitasi yang layak.

Hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kualitas air yaitu:

1. Terjadinya pencemaran di sungai yang terlihat dari beberapa parameter yang melebihi baku mutu (DO, TSS, BOD5, Belerang, Klorin bebas, MBAS/Detergen, Total Coli dan Fecal Coli), yang bersumber dari aktifitas domestik di sekitar sungai (Buang Air Besar/BAB, limbah domestik, sampah), aktifitas pertanian/perkebunan, tingkat erosi yang tinggi akibat bukaan lahan pada bagian hulu, kegiatan penambangan di sungai dan erosi tebing sungai.
2. Belum adanya kegiatan di Kabupaten/Kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di Kabupaten/Kota.
3. Sulitnya merubah perilaku masyarakat dan belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.

4. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas.
5. Masih maraknya kegiatan penambangan illegal di sungai, kegiatan penambangan masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

Peningkatan kualitas sumber air di masa yang akan datang didasarkan pada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya yang tetap dilakukan dan akan dilakukan pada masa yang akan datang guna meningkatkan IKA adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengalihan pupuk kimia ke pupuk organik guna mewujudkan pertanian ramah lingkungan.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan perubahan perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
3. Melakukan upaya sinergisitas dalam mengelola sumber pencemar, melakukan upaya peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan Kabupaten/Kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatera) sesuai dengan kewenangan.
4. Mendorong kepada Kabupaten/Kota untuk membuat program pengadaan jamban untuk masyarakat yang berada disekitar sungai dan/atau upaya perubahan perilaku tidak buang air besar sembarangan.
5. Mendorong kepada Kabupaten/Kota untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organik.
6. Melakukan penertiban kegiatan penambangan illegal di sungai dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
7. Melakukan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui:

- a. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang merupakan program nasional.
 - b. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan Daerah (PROPER Daerah) sesuai dengan anggaran yang tersedia.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk membuat program serupa PROPER Daerah.
 9. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan secara intensif dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
 10. Melakukan pemulihan sungai yang tercemar oleh sampah. Pengerukan dan pengangkutan sedimen sampah plastik akan dilakukan secara periodik sekali setahun ataupun sekali dua/tiga tahun.
 11. Penguatan bantaran/tebing sungai baik secara alami maupun buatan dapat membantu menjaga kualitas air sungai. Pemulihan terhadap *catchment* area (daerah tangkapan air) juga perlu dilakukan karena tingginya parameter TSS pada kualitas air sungai dipengaruhi oleh longsor dan sedimentasi pada daerah hulu sungai. Pemulihan terhadap *catchment* area dilakukan dalam bentuk peningkatan tutupan vegetasi.

2. **Indeks Kualitas Udara**

Selain air, udara juga sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Untuk mengetahui kualitas udara ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU).

Penetapan indikator IKU diukur berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter NO₂ dan SO₂. Perbandingan yang diambil dalam perhitungan merujuk kepada baku mutu udara ambien di Uni Eropa (EU Directives). Nilai rata-rata tahunan dari NO₂ dan SO₂ akan dibandingkan dengan EU Directives dan dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Catatan:

I_{eu} = rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU).

Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ = 40 µg/m³, SO₂ = 20µg/m³.

Pada tahun 2021, IKU ditargetkan tercapai 90,39 (kategori sangat baik). Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator Indeks Kualitas Udara masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Target tahun 2021 ini ditetapkan sama dengan realisasi tahun 2020.

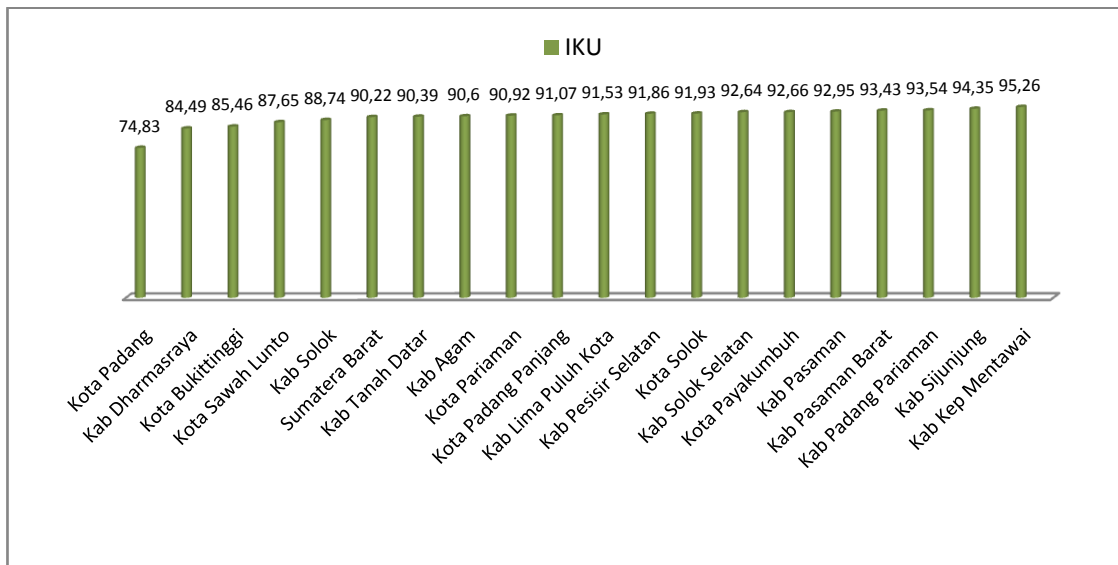
IKU ditargetkan 90,39, realisasi 90,22 dengan tingkat capaian 99,81% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja IKU diukur berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* di 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas dominan berupa: (1) padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat), (2) kawasan Industri (bukan industrinya), (3) Pemukiman padat penduduk, dan (4) perkantoran. Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di

daerah pelaksanaan pemantauan udara ambien metode *passive sampler* dilakukan 2 (dua) tahap yang mewakili kondisi setahun yaitu semester I dan semester II dengan lokasi yang sama, dimana untuk setiap pemantauan dibutuhkan waktu minimal selama 14 (empat belas) hari. Selain pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler*, khusus untuk Kota Padang dilakukan pemantauan kualitas udara ambien metode otomatis kontiniu dengan alat berupa satu unit *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang memberikan data setiap 30 menit setiap harinya.

Nilai IKU 90,22 menunjukkan kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat baik. Nilai ini merupakan kontribusi dari kualitas udara ambien di 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Kota Padang menempati posisi dengan IKU terendah, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki IKU tertinggi (95,26). Rendahnya IKU di Kota Padang disebabkan karena Kota Padang merupakan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yang padat aktivitas baik dari transportasi, industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, maupun aktivitas domestik. Kendaraan bermotor yang beraktivitas di Kota Padang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, begitupun dengan aktivitas industri, pembangkit listrik, dan domestiknya. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang berdasarkan data e-Samsat tahun 2021 berjumlah 700.950. Sebanyak 14 Kabupaten/Kota memiliki IKU yang lebih tinggi dari IKU tingkat Provinsi. IKU 19 Kabupaten Kota disajikan pada grafik 87.

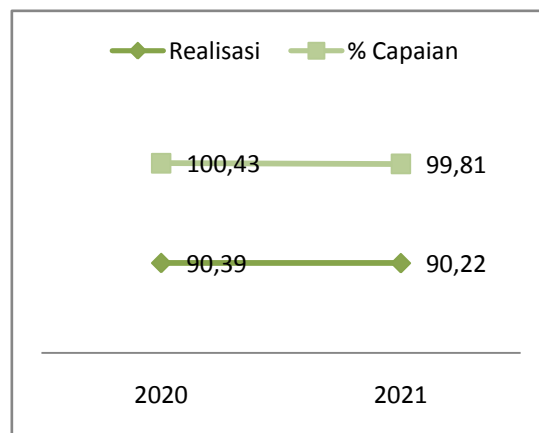
Grafik 87 Indeks Kualitas Udara 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja IKU tahun 2021 tercapai 99,81% (<100%) yang berarti realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (100,43%), capaian 2021 menurun 0,62%. Sama halnya dengan capaian yang menurun di tahun 2021, realisasi IKU juga menurun sebesar 0,17 poin di tahun 2021 menjadi 90,22. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 88.

Grafik 88 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2020-2021

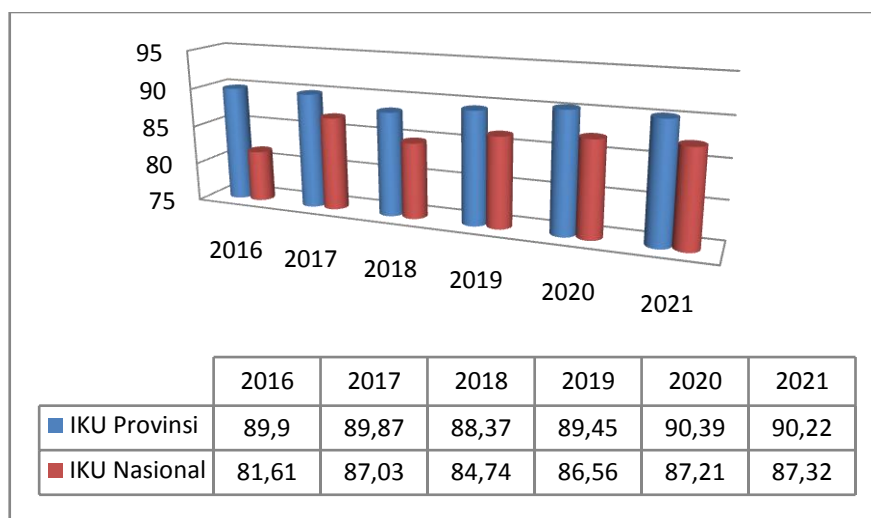


Sumber Data: Data Diolah

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 menargetkan IKU tercapai 90,39. Sementara itu, realisasi IKU tahun 2021 baru tercapai 90,22 lebih rendah 0,17 dari target yang ditetapkan.

IKU Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 termasuk kategori Baik dan kategori Sangat Baik di tahun 2020-2021. Perkembangan IKU ini berfluktuatif, menurun di tahun 2017-2019, meningkat di tahun 2020 dan kembali menurun di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Nasional, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016-2021), IKU provinsi sudah tercapai di atas IKU Nasional. Perbandingan IKU Provinsi Sumatera Barat dengan IKU Nasional tertuang pada grafik 89.

Grafik 89 Perbandingan IKU Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas udara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan terkait dengan pengelolaan sumber emisi.
2. Melaksanakan pembinaan kepada instansi pengelola lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakkan hukum guna meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
3. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan terhadap OPD Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam melakukan uji emisi.
4. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang

merupakan program nasional.

5. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk membuat program serupa PROPER Daerah.
6. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
7. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO₂ dan SO₂.
8. Melakukan pemantauan titik panas (*hotspot*) melalui satelit sehingga potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir.

Dalam hal menjaga dan meningkatkan kualitas udara, terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya:

1. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasi secara layak dan ramah lingkungan.
2. Penegakkan hukum terkait pembakaran sampah oleh masyarakat masih belum optimal.
3. Penegakkan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi.

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk mempertahankan kondisi dan kualitas udara antara lain:

1. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang merupakan program nasional.
2. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup

Kabupaten/Kota untuk membuat program serupa PROPER Daerah.

3. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Mendorong kepada Kabupaten/Kota untuk membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO₂ dan SO₂.
5. Meningkatkan dan mempertahankan tutupan vegetasi melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi.
6. Mempertahankan terpenuhinya baku mutu emisi gas buang dari sumber pencemar melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap objek/usaha kegiatan.
7. Menerbitkan regulasi pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasi secara layak dan ramah lingkungan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas air dan udara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 8 Program dengan 8 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp.9.941.841.740,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas air dan udara. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.2.1 dapat dilihat pada tabel 70.

Tabel 70 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.2.1.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	8	9.941.841.740	9.254.566.388
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1	158.882.610	158.727.200
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	3.449.609.180	3.369.699.003
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1	72.288.500	71.202.900
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	89.194.500	88.810.550
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	867.710.750	834.019.058
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1	192.469.850	188.274.350
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	110.095.600	109.977.000
8	Program Pengelolaan Persampahan	1	5.001.590.750	4.433.856.327

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **9.941.841.740,-** terealisasi sebesar Rp. **9.254.566.388,-** atau **93,09%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 687.275.352 (6,91%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas air dan udara (101,34%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93,09%) dengan tingkat efisiensi sebesar 8,25%.



Sasaran 5.2.2 Meningkatkan kualitas hutan dan lahan

Kualitas hutan dan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas hutan dan lahan juga akan mempengaruhi kualitas air dan kualitas udara. Terhadap kualitas air, kualitas hutan dan lahan dapat mengurangi potensi erosi yang pada akhirnya akan mengurangi kadar TSS (*Total Suspended Solid*) di badan air. Untuk kualitas udara, fungsi dari vegetasi yang ada akan berkontribusi menyerap dan menangkap polutan tertentu di udara ambien. Berdasarkan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan **meningkatnya kualitas hutan dan lahan** sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja indeks tutupan hutan (ITH). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, terminologi ITH berubah menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan perbandingan antara luas tutupan hutan (hutan primer dan hutan sekunder) di seluruh wilayah provinsi dengan luas wilayah provinsi. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merubah nomenklatur IKTL menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan menambahkan instrumen rehabilitasi hutan dan lahan.

Pada tahun 2021 ini, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, perhitungan IKL disusun dengan menggunakan data dan informasi IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Data IKTL didapatkan dari penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, *ground check* kondisi eksisting penggunaan lahan di wilayah perkotaan.

Indeks Kualitas Lahan tahun 2021 ditargetkan sebesar 66,30 (kriteria sedang). Penetapan target tahun 2021 mengacu pada *baseline* RPJMD tahun 2021-2026, meskipun tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Hal ini dikarenakan indikator Indeks Kualitas Lahan masih ditetapkan sebagai IKU Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan target tahun 2021 disajikan kembali dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai *baseline* dengan nilai yang mengalami perubahan/penyesuaian karena *recalculating* (perhitungan kembali). Jika dibandingkan dengan indeks kualitas lahan tahun 2020 (66,31) target tahun 2021 ditetapkan lebih rendah 0,01. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan tergambar pada tabel 71.



Realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan diukur berdasarkan data dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - \{(84,3 - (TL \times 100) \times 50/54,3\}$$

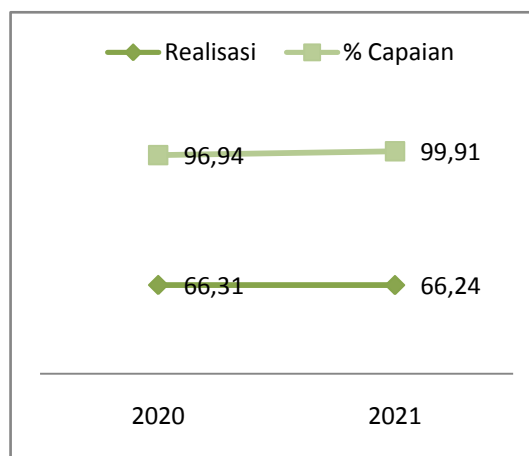
Ketika wilayah tersebut memiliki lahan gambut maka ditambahkan komponen Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut (DKK) sebagai faktor pengurang sehingga menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IKL &= 100 - \{(84,3 - ((TL - DKK) \times 100) \times 50/54,3\} \\ &= 100 - \{(84,3 - ((0,48 - 0,00058176354908107) \times 100) \times 50/54,3\} \\ &= 66,24 \end{aligned}$$

Ket : TL = Tutupan Lahan = 0,48
 DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal = 0,00058176354908107

Capaian indikator IKL tahun 2021 yang tercapai 99,91% (<100%) menunjukkan realisasi tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (96,94%), capaian 2021 meningkat 2,97%. Berbeda dengan capaian yang meningkat di tahun 2021, realisasi indeks tutupan lahan justru menurun 0,07 di tahun 2021 menjadi 66,24. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 90.

Grafik 90 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tutupan lahan tahun 2020-2021

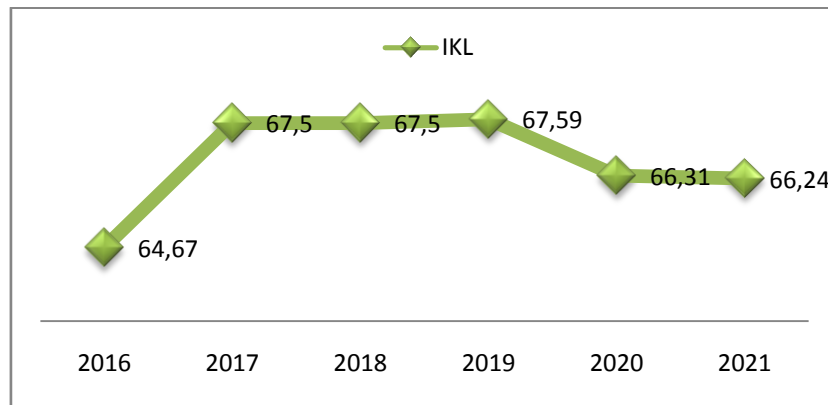


Sumber data: Data diolah

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 menargetkan IKL dapat tercapai 66,3. Akan tetapi, realisasi tahun 2021 ini baru tercapai 66,24 lebih rendah 0,06 dibandingkan target tahun terakhir RPJMD tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKL tahun 2021 belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indeks tutupan lahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menunjukkan kondisi nilai yang berfluktuatif, mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019, dan mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Indeks tutupan lahan tahun 2021 ini menunjukkan penurunan sebesar 0,07 dibanding dengan indeks tutupan lahan tahun 2020. Penurunan IKL disebabkan karena masih terjadinya deforestasi hutan dan lahan, serta belum signifikannya capaian luasan capaian dari Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan reforestasi hutan dan lahan, restorasi lahan gambut/RHL mangrove dan kegiatan penanaman lainnya. Secara rinci perkembangan IKL tahun 2016-2021 digambarkan pada grafik 91.

Grafik 91 IKL tahun 2016-2021

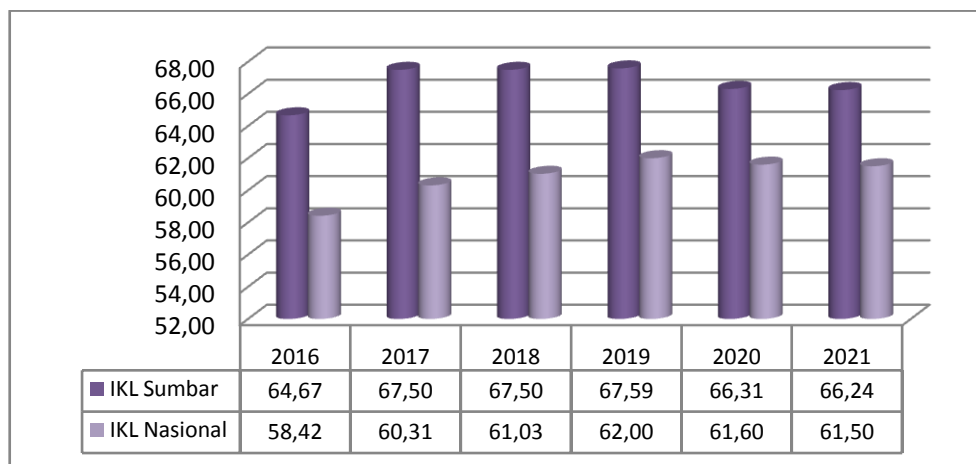


Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Indek Kualitas Lahan tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 93,21 dan terendah di Kota Bukittinggi yaitu 22,38 disusul Kota Pariaman yaitu 22,92 (karena tidak memiliki kawasan hutan). Adapun Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan hutan tetapi IKLnya rendah (< 50) antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Sawahlunto.

Jika dibandingkan dengan IKL secara Nasional, sepanjang tahun 2016-2021 IKL Provinsi Sumatera Barat tetap berada di atas IKL Nasional. Perbandingan IKL Sumatera Barat dengan IKL Nasional tahun 2016-2021 dapat diketahui dari grafik 92.

Grafik 92 Perbandingan IKL Sumatera Barat dengan IKL Nasional Tahun 2016-2021



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan/menjaga kualitas lahan antara lain:

1. Melakukan inventarisasi lahan akses terbuka dan edukasi ke pemerintah nagari dimana aktivitas penambangan dan lokasi lahan akses terbuka berada untuk melakukan upaya pencegahan perusakan lahan dan mendorong para pemilik lahan untuk melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan lahan secara mandiri.
2. Melakukan koordinasi dengan Inspektur Tambang agar kegiatan penambangan segera melakukan reklamasi pada lahan yang sudah tidak dilakukan penambangan melalui PROPERDA.
3. Membuat *pilot project*/percontohan pemulihan lahan akses terbuka di Nagari Limo Koto Kabupaten Sijunjung.
4. Memfasilitasi dan mengarahkan dana CSR untuk digunakan melakukan penanaman pada lokasi lahan akses terbuka yang telah dipulihkan oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
5. Memfasilitasi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk pembuatan arboretum, taman Kehati, RTH.
6. Upaya pencegahan perubahan/alih fungsi lahan, perubahan perilaku pembukaan lahan dengan vegetasi kayu untuk pertanian dan upaya rehabilitasi. Laju deforestasi tidak sebanding dengan pemulihan.
7. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman tanaman produktif (pohon kehutanan dan buah-buahan)= 1.013 ha (2016 s.d 2021 16.075 ha) tersebar pada Lahan Kritis di Sumatera Barat.
8. Pengamanan kawasan hutan yang dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan (Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari).
9. Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api di tingkat Nagari.
10. Memantau titik panas (Hotspot) melalui satelit.

Dalam meningkatkan kualitas hutan dan lahan masih ditemukan hambatan/kendala berikut ini:

1. Alih fungsi lahan yang cepat merupakan faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan terjadi baik pada kawasan hutan maupun APL serta pada lahan yang telah dilakukan rehabilitasi. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan
2. Penebangan liar/ *illegal logging/ illegal minning*
3. Terjadinya kebakaran hutan akibat kelalaian manusia

Adapun upaya/solusi yang akan dilakukan guna peningkatan kualitas hutan dan lahan yang akan datang antara lain:

1. Mendorong pemanfaatan lahan-lahan terbuka menjadi RTH (Ruang Terbuka Hijau)
2. Memberikan hak pengelolaan kawasan hutan pada masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema hutan nagari, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat dan kemitraan.
3. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan
4. Meningkatkan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan hutan (seperti Rimbo Larangan)
5. Meningkatkan program pohon asuh

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi melaksanakan 4 Program dengan 9 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **30.207.707.274,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas hutan dan lahan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.2.2. dapat dilihat pada tabel 72.

Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.2.2.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	9	30.207.707.274	27.362.881.898
1	Program Pengelolaan Hutan	6	20.747.380.387	18.649.430.167
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1	439.274.500	384.365.000
3	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	8.540.553.387	7.899.528.631
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	480.499.000	429.558.100

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **30.207.707.274,-** terealisasi sebesar Rp. **27.362.881.898,-** atau **90,58%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.844.825.376 (9,42%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas hutan dan lahan(99,91%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (**90,58%**) dengan tingkat efisiensi sebesar 9,33%.



Sasaran 5.2.3 Menurunnya risiko bencana

Kondisi geografis Sumatera Barat yang terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi yaitu dua lempeng tektonik (zona subduksi lempeng) yang terletak di laut sebelah Barat Kepulauan Mentawai dan zona patahan Sumatera yang terletak di sepanjang Bukit Barisan berdampak terhadap tingginya potensi bencana di Sumatera Barat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana

penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Adapun bencana yang menjadi tanggungjawab intervensi pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, banjir dan gempa bumi. Bencana yang terjadi akan berdampak kerusakan di semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

Dalam hal penanggulangan bencana, sasaran yang ditetapkan penanggulangan bencana termasuk pada tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan segera untuk masyarakat yang tertimpa bencana agar mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Untuk tahun 2021, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75% dari total kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Penetapan target tahun 2021 mengacu target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020 (75%), target tahun 2021 ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya. Untuk RPJMD tahun 2021-2026 indikator ini tidak masuk lagi sebagai indikator kinerja sasaran namun disempurnakan indikatornya menjadi Indeks Ketahanan Daerah. Pencapaian sasaran menurunnya risiko bencana tergambar pada tabel 73.

Tabel 73 Capaian Indikator Sasaran Strategis 5.2.3



Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%, realisasi 71,03% dengan tingkat capaian sebesar 94,71% termasuk kategori keberhasilan *sangat baik*.

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana diukur berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{632 \text{ kejadian}}{932 \text{ kejadian}} \times 100\% = 71,03\%$$

Ket:

1. Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana = 632 kejadian
2. Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota = 932 kejadian

Kejadian bencana dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa keikutsertaan Pemerintah provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 = 300

Berdasarkan jenis bencana yang terjadi di tahun 2021, angin kencang merupakan bencana yang sering terjadi (660 kejadian) disusul oleh banjir (113 kejadian) dan longsor (107 kejadian). Rincian jenis bencana yang terjadi selama tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat diuraikan pada tabel 74.

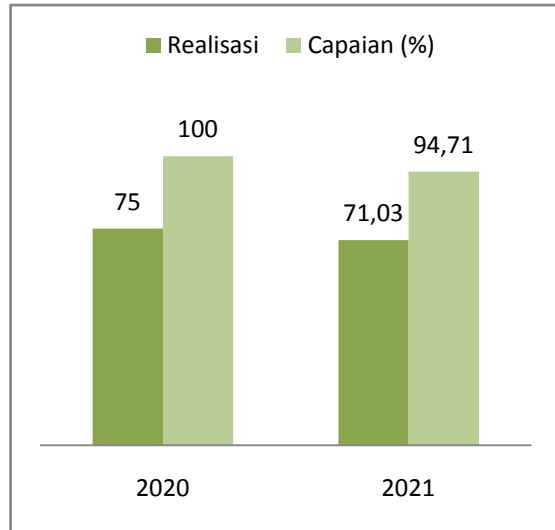
Tabel 74 Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2021

No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Abrasi Pantai	4
2	Banjir	113
3	Banjir Bandang	7
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	36
5	Angin Kencang	660
6	Longsor	107
7	Gelombang Pasang	5
Total		932

Sumber data: Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat

Capaian indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2021 yang tercapai 94,71% (<100%) menunjukkan realisasi belum mencapai target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (100%), capaian 2021 lebih rendah 5,29%. Begitupun dengan realisasi tahun 2021 yang juga tercapai lebih rendah 3,97% dari realisasi tahun 2020 (75%). Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020-2021 digambarkan pada grafik 93.

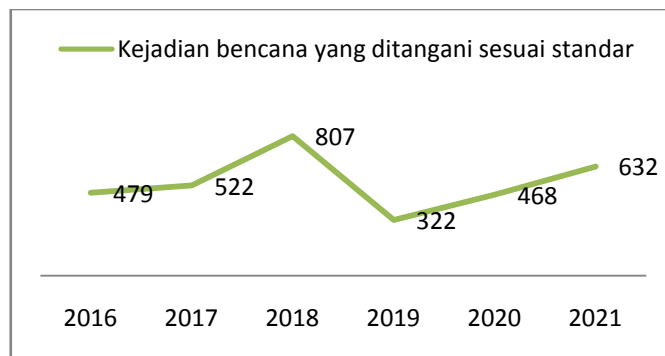
Grafik 93 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2020-2021



Sumber Data: Data Diolah

Kejadian bencana yang ditangani sesuai standar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menunjukkan jumlah yang bervariasi seiring dengan jumlah bencana yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Rincian kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada grafik 94.

Grafik 94 Kejadian bencana yang ditangani tahun 2016-2021



Sumber Data: Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menargetkan persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai

standar kapasitas penanggulangan bencana tercapai 75%. Capaian indikator ini di tahun 2021 sebesar 94,71% (<100%) menunjukkan target tahun terakhir RPJMD periode 2016-2021 belum tercapai sesuai dengan harapan. Ketidaktercapaian target ini dikarenakan oleh beberapa kejadian bencana tidak terlalu besar dampaknya dan dapat ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam hal penanggulangan bencana pada kondisi tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah infrastruktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 26 unit alat peringatan dini tsunami/Indonesia *Tsunami Early Warning System* (InaTEWS) yang berfungsi dengan baik, sistem peringatan dini pergerakan tanah dan alat ukur ketinggian air.
2. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana
3. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
5. Meningkatkan kapasitas aparatur BPBD dan kapasitas relawan dalam penanggulangan bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.
6. Mendampingi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kabupaten/Kota, saat ini telah terbentuk 18 FPRB pada 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan 1 (satu) daerah yaitu Kabupaten Sijunjung dalam proses pembentukan FPRB.
7. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang berada di tingkat nagari.
8. Melakukan koordinasi dengan *Non Governmental Organization* (NGO) terkait Nagari Tangguh Bencana

9. Menambah pemasangan rambu-rambu untuk memudahkan evakuasi apabila terjadi bencana.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana antara lain:

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sangat diperlukan tenaga teknis dan pegawai yang kompeten yang memahami tugas dan fungsinya.
2. Perlunya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
3. Luasnya cakupan wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.
4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai.
5. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana.
6. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana.
7. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan beberapa TRC Kabupaten/Kota yang sudah dibentuk belum melaksanakan fungsinya secara optimal serta belum melaporkan ke BPBD Provinsi Sumatera Barat

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang antara lain:

1. Peningkatan kesiapsiagaan aparatur dan relawan dalam menghadapi bencana yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada BPBD

Kabupaten/Kota, masyarakat dan OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana pada setiap tahapan.

2. Menambah peralatan kesiapsiagaan bencana dan melakukan pemeliharaan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendukung/penunjang penanggulangan bencana.
3. Melaksanakan pemutakhiran dokumen rencana kontigensi dalam menghadapi suatu jenis kejadian bencana dengan melakukan pengujian/simulasi sehingga dapat dilakukan perbaikan jika masih ditemui kelemahan dalam proses simulasi tersebut.
4. Membangun sistem informasi relawan dan data logistik sesuai dengan kualifikasinya sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dan penanganan apabila terjadi bencana.
5. Perlunya membentuk dan melegalisasi TRC pada Kabupaten/Kota yang belum ada TRCnya.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.

Untuk mencapai sasaran menurunnya resiko bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 5 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp.17.924.124.097,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran menurunnya resiko bencana. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 5.2.3 dapat dilihat pada tabel 75.

Tabel 75 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.2.3.

NO	SASARAN/PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Menurunnya Risiko Bencana	5	17.924.124.097	16.404.307.232
1	Program Penanggulangan Bencana	4	17.869.908.368	16.350.347.532
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	54.215.729	53.959.700

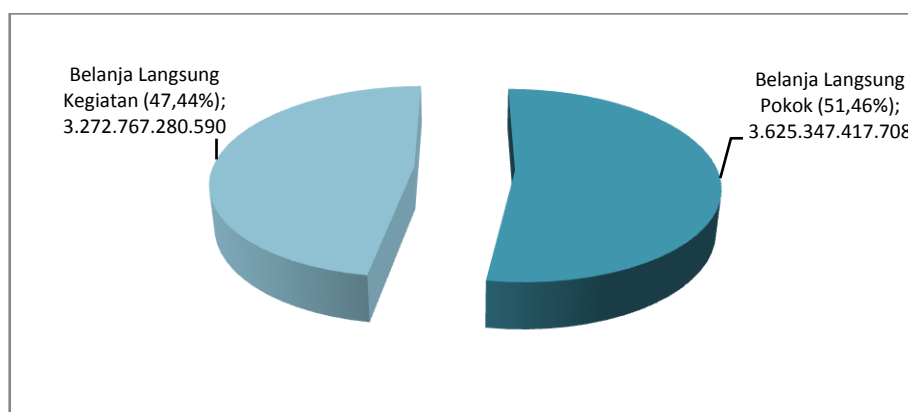
Dari jumlah anggaran sebesar Rp.17.924.124.097,- terealisasi sebesar Rp. 16.404.307.232,- atau 91,52%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.519.816.865 (8,5%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran menurunnya resiko bencana (94,71%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,52%) dengan tingkat efisiensi sebesar 3,19%.

3.4. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Anggaran belanja daerah menurut urusan dalam Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Perubahan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.898.114.698.298,-. Terkait dengan anggaran tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran belanja daerah menurut urusan dalam APBD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.898.114.698.298,- yang terdiri dari belanja langsung kegiatan dan belanja langsung pokok dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada grafik 95.

Grafik 95 Rincian Belanja Langsung Tahun 2021



Sumber data: BPKAD

2. Anggaran sebesar Rp. 6.898.114.698.298,- digunakan untuk melaksanakan 166 program yang terdiri dari 165 program urusan dan 1 program penunjang urusan. Dari 165 program urusan sebanyak 159 program mendukung pencapaian 18 sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, 6 program urusan mendukung pelaksanaan urusan lain yang tidak terkait langsung dengan pencapaian 18 sasaran. Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 18 sasaran tahun 2021 diuraikan pada tabel 76.

Tabel 76 Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung program/kegiatan yang mendukung pencapaian 18 sasaran tahun 2021

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% Capaian
1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	9.459.981.252	9.397.439.071	99,34
2	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	13.124.505.442	12.459.330.114	94,93
3	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel	1.149.363.788.719	1.106.669.409.226	96,29
4	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	41.365.440.492	38.895.407.685	94,03
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	63.770.724.612	55.375.506.104	86,84
6	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	715.027.381.777	603.922.308.055	84,46
7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	271.598.665.978	232.003.400.452	85,42
8	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	236.736.880.047	216.904.521.620	91,62
9	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	4.988.666.986	4.933.083.491	98,89
10	Meningkatnya Nilai Ekspor	18.055.800	16.220.800	89,84
11	Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	62.657.512.063	58.947.347.020	94,08
12	Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah	396.073.381.384	313.450.622.431	79,14
13	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur ECTL	7.534.424.829	7.279.665.081	96,62
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	152.458.517.921	118.497.364.326	77,72

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% Capaian
	Pengelolaan Sumber Daya Air			
15	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	62.875.814.831	61.339.880.040	97,56
16	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	9.941.841.740	9.254.566.388	93,09
17	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	30.207.707.274	27.362.881.898	90,58
18	Menurunnya Risiko Bencana	17.924.124.097	16.404.307.232	91,52
	TOTAL	3.245.127.415.244	2.893.113.261.033	89,15

- Berdasarkan tabel di atas diketahui anggaran untuk mendukung pencapaian 18 sasaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **3.245.127.415.244,-** atau 99,16% dari belanja langsung kegiatan. Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **3.245.127.415.244,-** terealisasi sebesar Rp. **2.893.113.261.033,-** atau **89,15%**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 18 sasaran terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 352.014.154.211,- (10,85%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja 18 sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 (104,35%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (**89,15%**) dengan tingkat efisiensi sebesar 15,2%.
- Anggaran belanja langsung pokok sebesar Rp. 3.625.347.417.708,- digunakan untuk melaksanakan program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat termasuk didalamnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2021. Anggaran sebesar Rp. 3.625.347.417.708,- terealisasi sebesar Rp. **3.549.991.566.935,-** atau **97,92%**.



BAB 4

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1. *Kesimpulan*

Berdasarkan informasi akuntabilitas kinerja yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab 3, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 memberikan informasi kepada *stakeholders* terkait pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Kinerja ini didasarkan pada ketercapaian 9 indikator kinerja yang mengukur 7 tujuan dan 23 indikator kinerja yang mengukur 18 sasaran yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
2. Pencapaian 18 sasaran tersebut didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. **3.245.127.415.244,-** terealisasi sebesar Rp. **2.893.113.261.033,-** atau **89,15%**.
3. Rata-rata capaian indikator kinerja 18 sasaran tahun 2021 adalah sebesar 104,35% termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*. Rincian pencapaian 18 sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sasaran dengan pencapaian tertinggi adalah sasaran meningkatnya nilai ekspor dengan capaian sebesar 220,15%, dan sasaran terendah adalah

sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan capaian sebesar 78,11%.

- b. 9 sasaran (50%) mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, 7 sasaran (38,89%) mencapai keberhasilan dengan kategori *sangat baik*, 2 sasaran (11,11%) mencapai keberhasilan dengan kategori *baik*.
- c. Dari 23 indikator kinerja yang mengukur sasaran ada satu indikator yang realisasinya menggunakan realisasi tahun sebelumnya yaitu nilai evaluasi SAKIP tahun 2021. Hal ini dikarenakan, pada saat laporan ini dibuat, nilai evaluasi SAKIP belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4.2. *Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa yang Akan Datang*



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan usaha dan upaya yang berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Upaya tersebut dimulai dari penetapan tujuan/sasaran yang berorientasi hasil, penetapan ukuran kinerja yang terukur dan relevan, penetapan target yang terukur dan logis dan melaksanakan program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran. Upaya peningkatan kinerja tersebut merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan perbaikan untuk mendukung penguatan implementasi SAKIP.

Upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Memaksimalkan komitmen pimpinan dalam penerapan SAKIP.
2. Membangun kolaborasi kinerja antar perangkat daerah untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.
3. Menerapkan manajemen kinerja individu berdasarkan kinerja organisasi.

4. Menjadikan hambatan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target di tahun 2021 sebagai dasar merumuskan strategi pencapaian kinerja di masa yang akan datang.
5. Mengevaluasi keterkaitan program/kegiatan dengan pencapaian sasaran Pemerintah Daerah.